



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201705671, 20 November 2017
- II. Pencipta
Nama : **MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP**
Alamat : Jl. Brigjend Hamid Gg. Famili No. 8, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Medan, SUMATERA UTARA, 20146
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP**
Alamat : Jl. Brigjend Hamid Gg. Famili No. 8, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Medan, SUMATERA UTARA, 20146
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **MALPRAKTIK PEMBANGUNAN; SEBUAH CATATAN**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Juli 2017, di Medan
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 05632

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

H. MUJAHIDDIN, S.SOS.MSP

MALPRAKTIK PEMBANGUNAN

Sebuah Catatan

umsu  PRESS

MALPRAKTIK PEMBANGUNAN: Sebuah Catatan

**Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam
Terbitan (KDT)**

ISBN:

13 × 19 cm

ix, 335 hlm

Cetakan ke-1, Juni 2017

UMSU PRESS. Juni 2017

Penulis:

H. Mujahiddin, S.Sos, MSP

Desain Sampul & Lay Out

Ahmad Mahardika

Layout:

Faisal Hamzah Lubis

Diterbitkan Oleh :

UMSU-PRESS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238

Tlp. 061-6638296, Fax. 061-6638296

Email: umsupress@gmail.com

<http://umsupress.com>

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam yang telah memberikan keshatan dan kelapangan waktu kepada kepada saya untuk dapat menyelesaikan buku yang ada di tangan anda hari ini. Buku dengan judul “Malpraktik Pembangunan; Sebuah Catatan,” merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan saya yang pernah diterbitkan pada halaman Opini Harian Waspada dan Harian Mimbar Umum serta halaman Wacana Pada Harian Medan Bisnis.

Kumpulan tulisan opini sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 ini sengaja diberi judul Malpraktik Pembangunan. Hal ini dikarenakan isi tulisan opini lebih banyak mengarah pada pembahasan masalah-masalah pembangunan yang berada pada skala lokal, nasional dan global. Agar lebih menarik buku yang berisi 47 tulisan ini kemudian dibagi kedalam lima bab.

Pada bab pertama buku ini berisikan kumpulan tulisan yang banyak membahas persoalan

umat (baca; islam) yang dihadapkan pada agenda-agenda pembangunan yang terkadang sering sangat merugikan. Demokratisasi Politik, Kapitalisme Ekonomi dan kemiskinan umat menjadi tema-tema subtanis pada bab ini.

Di Bab II buku ini diberi judul Malpraktik Pembangunan. Sama dengan judul utama buku. Hal ini dikarenakan pada bab ini berisi kumpulan tulisan yang membahas tindakan-tindakan malpraktik dalam pembangunan. Pada Bab III dibahas bagaimana kota dalam pusran pembangunan. Beberapa tulisan pada Bab III ini membahas persoalan perkembangan kota, tata ruang, persampahan, urbanisasi, kebencanaan dan kepemimpinan.

Pada Bab IV pada buku ini diberi judul Pembangunan Untuk Pembangunan. Judul tersebut sengaja diberikan karena kebanyakan tulisan pada Bab IV ini mengulas tentang bagaimana idealnya praktik pembangunan dilaksanakan baik pada tatanan proses hingga tujuan. Terakhir pada Bab V, dibahas tentang isu-isu korupsi dalam pembangunan mulai

dari postulat korupsi, korupsi dan kekuasaan, hingga politik transaksional di desa.

Lebi lanjut, secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Bapak Shohibul Anzor Siregar yang telah bersedia memberikan Prolog pada buku ini dengan judul Tauhid Sosial. Selain itu saya juga mengucapkan terimakasih karena telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman khususnya pada bidang-bidang kajian pembangunan. Selanjutnya ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada senior saya Nirwansyah Putra Panjaitan. Sebab, berkat dorongan dan motivasi dari beliau saya dapat menulis opini di harian-harian lokal di Kota Medan.

Selain itu, ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Arifin Saleh Siregar. Beliau merupakan salah satu orang yang juga terus memberikan motivasi kepada saya untuk terus menulis pada harian-harian lokal di Kota Medan. Terakhir ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Pimpinan Fakultas FISIP UMSU yang telah

membantu proses penerbitan buku ini melalui UMSU-Press.

Semoga buku ini dapat menjadi satu rujukan yang bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak pada bidang kajian-kajian pembangunan. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa ilmu sosial dan studi pembangunan khususnya pada mata kuliah aplikasi teori pembangunan dan mata kuliah isu dan masalah pembangunan. Begitupun, secara jujur penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam buku ini. Baik dari segi tatacara penulisan dan juga penyampaian terhadap satu gagasan tertentu.

Pada akhirnya keseluruhan isi buku ini saya persembahkan untuk istri saya Cut Sri Ramadani Sembiring, S.I.Kom dan anak Saya Safa Al Mujna. Kedua orang yang selalu ada di dalam hati dan pikiran saya. Semoga Allah memberkahi kehidupan kami. Amin, (*)

Medan, Juni 2017
Mujahiddin, S.Sos, MSP

Daftar Isi

Halaman

Prolog : Tauhid Struktural

Oleh: Drs. Shohibul Ansor Siregar, M.Si

Bagian I: Islam Dalam Pembangunan	1
❖ Tata Ruang Kota dan (Kekalahan) Umat Islam	2
❖ Islam Yang (Tak) Berdaya	9
❖ Membangun Gerakan Islam Yang Strukturalis	17
❖ Posisi Umat Islam Pasca Pilkada	25
❖ CCTV di Masjid Kita	33
❖ Polusi Suara: Suara Kaset Ngaji Atau Buyi Petasan?	41
❖ Hijrah Di Akhir Ramadhan: Dari Masjid ke Plaza	48
❖ Kapitalisme Berkerudung dan Ramadhan Fair	55
❖ Inflasi dan Budaya Konsumtif di Ramadhan	61
Bagian II: Malpraktik Pembangunan	68
❖ Malpraktik Pembangunan	69
❖ Bahagia Di Tengah Begal Motor ...	79

❖ Nawacita “Tak Berasap”	85
❖ Dilema Usaha Kecil dan Menengah	93
❖ Nasib Nelayan di Negara Maritim ..	100
❖ Dilema (Ekonomi) Petani di Negara Agraris	107
❖ Depedensi	114
❖ Virus n-Ach dan (Aplikasi) Proyeksi Ekonomi Kita	122
❖ Menyongsong Pembangunan Global Berbasis SDGs	129
❖ Negeri Serba Darurat	136

Bagian III: Kota Dalam Pusaran

Pembangunan	145
❖ Medan (Menuju) Kota Tyranopolis..	146
❖ Medan (Bukan) Kota Sampah	154
❖ Tata (R)uang	161
❖ Arus Balik dan Dilema (Ekonomi) Perkotaan	168
❖ Siaga Bencana, Siaga Bersama	175
❖ Mencari Figur Walikota (M)edan	181

Bagian IV: Pembangunan Untuk

Pembangunan	189
❖ Membangun (Tanpa) Utang	190

❖ Kemiskinan dan Kesenjangan	
Di Tahun Politik	198
❖ Puasa Subsidi BBM, Cukup-kah?	204
❖ Kemacetan Lalu Lintas dan Potensi	
Ekonomi	210
❖ Dilema Pembangunan Kesehatan	216
❖ Pusaran Dilema Industri Kreatif	223
❖ Risalah Pertanian di Tengah	
Pertumbuhan Ekonomi	230
❖ SPG Dalam Bingkai Produksi	
Kapitalisme	236
❖ Waktunya (Menuai)	
Gerakan Filantropi	242
❖ Brazil: Kemiskinan dan	
Industri Sepak Bola	248
❖ Anak dan Ancaman Konsumsi	
Pangan	254
❖ APBN 2016 dan	
Tahun (Pengampunan) Pajak	260
❖ Memperkuat Potensi Ekonomi	
Sampah	267
Bagian V: Korupsi dan Pembangunan	275
❖ Postulat Korupsi	276
❖ Jebakan (Kekuasaan) Legislatif	283

❖ Pilkada; Antara Keuntungan Kelompok dan Mental Pajabat	291
❖ Sepak (Mafia) Bola	299
❖ KPK Harus Jadi “Ikan di Laut”	306
❖ Mencari Kejujuran	315
❖ Awas (Desentralisasi) Rent Seeking	321
❖ Politik Transaksional di Desa	328

Profil Penulis

Tauhid Struktural¹

Oleh: Drs. Shohibul Anshor Siregar, M.Si²

Jika negara hanya akan menjadi alat bagi para penguasa modal, bukankah penindasan menjadi satu-satunya bahasa yang akan tetap dianggap keniscayaan oleh negara? Lalu negara apa yang tak berkepedulian kepada rakyat demi pertumbuhan yang melahirkan kesenjangan?

Al-qur'an dalam surah Annisa ayat 29 pada pokoknya dapat menjadi inspirasi kuat untuk langkah kongkrit menegaskan distribusi pendapatan di antara penduduk (lokal, nasional dan internasional) dalam mekanisme pembangunan dan pertumbuhan inklusif. "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara keji, melainkan lakukanlah melalui transaksi yang saling meridhai di antara kalian, dan janganlah kalian membinasakan diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian".

Umat Islam Indonesia menduduki persentase lebih tinggi dibanding pemeluk agama-agama lain. Dari total 237.641.326 orang penduduk

¹ Diterbitkan untuk pertamakalinya oleh Harian WASPADA, Medan, 8 Juni 2015, hlm B7

² Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU

Indonesia, jumlah umat Islam adalah sebesar 87,18 %, Kristen 6,96 %, Katholik 2,91 %, Hindu 1,60 %, Budha, 0,72 %, Khong Hucu 0,06 %, dan lainnya 0,51 % (BPS, 2010). Karena itu sangatlah penting, dan bukan sesuatu hal yang cengeng, untuk memastikan segala sesuatu yang akan dilakukan di Indonesia, mulai dari pembentukan pemerintahannya, penunjukan para pejabatnya dan pengambilan kebijakan pembangunannya, untuk dijamin bersesuaian dengan kepentingan melindungi umat beragama itu.

Kerukunan Konvensional.

Jaminan konstitusi tentang hak warga Negara dalam beragama di Indonesia memberi keleluasaan menjalankan aturan dan kebebasan yang diberikan oleh Negara. Umumnya orang tak merasa ada masalah serius di sini, meski misalnya negara menambah jumlah agama dari stok living reality sosial budaya tertentu, sambil mendiskriminasi hak-hak yang lain. Sayangnya eksplorasi berdasarkan pemahaman resmi negara selama ini sangat sederhana, jauh di bawah kebutuhan karena hanya ingin berhenti sebatas interaksi berporos keserasian formal di antara sesama pemeluk agama.

Bahwa jika dalam UUD 1945 terdapat jaminan besar atas kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama atau kepercayaannya, untuk kepentingan terluas dapat dipastikan tidak begitu jamak masalah. Tetapi sebetulnya hal itu tidak boleh berhenti untuk sekadar difahami sebatas Standing point agama terhadap pengaturan pola kerukunan dalam berinteraksi. Negara tak seharusnya mengabaikan arah konflik yang berkembang kumulatif dari hari ke hari. Benar, negara telah gagal memahami dan menjelaskan kehadirannya secara imperatif untuk menjamin kerukunan itu, sembari terlihat semakin serius terus-menerus berambisi menuding kelompok tertentu sebagai pihak yang selalu gagal memahami toleransi.

Telah lama negara dibiarkan hanya menjadi saksi dan sekaligus pengukuh status kesenjangan sosial ekonomi yang rawan keserasian. Negara mana di permukaan bumi ini yang sudah lama dihentikan oleh para operator pada titik minimalis, tentulah dapat dibuat daftarnya dengan mudah, termasuk Indonesia. Perhatikanlah pemerintah tetap menilai urusan terpentingnya hanyalah melakukan intervensi melalui pemberlakuan

regulasi tertentu, misalnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, no 8 dan 9 tahun 2006 tentang trilogi kerukunan yang mencakup kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ia pun selalu diposisikan menakutkan dengan kerap mengatakan bahwa di Indonesia faktor agama selalu menduduki peringkat kedua sebagai pemicu konflik sosial yang serius. Sangat diperlukan koreksi tajam, bahwa pertautan antar faktor tak mungkin diabaikan. Konflik agama tak selalu demi dan untuk agama itu sendiri berdasarkan persepsi para pemeluknya saja. Tetapi berbagai konflik dalam dimensi politik dan ekonomi semakin kerap mengambil tema pada agama dan pemahaman purifikasi di dalamnya.

Masalah-masalah krusial yang kerap secara konvensional terjadi seperti penyiaran agama kepada penganut agama lain, penodaan agama, perkawinan berbeda agama, pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, keberadaan dan kegiatan aliran atau sempalan keagamaan tertentu, kini wajib difahami tidak selalu dapat diposisikan tunggal tanpa dimensi tautannya dengan kualitas keadilan terutama dalam ekonomi. Ironisnya sebagai sebuah

Negara yang kerap dianggap dapat dikedepankan sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam membangun kerukunan antar umat beragama, Indonesia kerap dipandang telah melewati berbagai pengalaman yang cukup pelik dengan cap sukses. Padahal ini sungguh tidak merupakan masalah yang terjadi dan boleh ditata secara simplistis dengan hanya menggunakan segenap penilaian keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana dikonsepsikan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto dan yang hingga kini diperkuat sebagai pakem kuno.

Advokasi Umat.

Para pemikir “sewaan” pemerintah yang pada umumnya terdiri dari dua ufuk besar dalam peta besar keilmuan (agama dan sekuler) dalam forum yang semestinya tak dapat bertemu, telah selalu dengan berhasil disatukan oleh pemerintah untuk berbicara seragam mendiskreditkan agama dan para pemeluknya. Para ilmuwan agama kerap merasa sangat faham masalah dengan hanya berbicara pada tataran kultural. Begitu juga para ilmuwan sekuler akan sangat senang mendisign fakta-fakta miring untuk membungkam. Mereka dengan sengaja mengabaikan aspek struktural yang adalah kunci dari masalah.

Apalah arti dakwah bagi bangsa yang secara struktural sangat tak adil dengan indikasi kekuasaan dan ekonomi yang tak pernah memahami dimensi keumatan? Orang berteriak dengan perasaan sangat benar dan sangat herois ketika menunjuk-nunjuk HTI, FPI, terorisme dan ISIS. Padahal semua berawal dari penindasan struktural yang pantang dibahasakan dalam segala bentuk ungkapan.

Bagaimana memahami ketidak-serasian sosial dan bahkan gerakan protes damai maupun berbau kekerasan ketika tak dihubungkan dengan fakta 82,7 % kekayaan dunia dikendalikan leluasa oleh hanya 20 % penduduk istimewa karena akses, penguasaan dan dominasinya? Bagaimana memahami Indonesia maju jika revolusi mental yang didengungkan setiap saat tak pernah berbicara transaksi menindas antara buruh dan majikan, transaksi daerah dan pusat, dan transaksi negara dengan multinational corporations?

Indonesia menunjukkan persentase pertumbuhan miliarder terbesar dari 10 negara yang dicatat sepanjang 2013-2014 dengan angka 22,6 %. India mencatat 17,1 %, Nigeria 10 %, Amerika Serikat 9,5 %, Brazil 8,9 %, Turki 8,5 %, Cina 7,9 %, Meksiko 7 %, Inggris 6,6 % dan Rusia 4,8 %. Dengan kekayaan \$16.5 bilion

R.Budi & Michael Hartono adalah salah seorang terkaya dengan 9 lainnya, yakni keluarga Susilo Wonowidjojo (\$8,0 bilion), Eka Tjipta Widjaja (\$ 5,8 bilion), Sri Prakasih Lohia (\$4,4 bilion), Chairul Tanjung (\$4,3 bilion), Keluarga Boenjamin Setiawan (\$4,3 bilion), Keluarga Mochtar Riady (\$2,7 bilion), Peter Sondakh (\$2,3 bilion) dan Sukanto Tanoto (\$2,1 bilion) (Revrisond Baswir, 2015). Inilah bahasa pembangunan dunia, dan bahasa pembangunan nasional. Tanyalah relevansi revolusi mental untuk kasus kesenjangan ini.

Kemiskikan dan pengangguran di Indonesia membeberkan fakta bahwa TKI (Maret 2014) mencapai 6,5 juta. UMR rata-rata hanya Rp 1.595.000, Angkatan kerja berpendidikan setara pendidikan SD 47,9 juta, pengangguran terselubung 20,3 juta, pengangguran terbuka 7,2 juta, penduduk miskin USD 2/ hari (PPP) 43,3 juta dan penduduk miskin dengan penghasilan Rp 292.951/bulan 28,5 juta? Sudah begitu parah negara masih bercita-cita besar membawa tenaga asing (dari Cina) mengiringi janji investasinya berpuluh juta jiwa? Revolusi mental apa yang relevan untuk fakta-fakta ini?

Data tahun 2014 menunjukkan bahwa Belanja daerah DKI sebesar 72,0 Triliun, Jawa Barat 21,7 Triliun, Jawa Timur 16,9 Triliun, Jawa Tengah

13,9 Triliun, Kalimantan Timur 12,1 Triliun, NAD 10,2 Triliun, dan Sumatera Utara 8,4 Triliun. Di Sumatera Utara orang sudah muak berbicara pembagian keuangan pusat dan daerah dan banyak orang yang yakin hal ini hanya dapat dibahasakan dengan kekerasan. Relevansi revolusi mental apa yang dapat diveritakan untuk kesenjangan ini? Hanya dengan mengumbar cerita naif soal pemindahan ibukota?

Penutup.

Jika negara hanya akan menjadi alat bagi para penguasa modal, bukankah penindasan menjadi satu-satunya bahasa yang akan tetap dianggap keniscayaan oleh negara? Lalu negara apa yang tak berkepedulian kepada rakyat demi pertumbuhan yang melahirkan kesenjangan? Inilah yang selalu gagal difahami, dan sangat disesalkan bahwa para ahli agama dan kelembagaan tempat mereka bernaung selalu puas dengan peran-peran yang tak ubahnya seperti pemadam kebakaran belaka, dan anehnya mereka puas dengan itu. Barangkali mereka perlu diajak kembali ke pemahaman dasar bahwa agama tak berdimensi tunggal ritus. Mereka harus diajak kembali berbicara tentang kitab-kitab mereka yang berkekuatan ideasional dan semantik tentang keadilan dan

ruhnya yang harus diimplementasikan sebagai aturan dasar kehidupan.

Kesenjangan struktural dilembagakan melalui rangkaian sistem dan kebijakan yang bersendi ketidak-adilan. Karena terperangkap dalam rangkaian sistem kebijakan yang tidak adil ini, maka kelompok terluas dari masyarakat yang lemah akan terus-menerus kehilangan kemampuan dan akses untuk membebaskan diri dari perlakuan tidak adil dan kemiskinan. Jawabannya, tauhid struktural yang akan melahirkan kesalehan struktural dalam negara berkeadilan.

Bagian I

Islam dalam Pembangunan

**Orang Islam Sejati Adalah Yang Tetap Berdiri Pada Tempat
Yang Benar Meskipun Dunia Dalam Keadaan Kacau.**

-KH. Ahmad Dahlan-

Tata Ruang Kota dan (Kekalahan) Umat Islam¹

Pernahkah anda melihat tata ruang Kota Medan dari atas gedung pencakar langit? Jika pernah, berapa banyak menara-menara masjid yang bisa anda lihat dari atas gedung itu? Terlihat jelas atau samar-samarkah? Atau jangan-jangan sudah tidak terlihat sama sekali? Pertanyaan ini penting untuk kita ajukan di tengah arus pembangun yang tidak lagi melihat rumah ibadah –khususnya masjid – sebagai satu hal yang penting.

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidaklah sepenuhnya salah. Namun pembangunan juga harus memberikan tempat yang cukup pada budaya-agama (*religious-culture*). Sebab masjid sebagai simbol keagamaan dan tempat penyaluran (sosialisasi) nilai dan moral agama terhadap warga-masyarakat kini telah tergerus dengan pertumbuhan mall, plaza, pusat bisnis, dan perumahan yang kian pesat.

¹ Diterbitkan pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada 5 Mei 2015

Fakta ini yang kemudian membuat kita sulit menemui masjid di pusat Kota Medan. Jikapun ada kita harus masuk ke gang-gang dan lorong-lorong pemukiman warga. Beberapa di antaranya masjid bahkan harus berdampingan dengan plaza, mall dan hotel. Kita bisa lihat pada Masjid Agung Medan yang berdampingan dengan Sun Plaza. Masjid Raya Al Maksum Medan yang berdampingan dengan Yuki Simpang Raya dan Madani Hotel. Salahkah? Tentu tidak. Tetapi, adakah konsep tata ruang yang lebih baik yang “tidak memaksa” menar-menara masjid untuk berdampingan dengan gedung-gedung tinggi lainnya?

Mitos Mayoritas

Benarkah kaum muslim menjadi mayoritas penduduk di Kota Medan hari ini? Jika benar, mengapa kita sulit menemukan nuansa keislaman pada setiap bentuk tata ruang hari ini? Apa yang mempengaruhinya? Bukankah hampir setiap walikota terpilih adalah mereka yang memeluk agama islam? Saya mungkin terlalu banyak bertanya. Tetapi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membuktikan bahwa posisi agama yang dipeluk oleh mayoritas atau seorang pemimpin seperti walikota, bupati, gubernur dan presiden tidak serta-merta mempengaruhi sikap mereka untuk

membela dan melindungi kepentingan agamanya.

Kasus robohnya beberapa masjid di Kota Medan dengan dalih pembangunan menjadi bukti kuat bahwa kondisi sosial dan ekonomi satu umat beragama tidak berguna bila kekuatan ekonomi secara fundamental tidak dapat dikuasai. Tidak mengherankan jika penguasaan modal ekonomi menjadi begitu penting untuk mempertahankan eksistensi satu umat. Apalagi ditengah kehidupan yang cenderung pragmatis dan selalu menomer satukan materi. Moral keagamaan hilang, suap-menyuap menjadi satu hal yang biasa dalam proses pengambilan kebijakan. Di sinilah pemilik modal memainkan peran yang besar untuk mempengaruhi seorang pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan tata ruang kota yang sekarang cenderung tidak menunjukkan satu identitas budaya-agama (*religious-culture*) lokal.

Massifnya pembangunan kawasan ekonomi yang didesain serius oleh sekelompok pemodal kuat tidak hanya membawa dampak yang begitu besar bagi keberdaan masjid di tengah perkotaan, tetapi juga berdampak pada kawasan pemukiman warga yang berada di perkotaan. Arus perpindahan warga kota yang kebanyakan beragama Islam ke daerah pinggiran -

mendekati wilayah Deli Serdang –membuat kota ini diisi dan dikuasai oleh sekelompok pemodal yang entah dari mana asalnya kita tidak pernah tau. Hal ini bukanlah sepenuhnya salah dari kelompok pendatang yang memiliki modal kuat itu. Namun ada faktor lain yang mendukung usaha perubahan tata ruang kota menjadi lebih cepat dan “mengasingkan” umat islam di dalamnya.

Dua Faktor Dominan

Dua faktor pendukung yang sangat berpengaruh dan menyebabkan umat islam semakin terpinggirkan dari tata ruang kota adalah; melemahnya peran umat islam di bidang ekonomi dan melemahnya kekuatan politik islam. Padahal kedua aspek ini sangatlah vital dan tidak bisa ditinggalkan dalam satu perjuangan.

Kondisi ekonomi umat hari ini bisa digambarkan dengan banyaknya umat islam yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Mungkin hal ini wajar, sebab mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Namun, mengapa mayoritas penduduk itu tidak bisa menikmati kue pembangunan? Ini tentu bisa dijelaskan dengan asumsi 88 persen orang terkaya di Indonesia adalah mereka yang bukan

beragama Islam. Sehingga serpihan-serpihan kue pembangunan tidak dirasakan dengan maksimal oleh umat islam. Ketimpangan ekonomi antar umat beragama menjadi semakin jelas.

Ketimpangan tersebut membuat penduduk muslim hari ini harus terus tergerus kepinggiran kota sebab kepemilikan *capital* yang rendah dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin besar membuat banyak penduduk muslim menjual asset-asetnya (rumah dan tanah). Ironis ini bertambah pelik dengan kekuatan politik umat islam yang semakin melemah. Lemahnya kekuatan politik umat dapat dilihat dari kebijakan tata ruang kota yang tidak berpihak pada umat islam.

Meski para pemimpin pemerintahan hari ini adalah mereka yang memeluk agama islam tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan apapun. Sebab dalam proses pemilihan kepada daerah mereka telah banyak berhutang pada para pemilik modal yang hampir rata-rata bukanlah seorang muslim. Tidak salah jika hutang modal tersebut dibalas dengan pembangunan proyek-proyek skala besar yang menembus batas-batas tata ruang kota dan terus berkelanjutan. Di sinilah *religious-culture* Islam

hilang. Masjid dan umat islam menjadi korban dari keberingasan pembangunan.

Realitas Empiris Vs Realitas Normatif

Kondisi umat islam hari ini telah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Kuntowijoyo dalam bukunya *Paradigma Umat Islam; Interpretasi Untuk Aksi*. Dalam buku ini Kuntowijoyo menjelaskan tentang konsep realitas ganda yang sedang diderita oleh umat islam. Realitas pertama adalah realitas dunia (*empiris*) yang membentuk struktur objektif. Realitas ini dapat dijelaskan dengan terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, jenjang pendidikan, usia, dan jenis kelamin.

Pemisahan manusia ke dalam kelompok kelas atau golongan oleh realitas empiris ini dapat diimbangi oleh realitas kedua yaitu realitas normatif yang membentuk struktur subjektif dengan konsep keumatan. Konsep ini selanjutnya menimbulkan kesatuan yang bersifat normatif. Sebagai unit yang normatif umat merupakan konsep yang mempersatukan kepentingan-kepentingan individu dalam jama'ah, hal itu kemudian yang menimbulkan struktur yang bersifat subjektif. Namun, sebagai suatu kenyataan yang empiris, bagaimanapun juga umat terbagi dan terpecah-pecah dalam

pengelompokan golongan-golongan maupun kelas, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Kenyataan itulah yang membuat umat Islam amat sulit menyatu selain dari pada faktor kepentingan untuk beribadah kepada sang khalik (seperti solat jam'ah dan berhaji). Sisanya umat Islam lebih sering tidak peduli terhadap sesamanya, kurangnya perhatian kepada golongan *dhu'afa*, *mustadh'afin*, *fakir* dan *masakin* membuat jumlah mereka semakin banyak dan ironisnya mereka harus bertempur sendiri dalam pusaran pembangunan yang kapitalistik.

Penutup

Lepas dari itu, tentulah "umat" harus diberdayakan secara kualitas. Kegiatan-kegiatan *filantropi* seperti zakat, infak dan sedekah harusnya dapat dikelola dengan pendekatan *community development*. Ini menjadi satu hal yang penting, sebab dana *filantropi* yang berputar setiap harinya cukuplah besar. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua, terkhusus untuk mereka yang menjadi pengurus, penggiat dan penggerak di ormas-ormas Islam agar dapat membangun umat islam yang berdaya, berkemajuan dan sejahtera dengan semua potensi yang ada. (*)

Islam Yang (Tak) Berdaya²

Lebaran baru saja usai. Kumandang takbir tanda kemenangan baru saja dilantunkan. Namun tak jauh dari itu semua perasaan miris kembali hadir mendera umat islam di Indonesia khususnya di wilayah papua. Ya, tragedi pembakaran masjid pada saat solat idul fitri oleh sekelompok orang yang berlantardbelakang anggota FGDI di Tolikara Papua menjadi penyebabnya. Tragedi ini sungguh menggoyahkan perasaan umat islam yang pada saat itu sedang sibuk menyambung tali silaturramhi.

Kondisi ini seolah menjadi penanda bagi kondisi umat islam yang tampak semakin lemah dan tak berdaya dalam pergulatan sosial masyarakat di Indonesia. Karenanya persoalan ini harus dipandang serius, meski banyak pihak dan pengamat (yang pluralis) menyatakan kejadian ini bukan merupakan konflik antar agama tetapi lebih kepada kepentingan politik.

² Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,

24 Juli 2015

Menurut mereka, kejadian ini adalah bentuk provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun lepas dari hal tersebut, kita sebagai umat islam harus sadar bahwa posisi kita sebagai mayoritas umat di Indonesia sungguh bukan sesuatu yang dapat diandalkan sama sekali. Kondisi kita hari ini sudah terpecah dalam banyak skat-skat kepentingan dan ideologi yang merugikan persatuan umat islam. Kondisi ini setidaknya bisa dianalogikan sebagai buih di lautan, tampak banyak namun tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam menghadapi arus dasyat ombak laut.

Kita dipaksa untuk terus diam, bersabar dan menjaga semangat toleransi meski pada kenyataanya kita terus saja menjadi korban ketidaktoleransian umat lainnya. Contoh kasus untuk hal ini sudah sangat banyak, pelarangan menggunakan pengeras suara ketika azan, pelarangan menggunakan jilbab bagi karyawati di beberapa perusahaan, peniadaan jam istirahat untuk solat jum'at dan bahkan yang terakhir untuk contoh kasus di Kota Medan adalah perubahan masjid demi pembangunan perumahan, apartement, hotel dan lain sebagainya.

Mitos angka mayoritas yang digambarkan oleh Kuntowijoyo beberapa tahun silam semakin menjadi bukti kuat ketidakberdayaan umat islam. Ketidakberdayaan inilah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji oleh para alim ulam dan pemimpin-pemimpin umat islam di Indonesia hari ini. Kita telah tertinggal jauh dan gagal menguasai pondasi-pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Pondasi-pondasi tersebut adalah pondasi sosial, pondasi ekonomi dan pondasi politik. Kegagalan kita menguasai ketiga pondasi ini membuat kita semakin terasingkan dan terpinggirkan dalam hubungan interaksi kehidupan sosial, politik dan ekonomi bangsa.

Pondasi Sosial

Satu dari beberapa element dasar dari pondasi sosial yang dimaksud di sini adalah media masa. Secara kuantitas kita tidak memiliki banyak media masa yang berideologikan islam yang dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat. Sedangkan secara kualitas, media masa islam juga belum ada yang mampu menjadi media masa yang *mainstream* (arus utama) bagi masyarakat. Perhatikanlah rata-rata media masa yang mendapatkan minat pembaca paling banyak di masyarakat adalah media masa yang berideologikan liberalis,

sekuleris, atau pluralis. Kita sendiri sebagai umat islam bahkan terkadang enggan untuk membaca media masa yang berideologikan islam.

Tak heran jika kondisi inilah yang kemudian membuat kita gagal menguasai dan membangun opini publik yang menguntungkan bagi kita. Dampak yang dapat dirasakan kemudian adalah kegagalan dalam pembangunan wacana masyarakat. Inilah yang kemudian membuat umat islam selalu berada dalam persepsi yang negative. Perhatikan saja, jika tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berlatang belakang islam selalu saja dikaitkan dengan gerakan terorisme, radikalisme dan fundamentalisme.

Ironisnya, setiap kali kejadian ini berlangsung, pemerintah selalu bersikap beringas dengan menggunakan Desnus 88 anti teror sebagai alat pengamanan. Namun jika hal itu dilakukan oleh umat agama yang lain, Densus sama sekali tidak bergerak, lantas pertanyaan adalah, apakah desus hanya diciptakan untuk mengatasi terorisme yang berasal dari islam semata? Ini adalah menjadi satu pertanyaan yang pantas untuk diajukan dalam tragedi ini.

Persoalan bertambah pelik, ketika banyak pengamat yang dimunculkan oleh media masa adalah mereka yang bersudut pandang liberal, sekuler, dan plural. Dampaknya adalah kita selalu saja dipaksa untuk menjadi orang yang bersikap sabar, menghargai perbedaan masyarakat yang multikultural dan menjunjung tinggi semangat toleransi.

Wacana itulah yang sengaja dibangun untuk dijadikan opini publik. Pada titik ini kita dapat melihat bahwa di dalam tubuh islam sendiri sudah terjadi perpecahan pandangan yang signifikan yang pada akhirnya secara tidak langsung memunculkan tokoh-tokoh islam yang berkhianat pada kepentingan umat islam itu sendiri. Rentetan ini semua membuat masyarakat islam pada level *grassroots* menjadi terpecah-pecah dan arus perjuangan umat tak lagi utuh dan menyatu. Kondisi inilah yang sedang kita alami saat ini.

Pondasi Ekonomi

Selain pondasi sosial yang tidak dapat dikuasai, pada pondasi ekonomi juga umat islam masih dapat dikatakan jauh dari tingkat kesejahteraan yang layak. Perhatikan saja wajah-wajah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ada dipinggir jalan. Mereka selalu saja

menggunakan simbol-simbol keislaman meski sepenuhnya belum tentu dari mereka adalah pemeluk agama islam. Contoh lain yang bisa dilihat dari lemahnya ekonomi umat islam hari ini adalah pada saat pembagian zakat yang selalu memakan korban. Antrian panjang, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Terlihat bagaimana realitas kemiskinan masih berada di sekitar kita.

Kemiskinan tersebut yang kemudian menjadikan umat islam sangat mudah digoyahkan. Tak jarang, demi uang dan sebungkus sembako terkadang kita rela untuk melakukan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu sebabnya mengapa rosul mengatakan kemiskinan sangat dekat dengan ke kafiran. Sekarang ini, Indonesia bahkan sedang mengalami darurat pemurtadan. FUI melalui data yang dikeluarkan Mabes Polri mengatakan orang yang murtad di Indonesia saat ini sebanyak 2,7 juta orang per tahun. Jumlah itu tidaklah sedikit dan angkanya dari tahun ke tahun terus saja mengalami peningkatan yang signifikan.

Pondasi Politik

Kelemahan kita pada pondasi ekonomi berujung pada lemahnya pondasi politik kita

hari ini. Demokrasi di Indonesia yang memakan biaya mahal selalu membuat para pejabat di ranah eksekutif dan legislative harus berhutang pada pengusaha yang rata-rata bukan seorang muslim. Hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi biaya kampanye politik. Tak pelak, hasil yang bisa dilihat adalah kebijakan yang mereka ambil selalu saja merugikan kepentingan umat islam, sebab mereka sudah tersandra oleh politik balas budi.

Ironisnya pondasi politik umat islam pada lever *grassroots* juga sering terpecah belah. Politik uang yang dimainkan kepada pemilih-pemilih islam yang rata berada di bawah garis kemiskinan membuat pemilih islam kehilangan rasa rasionalitas ke-imaan dalam memilih partai politik, calon-calon wakil rakyat dan calon pejabat pemerintahan.

Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada makin rendahnya pemilih partai-partai berazaskan islam. Lihatlah, rata-rata partai yang berazaskan islam setiap pemilu selalu mengalami penurunan jumlah suara yang relatif besar. Penurunan jumlah suara ini kemudian diantisipasi dengan strategi mengubah asaz partai menjadi partai yang nasionalis dan atau pluralis sehingga mereka dapat menarik suara di luar basis islam. Caranya adalah dengan

memberikan ruang kepada caleg-caleg yang non-muslim untuk dapat mendaftar menjadi pengurus partai dan perwakilan partai di legislative.

Penutup

Lemahnya kita (umat islam) pada tiga pondasi tersebut membuat kita selalu saja kalah dan dirugikan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat baik dari sosial, politik dan ekonomi. Kini yang terpenting yang harus kita lakukan adalah membangun gerakan islam secara strukturalis dengan memperkokoh kembali posisi kita pada tiga pondasi tersebut. Gerakan secara strukturalis ini sebenarnya sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh H.O.S Tjokroaminoto dan K.H Ahmad Dahlan. Hanya saja, gerakan tersebut harus diperbaharui sesuai dengan konteks kekinian. (*)

Membangun Gerakan Islam Yang Strukturalis³

Kondisi umat islam yang semakin tidak berdaya dalam kehidupan berbangsa hari ini harus segera diatasi dengan membangun gerakan islam yang terstruktur dengan fokus utamanya adalah melakukan pemberdayaan kepada umat baik dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Gerakan pemberdayaan dengan jalan strukturalis seperti yang telah dilakukan oleh Samahudin, Tjokroaminoto, dan KH Ahmad Dahlan ratusan tahun silam harusnya dapat dirumuskan kembali oleh para pemikir, tokoh dan pemimpin-pemimpin umat islam hari ini.

Kita sebenarnya tidak perlu lagi berdebat pada persoalan islam nusantara atau islam berkemajuan. Tetapi yang terpenting kini, bagaimana membangun umat islam yang berdaya baik secara ekonomi, sosial dan politik dengan formulasi-formulasi yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat. Sebab, pembangunan yang berdimensi

³ Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,

07 Agustus 2015

kapitalistik saat ini, cenderung menempatkan umat islam pada posisi yang kalah.

Fakta ini bisa kita lihat pada bidang ekonomi misalnya, sebagai umat yang mayoritas kita justru tidak dapat menikmati kue pembangunan dengan maksimal. Hal ini bisa dijelaskan dengan asumsi 88 persen orang terkaya di Indonesia adalah mereka yang non-muslim. Efek yang dapat dilihat adalah banyaknya umat islam yang berada di bawah lingkaran kemiskinan dan ini membuat kesenjangan antar umat beragama semakin terasa.

Padahal secara finansial, umat islam mempunyai modal yang besar yang dapat dikelola dari dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Jika dana ini dikelola dengan baik dan akuntabel, sesuai dengan kebutuhan umat (baik dalam jangka pendek atau jangka panjang), maka yakin dan percayalah islam yang berdaya akan muncul dan dapat bersaing dengan umat-umat yang lainnya.

Memanfaatkan Sumber Sosial-Ekonomi

Secara substantif, agama islam telah mengajarkan banyak hal tentang bagaimana konsep untuk pembedayaan umat khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah bagian dari konsep

tersebut. Namun sayangnya, sampai saat ini, potensi yang dihasilkan dari ZIS belum dapat terkelola dan tersalurkan dengan tepat. Padahal Jumlah dana yang berhasil dikumpulkan masyarakat umum di Indonesia dari ZIS dalam setahun mencapai Rp 19,3 triliun. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2005 lalu.

Selain itu, hasil survei CSRS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengungkapkan besarnya jumlah aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp 590 triliun dan aset-aset wakaf tersebut menurut CSRS sebagian besar diperuntukkan membangun kompleks pemakaman dan masjid-masjid mewah yang terkadang berada di antara permukiman kumuh. Namun sayang, dana yang berhasil dikumpul tersebut belum juga mampu mengatasi persoalan kemiskinan umat islam di Indonesia sampai saat ini.

Jika saja, dana infak dan sedekah atau asset wakaf yang ada di Indonesia diperuntukkan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih produktif tentunya dana yang ada tersebut akan terus berkembang dan dapat memajukan serta memberdayakan umat islam. Mengapa kita

tidak mencipta grosir atau minimarket seperti indomaret atau alfamart yang berbasis islam atau dikelola oleh badan-badan usaha islam?

Setidaknya dengan adanya badan-badan usaha tersebut kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda/i muslim yang lebih banyak lagi. Keuntungan dari penjualan tersebut juga bisa mendanai kepentingan-kepentingan agama seperti pembangunan masjid, membiayai panti asuhan dan lain sebagainya. Selama ini kita hanya dijadikan pasar konsemen yang empuk bagi para pemodal-pemodal yang bukan seorang muslim. Dampaknya, uang kita banyak tersedot tanpa ada implikasi bagi perkembangan agama.

Selain itu, secara makro ekonomi, kita juga belum memiliki bank yang memang benar-benar berpihak kepada umat islam. Sejauh ini, bank-bank kita hanya berbasis syariah saja. Tetapi semangatnya belum tentu dapat mengcover kepentingan-kepentingan umat, khususnya bagi mereka -muslim -yang berprofesi sebagai pengusaha atau pelaku-pelaku UMKM.

Ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi kita, khususnya bagi dua ormas besar islam di Indonesia yang sedang

melaksanakan muktamar pada bulan Agustus ini. Harusnya, untuk menjawab tatangan umat hari ini, kita sudah bisa mendirikan Bank Muhammadiyah atau Bank N.U atau setidaknya pada level yang lebih mikro kita bisa menciptakan Muhammadiyah-mart atau N.U-mart.

Pembentukan bank atau mini-market tersebut tentu menggunakan pertimbangan yang jelas. Secara institusional N.U dan Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai sumber sosial umat yang memiliki jumlah anggota dan dan asset (amal usaha/badan usaha) yang sangat besar. Besarnya jumlah anggota secara kuantitas dapat dijadikan konsumen utama bagi bank atau mini-market yang ada. Apalagi ditambah dengan amal usaha seperti; sekolah, kampus, rumah sakit dan panti-panti asuhan yang secara langsung atau tidak dapat juga dijadikan mitra untuk pengembangan usaha ini.

Dengan terbentuknya koalisi dagang seperti ini, maka umat islam akan jauh lebih kuat dan lebih berdaya. Sebab, bagaimanapun juga, sejarah mencatat selain faktor politik, faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan untuk menentukan keberhasilan gerakan dakwah dan islamisasi di Indonesia.

Membagi Kemiskinan

Tidak bisa dipungkiri bahwa politik dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda tetapi saling mempengaruhi. Kemiskinan umat islam hari ini tidak hanya dapat dijelaskan dengan tingkat pendapatan rata-rata individu muslim saja, tetapi juga bisa dijelaskan dengan tingkat pendidikan politik individu tersebut. Prof. Jawahir Thontowi –dari FH UII Yogyakarta – mengistilahkan ini dengan membagi kemiskinan. Menurutnya persoalan kemiskinan yang dihadapi umat islam hari ini berpengaruh pada kesadaran berpolitik. Praktek *money politics* yang selama ini dilakukan oleh parpol membuat masyarakat tidak hanya miskin secara uang tetapi juga miskin pengetahuan dalam konteks kesadaran politik.

Uang selalu menjadi tujuan utama tanpa pernah memahami realitas politik yang ada dibalikinya. Transaksi politik ini bahkan sering terjadi di tempat-tempat pengajian atau perwiritan. Pendidikan politik –yang *berakhlaqul karimah* – menjadi hilang. Ironisnya, calon-calon dari parpol islam juga tidak bisa menolak godaan melakukan praktek-praktek *money politics* ini di setiap *event* pemilu atau pilkada.

Begitupun, parpol-parpol islam tidak juga mampu menarik minat yang banyak dari masyarakat. Bahkan secara politis parpol islam cenderung hanya menjadi pelengkap saja. Tidak ada keberanian untuk membangun koalisi bersama dalam mendukung satu calon presiden atau kepala daerah. Pasca berlakunya pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung tak satupun koalisi partai islam terbentuk untuk mendukung satu calon presiden. Padahal, jumlah suara yang dimiliki sudah sangat mendukung untuk itu.

Pada akhirnya, untuk kasus penguatan politik ini kita hanya bisa berharap kepada petinggi-petinggi parpol untuk dapat duduk bersama dan melepaskan *egoism* serta kepentingan kelompoknya masing-masing untuk dapat menyatukan visi dan misi bersama membangun kekuatan politik islam yang baru di Indonesia. Gerakan politik secara *structural* harus dibangun di atas semangat *ukhuwah islamiyah* yang kuat. Jangan sampai, parpol islam dan wakil-wakilnya yang ada di legislative dan eksekutif tidak mampu menahan arus gelombang pembangunan yang kini tampak semakin *liberal* dan *sekuler* dengan menjauhkan semangat dan nilai-nilai keagamaan di dalamnya.

Penutup

Setidaknya hasil muktamar di Jombang dan Makasar harus dapat mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasi persoalan keumatan saat ini. Usaha pemberdayaan umat harus dilakukan sedini mungkin dengan menyatukan gerakan dan tindakan yang sama mulai dari lapisan bawah hingga lapisan elit.

Ceramah-ceramah agama harus mulai diarahkan untuk dapat menjawab persoalan individu muslim, baik secara spiritual dan atau sosial-ekonomi-politik. Implementasi ini penting untuk dipertimbangkan, sebab jika tidak, umat akan terus mengalami kemunduran dan angka permurtadan akibat kemiskinan juga akan terus meningkat. Relakah kita? (*)

Posisi Umat Islam

Pasca Pilkada⁴

Sehari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara di Pilkada serentak, banyak ulama. Kiai dan ustad yang sibuk untuk menghimbau umat islam agar menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain tidak melakukan aksi golput. Kondisi dapat dilihat secara massif khususnya pada daerah-daerah yang memiliki pasangan calon muslim dan non-muslim yang bersaing dengan pasangan calon muslim-muslim.

Isu yang dibangun untuk itu sangatlah mendasar yaitu soal keyakinan dan aqidah. Al-qur'an surat Ali Imran ayat 28 tentang dasar memilih pemimpin, selalu dijadikan dasar pemikiran untuk mendukung dan membangun konstruksi wacana yang dimainkan tokoh agama. Salahkah? tentu saja tidak, sebab itu adalah bagian dari gerakan *dahwa amal makruf* yaitu mengajak umat dalam kegiatan kebaikan.

⁴ Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,

16 Desember 2015

Namun pertanyaannya apakah pemimpin yang dipilih umat islam itu yang background agamanya islam sudah mampu memperjuangkan kepentingan umat islam? Inilah substansi penting yang perlu dijawab oleh setiap kepala daerah (khususnya incumbent) yang beragama islam dan didukung oleh mayoritas umat islam.

Sebab dalam beberapa kasus, banyak kepala daerah yang pada masa kampanye membutuhkan dukungan umat islam dengan cara mengunjungi setiap kelompok pengajian, ormas-ormas islam dan masjid-masjid. Namun setelah berhasil menang, kepentingan untuk pengembangan umat islam khususnya pada kelompok-kelompok pengajian, ormas-ormas islam dan masjid-masjid sama sekali tidak dilaksanakan.

Tentunya, perilaku kepala daerah yang ketika menang mengesampingkan kepentingan umat islam ini dipengaruhi oleh faktor hutang ekonomi kepala daerah kepada pengusaha dan pihak seponsor yang rata-rata berlatar belakang agama non-muslim. Ironisnya hutang ekonomi tersebut berdampak pada arah -kebijakan - politik pembangunan yang tidak memberikan tempat secara representative terhadap

kepentingan umat islam khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Tata Ruang

Satu di antara beberapa aplikasi perencanaan pembangunan adalah tata ruang. Bentuk tata ruang setidaknya harus dapat menggambarkan nuansa keagamaan dan kebudayaan lokal yang dalam kasus ini kita sebut dengan istilah *relegius culture local* (budaya agama lokal). *Relegius culture local* dapat dicontohkan dengan model identitas keagamaan yang dekat dengan satu kelompok budaya lokal, misalnya budaya betawi yang dekat dengan nilai-nilai keislaman. Begitu juga dengan budaya melayu yang sangat identik dengan nilai keislaman.

Masih banyak contoh-contoh budaya lain yang bisa kita ambil dari model *relegius culture local* ini. Namun, setidaknya dua budaya tersebut dapat mewakili banyak *relegius culture local* dari budaya-budaya lainnya di Indonesia. Apalagi pengambilan sampel dua budaya agama lokal ini terkait dengan kota yang menjadi basis pemukimannya. Hal ini dikarenakan kedua kota tempat bermukimnya dua suku tersebut –yaitu Jakarta dan Medan –sedang mengalami perkembangan pembangunan yang luar biasa. Sayangnya, pembangunan yang melanda kedua

kota tersebut tidak pernah menyediakan tempat bagi *religius local culter* secara representative.

Contoh sederhana dari bentuk tidak tersedianya tempat secara representative bagi *relegius culture local* adalah ketersediaan tempat beribadah atau musola bagi umat islam di pusat-pusat perbelanjaan. Meski di beberapa plaza sudah disediakan musola untuk pelaksanaan solat lima waktu bagi karyawan dan konsumen tetapi jika dilihat masih banyak musola yang sama sekali tidak representative untuk pelaksanaan ibadah solat tersebut.

Tidak percaya? Silahkan cek saja di beberapa plaza di Kota Medan. Hampir rata-rata musola berada di lokasi parkir. Aksesnya juga sangat jauh dengan menempatkan dilantai-lantai paling atas atau basement (lantai bawah). Tidak jarang kita juga bisa merasakan bau yang tidak sedap dari hambal musola, dan belum lagi mukenah yang tampak tidak terurus. Layakkah ini? Anda sendiri yang bisa menjawabnya.

Namun sesungguhnya fakta ini tidak hanya terjadi di plaza-plaza saja, tetapi juga terjadi di pusat-pusat pasar, hotel, perkantoran atau instansi -pemerintah atau swasta -dan lokasi-lokasi publik lainnya. Padahal di dalam lokasi atau ruang-ruang tersebut terdapat banyak

individu muslim yang sedang bekerja atau bahkan sedang menjadi pengunjung dan pembeli. Sekali lagi, kita patut bertanya layakkah kondisi seperti ini kita dapatkan di tengah kebutuhan ibadah solat kita yang sehari-hari dilaksanakan lima waktu?

Pada skala makro, posisi tata ruang umat islam dalam pembangunan harus dapat diperjelas. Apalagi di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah muslim. *Landscape* kota islam dengan budaya lokal sebagai identitasnya harus segera diwujudkan. Di Kota Medan, *landscape* kota islam bisa diwujudkan dari penguatan kembali dan menghidupkan suasana keislaman dari lokasi Masjid Raya Al-Mahsun, Taman Sri Deli dan Istana Maimun. Di mana sepanjang lokasi jalan tersebut harus dapat menunjukkan suasana ke-islaman dengan penguatan identitas Kesultanan Deli. Sungguh kita perlu untuk melakukan ini, apalagi satu sejarah panjang perkembangan islam di Kota Medan ada di tempat tersebut.

Selain itu, kebijakan untuk menerapkan ornament-ornamen melayu pada kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan juga patut untuk dipertimbangkan. Hal ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Bachtiar Djafar dan kebijakan tersebut dapat membentuk identitas

Kota Medan sebagai kota islam dengan identitas lokal melayu. Kebijakan ini sesungguhnya tidak sulit untuk dilakukan sebab ke depan Kota Medan akan dipimpin seorang walikota muslim berdarah melayu (baca; Drs. H.T Dzulmi Eldin, M.Si). Plus Plt Gubernur Sumut yang juga seorang muslim-melayau yaitu Ir. T. Ery Nuradi, M.Si.

Peran Penting

Persoalan tata ruang yang tidak tersedia bagi kepentingan *relegius culture local* (baca; umat islam) sesungguhnya tidak hanya terjadi di Kota Medan. Kasus-kasus seperti ini dapat kita temui di beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya sebenarnya juga mengalami hal yang sama.

Mitos mayoritas yang digambarkan oleh (alm) Kontowijoyo beberapa dekade silam memang masih sangat dirasakan. Kemiskinan yang mendera umat islam berkolerasi positif dengan kelamahan umat dalam bidang politik dan ekonomi. Implikasi yang dirasakan adalah *bargaining position* umat islam menjadi begitu lemah dalam pembangunan yang tampak diabaikan dan dipinggirkan.

Pada titik inilah sesungguhnya umat islam sangat membutuhkan peranan penting dari pemimpin umat (baca; ulama, kiyai, dan ustad). Jangan hanya meminta umat untuk tidak golput –dengan ancaman haram –dan menganjurkan umat memilih pemimpin yang muslim, tetapi mereka (ulama, kiyai dan ustad) juga harus bisa mengawal pemimpin yang terpilih agar dapat lebih pro terhadap kepentingan umat islam khususnya dalam persoalan tata ruang. Jangan sampai kasus rubuhnya masjid demi pembangunan yang berorientasi kapitalistik kembali terjadi.

Penutup

Angka partisipasi politik yang rendah sesungguhnya menjadi petanda bahwa umat telah merasa jemu dan apatis dengan kondisi sosial-politik yang ada di Kota Medan. Isu pasangan pemimpin pelangi dan muslim-muslim tidak lagi menjadi satu hal yang mempengaruhi partisipasi politik. Apalagi ancaman haram dari fatwa majelis ulama.

Yang terpenting bagi umat kini adalah pemimpin yang mampu mensejahterakan kehidupan mereka dan menjaga rasa ketauhidan mereka dengan tetap dapat menjalankan ibadah amal makruf nahi mungkar

dan tidak melakukan perilaku curang seperti mencuri, menipu, korupsi hanya untuk kepentingan sengkak perut yang kelaparan.

Bukankah kemiskinan itu dekat dengan kekafiran? Dan bukankah kemiskinan itu diproduksi atas keterbatasan akses umat islam terhadap struktur ruang pembangunan yang berkeadilan? *Nah*, dua pertanyaan inilah yang tidak pernah dijawab secara riil dalam visi-misi calon kepala daerah yang berlatar belakang muslim. (*)

CCTV

di Masjid Kita⁵ ...

Apa yang anda pikirkan ketika membaca judul di atas? Atau menurut anda, apakah keberadaan CCTV di setiap masjid kita hari ini dapat dikategorikan sebagai hal yang wajar? Pertanyaan ini penting untuk kita jawab, sebab belakangan hari, kita sering melihat beberapa masjid yang sudah memasang CCTV di setiap sudut bangunannya.

Apakah hal tersebut salah atau melanggar aturan keagamaan? Tentu saja tidak, sebab hal ini tidak masuk dalam perdebatan benar atau salah. Namun, hal ini menjadi satu fenomena yang menarik untuk dibahas –khususnya dalam prespektif ilmu sosial –karena *trend* penggunaan CCTV yang semakin meningkat, tidak hanya untuk dunia usaha atau perkantoran tetapi juga untuk rumah ibadah.

⁵ Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,

07 Oktober 2015

Kehadiran CCTV

Arus perkembangan teknologi memang tidak bisa dibendung sejak revolusi industri terjadi beberapa dekade silam di Eropa. Ribuan jenis barang teknologi kini telah dikonsumsi oleh manusia dan digunakan untuk berbagai macam keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini CCTV (*Closed-Circuit-Television*).

Kehadiran CCTV tentunya memberikan banyak manfaat, diantaranya adalah; hasil rekamannya dapat menjadi bukti tindakan kejahatan atau kriminal. Mengawasi situasi lalu lintas, halte bus dan atau terminal. Mengawasi kinerja karyawan dan terakhir dapat mencegah aksi kejahatan. Point terakhir ini sebenarnya menjadi point penting kehadiran CCTV di tengah masyarakat, khususnya bagi meraka yang berada wilayah di perkotaan.

Aksi kejahatan seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya sering terjadi di wilayah ini (baca; kota). Itu sebabnya banyak orang yang tinggal di wilayah perkotaan sengaja memasang alat ini untuk dapat memproteksi diri dari tindakan kejahatan. Apalagi banyak mereka yang percaya bahwa CCTV dapat mengerem aksi kejahatan. Alasannya

senderhana, dengan adanya CCTV banyak pelaku kejahatan akan berpikir ulang untuk melakukan aksinya. Namun benarkah? Saya juga tidak tahu pasti, sebab mereka (para penjahat) mempunyai logika tersendiri ketika melakukan aksi kejahatannya. Apalagi jika menyangkut kebutuhan hidup, semua pasti tidak terpikirkan lagi.

Nah, jika ini menjadi satu keniscayaan, maka kita dapat berasumsi bahwa; semakin banyak CCTV beredar, atau terpasang di satu wilayah, maka wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai wilayah yang tidak aman atau memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi (termasuk di dalamnya pelanggaran lalu lintas). Asumsi ini boleh benar adanya, apalagi dengan fakta hasil rekaman CCTV dapat membantu proses pencarian pelaku kejahatan. Begitupun, untuk membuktikan asumsi tersebut –secara ilmiah – kita masih harus melakukan penelitian yang mendalam.

Realitas Aksi Kejahatan

Jika kehadiran CCTV sering dikaitkan dengan aksi kejahatan seperti perampokan, dan pencurian, maka kita juga berkewajiban untuk mengaitkan kedua hal ini dengan sumber pendorong awalnya yaitu kemiskinan. Dalam

banyak kajian, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tindak kejahatan. Fukuyama dalam bukunya *Goncangan Besar; Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, memasukkan kemiskinan sebagai salah penyumbang terjadinya guncangan sosial di tengah masyarakat.

Tidak hanya Fukuyama, George Mayer tahun 1835-1861 di Bremen, Jerman, yang melakukan analisis statistic menyatakan terdapat korelasi antara kenaikan tingkat kejahatan dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Dari hasil analisisnya terdapat kesimpulan bahwa; tingkat kejahatan berhubungan erat dengan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi. Makin tinggi tingkat kesenjangan sosial-ekonomi, maka makin tinggi pula tingkat kejahatannya.

Begitupun, kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap semua orang miskin sebab tidak semua orang miskin adalah orang yang melakukan tindak kejahatan. Hanya saja, kondisi kemiskinan sering menjadi faktor pendorong bagi setiap individu untuk melakukan aksi kejahatan. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selain faktor kemiskinan, pengaruh narkoba juga sangat erat memicu tindak kejahatan. Efek ketergantungan yang dihasilkan dari narkoba

membuat individu penikmatnya rela melakukan apapun –seperti perampokan dan pencurian – demi mendapatkan barang haram tersebut.

Dari hal ini tampak bahwa kemiskinan dan narkoba menjadi rekalitas aksi kejahatan yang menyebabkan pertumbuhan CCTV meningkat tajam wilayah perkotaan, khususnya di perkantoran dan bahkan di rumah-rumah peribadahan seperti masjid.

Hilangnya Rasionalitas

Aksi kejahatan memang tidak pernah mengedepankan rasionalitas. Itu sebabnya, banyak pelaku kejahatan yang melakukan aksinya di manapun. Rumusannya sederhana; di mana ada kesempatan, di situ aksi kejahatan akan dilaksanakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan aksi tersebut dilakukan di rumah ibadah yang *notabene* sering dianggap sebagai rumah tuhan. Di sini, tuhan-pun sudah *dialfakan*. Bagi mereka, mungkin saja, tuhan dimasukkan dalam katagori “maha pemaklum” yang akan sangat paham dengan kondisi umatnya yang sedang mengalami kesusahan.

Itu sebabnya kita sering menemukan kejadian pencurian di masjid-masjid. Mulai dari sepeda motor, kotak infak, tas jama’ah hingga sepatu-

sandal. Aksi ini berlangsung singkat, baik ketika ibadah sedang dilaksanakan atau ketika ibadah baru usai. Dari aksi-aksi kejahatan inilah kita harusnya sadar bahwa telah terjadi ketimpangan yang nyata di dalam satu umat beragama. Ironisnya, aksi yang disebabkan ketimpangan - sosial-ekonomi -itu malah terekam dengan jelas di dalam CCTV yang memang sengaja kita pajang disetiap sudut yang dianggap menjadi tempat aksi kejahatan.

Padahal jika ditelusuri lebih mendalam, secara substantif kita sebagai umat beragama memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat mengentaskan persoalan kemiskinan yang sedang diderita oleh saudara kita sesama muslim. Lucunya kita tidak pernah sadar dengan hal ini. Kita malah lebih sering disibukkan dengan proyek renovasi masjid yang memakan biaya ratusan juta rupiah. Padahal tidak jauh dari lokasi masjid tersebut kita akan menemukan sekeluarga fakir-miskin yang masih memerlukan bantuan hidup.

Anda bayangkan saja, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian dan pemasangan CCTV di setiap bangunan masjid? Anggaran itu belum termasuk biaya perawatan yang meski dilakukan setidaknya setahun sekali. Andai saja, biaya itu diperuntukkan bagi mereka orang-

orang fakir dan miskin tentu akan terasa jauh lebih bermanfaat dan kita secara tidak langsung sudah dapat membantu mengatasi persoalan kebutuhan hidup mereka tanpa mereka harus meminta-minta dijalan, mencuri dan lain sebagainya.

Penutup

CCTV memang menjadi satu fenomena “baru” di tengah kehidupan masyarakat modern di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Namun, kehadiran CCTV di rumah ibadah seperti masjid harusnya bisa dilihat sebagai suatu hal yang mengawatirkan. Sebab lazimnya, di rumah-rumah ibadah individu-individu harusnya tidak lagi melakukan aksi kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Meski pada kenyataan fakta malah menunjukkan hal yang berlawanan.

Oleh karenanya wajar jika para pelaku kejahatan di dalam rumah-rumah ibadah seperti masjid kehilangan rasionalitasnya dan meng*alfakan* tuhan ketika melakukan aksi kejahatan, sebab orang-orang yang sedang melakukan kegiatan ibadah-pun sudah kehilangan rasionalitas keimanannya. Setidaknya hal ini menjadi bukti bahwa kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang

mendustakan agama. Bukankah Surat Al-Maun dengan jelas telah menyatakan itu? (*)

Polusi Suara; Suara Kaset Ngaji atau Buyi Petasan?⁶

Euforia ramadhan sudah mulai terasa. Aktifitas masyarakat muslim di masjid-masjid mulai mengalami peningkatan yang signifikan, dari mulai fajar hingga malam hari. Kegiatan keagamaan seperti mengaji atau tadarusan, mendengarkan ceramah agama dan solat berjama'ah merupakan rangkaian kegiatan harian yang secara rutin dilaksanakan di masjid-masjid selama bulan ramadhan.

Di tengah geliat aktifitas yang akan segera berlangsung itu, tiba-tiba kita digegerkan dengan pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla yang merasa terganggu dengan suara kaset masjid yang ada di kampungnya. Menurut Kalla seperti yang diberitakan di beberapa media cetak, pengajian sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan kaset rekaman tetapi

⁶ Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,
26 Juni 2015

langsung dibacakan oleh seseorang, itupun durasi pembacaannya harus merujuk pada waktu yang tepat. Tidak terlalu lama dan pada waktu yang semestinya.

Meski ini bukan pernyataan pertama Jusuf Kalla terkait suara kaset ngaji di masjid, tetapi pernyataan Kalla ini langsung menimbulkan *pro-kontra* di masyarakat. Bagi yang mendukung (*pro*) alasan Jusuf Kalla ini dianggap masuk akal, sebab intensitas suara mengaji yang diputar terlalu lama di masjid -khususnya pada waktu subuh -dianggap dapat mengganggu istirahat seseorang. Namun bagi yang menolak (*kontra*), pernyataan Kalla ini dianggap sebagai bentuk pembatasan dakwah. Apalagi selama ini suara ngaji -melalui kaset -di masjid selalu dijadikan pengingat bagi masyarakat akan dekatnya waktu untuk solat. Sehingga dapat bersiap-siap dan bersegera ke masjid.

Anomali

Jusuf Kalla boleh saja mengatakan jika suara ngaji di masjid lebih baik dilantukan oleh seseorang dari pada kaset. Tetapi apakah Jusuf Kalla pernah berpikir jika tidak semua masjid di Indonesia mempunyai sumber daya qori yang memadai? Adakah kebijakan pemerintah yang -dipimpinannya -lebih berpihak pada usaha

pemberdayaan umat hari ini? Khususnya dalam bidang pendidikan al-qur'an. Jika belum, harusnya pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut dari pada mengomentari perilaku "marbot" dan pengurus masjid yang selalu memutar kaset ngaji yang diisi suara-suara qori-qori asal timur tengah.

Kita sudah kalah jauh dibandingkan negara-negara timur tengah yang dominan berpenduduk muslim. Pendidikan untuk hafis-hafis dan qori-qori al-qur'an di sini lebih banyak digerakan oleh partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Itupun jumlah tidak terlalu banyak. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa masjid-masjid kita secara keseluruhan belum siap untuk menerapkan model ngaji yang dilakukan langsung oleh qori, sebab sumber daya yang ada sangat terbatas. Apalagi untuk melakukan hal tersebut perlu biaya tambahan yang tak sedikit jumlahnya.

Selain itu, kondisi pengembangan keumatan juga harus dilihat secara jelas. Generasi islam hari ini sudah sangat jauh dari semangat keislaman. Efek modernisasi telah membudaya dalam diri generasi muda islam. Perilaku konsumtif dan hedonis kini telah menjadi satu ciri tersendiri. Anak-anak muda hari ini jauh kehidupan masjid, perhatikan saja, siapa

sekarang lebih banyak mengisi saf-saf di masjid-masjid, kaum mudakah atau kaum tua? Persoalan lainnya adalah, gerakan mengaji di masjid untuk anak-anak juga sudah mulai hampir punah. Kita tidak melihat lagi ada satu pengajian iqrok atau al-qur'an di masjid-masjid setiap habis solat magrib.

Kini, anak-anak kita, generasi muda islam telah disibukkan dengan siaran-siaran televisi, game-game di warnet dan *gadget* serta media sosial. *Update* status dan koment atas status teman menjadi satu kebiasaan yang kini mendarah daging. Secara sederhana, fenomena ini bisa dilihat dari perilaku keseharian anak-anak muda kita. Perhatikan saja, sekarang hampir tidak ada lagi yang berdoa sebelum makan. Ritual doa kini digantikan dengan ritual foto melalui *gadget* untuk di-*update* di sosial media. Inilah bentuk budaya baru itu. Seolah tidak ada lagi yang dapat mengerem laju perubahannya.

Polusi Suara

Selain suara dari kaset ngaji -pada waktu subuh -yang diputar jauh sebelum azan dapat mengganggu banyak orang, Jusuf Kalla juga mengatakan hal tersebut dapat menimbulkan polusi suara. Jika suara kaset menimbulkan polusi suara, pertanyaan selanjutnya mengapa

suara bising yang keluar dari petasan tidak pernah dianggap sebagai polusi suara dan tidak pernah dikritisi oleh pemerintah? Padahal bunyi petasan ini jauh lebih mengganggu dibandingkan suara kaset ngaji di masjid.

Apalagi di setiap malam ramadhan kita selalu mendengarkan suara petasan yang dimainkan oleh anak-anak atau pemuda, meski kegiatan ini sesungguhnya bukan suatu yang dianjurkan dalam agama. Suara petasan setiap malam ramadhan selalu saja berbarengan dengan suara-suara imam di masjid yang sedang melantukan ayat-ayat al-qur'an dalam solat tarawihnya. Tergangukah kita yang sedang melaksanakan ibadah solat berjama'ah? Tentu jawabannya ya! Sebab tidak jarang, suara petasan itu malah berseliweran di seputaran halaman masjid.

Jika kita berpikir lebih kritis, tentu merebaknya bisnis petasan pada saat bulan ramadhan patut untuk dicurigai. Mengapa hanya setiap menjelang bulan ramadhan dan idul fitri peredaran petasan di pasar begitu banyak? Bahkan dapat dikatakan hampir sama banyaknya dibandingkan pada saat pergantian tahun.

Secara normatif kemunculan bisnis petasan pada saat bulan ramadhan dapat dijelaskan tingkat permintaan pasar yang tinggi. Keuntungan pedagang petasan pada saat bulan ramadhan memang jauh lebih banyak dibandingkan pada bulan lain. Perharinya saja pedagang bisa mendapatkan keuntungan minimal 100 ribu rupiah. Namun dibalik itu semua, penyumbang keuntungan itu lebih banyak adalah anak-anak. Sebab hampir rata-rata pembeli petasan adalah mereka yang berusia 7 hingga 15 tahun. Namun benarkah itu hanya sebatas motif ekonomi? Pertanyaan inilah yang harus dijawab dan patut untuk di dalam.

Penutup

Kini, hal yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan operasi atau razia petasan selama bulan ramadhan. Sebab peredaran petasan yang terlalu berlebihan dan tidak terkontrol di pasar secara langsung dapat mengganggu kegiatan peribadahan umat islam selama bulan ramadhan. Apalagi bulan ini menjadi bulan yang begitu penting bagi umat islam untuk bisa mendapatkan pengampunan dan ramhat dari allah swt.

Untuk itu, setidaknya, dewan masjid dibawah pimpinan Jusuf Kalla dapat melakukan satu kajian

penting terkait usaha pencegahan petasan masuk ke wilayah-wilayah masjid. Jangan sampai ke khusukan umat terganggu akibat buyi petas yang mirip dengan suara tembakan dan bom di medan perang. Jika petasan-petasan tersebut masih juga berada di wilayah-wilayah masjid, maka kita patut bertanya, mana yang lebih memicu potensi polusi suara, buyi petasankah atau suara kaset ngaji di masjid? (*)

Hijrah Di Akhir Ramadhan; Dari Masjid Ke Plaza⁷

Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Keberkahan ramadhan dapat dilihat dari banyaknya pintu-pintu berkah yang dibukakan oleh Allah swt kepada manusia setiap harinya. Setiap amal ibadah yang dilakukan manusia selama bulan ramadhan mendapatkan peningkatan pahala yang lebih dibandingkan pada bulan-bulan lainnya.

Oleh karenanya tidak salah jika ramadhan dikatakan sebagai bulan yang penuh keistimewaan. Tercatat setidaknya adanya kelima keistimewaan bulan ramadhan diantaranya adalah; *pertama*, pada bulan ini Al-qur'an sebagai petunjuk umat manusia diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua; pada bulan ini amal sholeh yang dilakukan oleh manusia akan dilipatkan gandakan menjadi 70 kali lipat. Ketiga, pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka pada manusia dan pintu-pintu neraka di tutup. Keempat, pada bulan ini

⁷ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

15 Juli 2015

terdapat malam lailatur qodar. Dan terakhir, bulan ini mendidik manusia untuk menjadi insan yang taqwa.

Dari lima keistimewaan ramadhan tersebut diharapkan mampu untuk menghapus semua dosa-dosa yang dimiliki oleh manusia dan mengembalikannya kepada fitrahnya sebagai insan yang suci. Namun kebanyakan dari kita tidak dapat mengindahkan keistimewaan ramadhan ini. Kita masih sangat sering disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ramadhan yang bersifat euforia. Buka puasa bersama, belanja kebutuhan lebaran, memasak kue lebaran dan lain sebagainya.

Ironisnya, semua kegiatan tersebut selalu saja dilakukan setiap kali menjelang akhir ramadhan. Tak ayal, pada minggu-minggu terakhir bulan ramadhan, masjid-masjid mulai kehilangan para jam'ahnya. Masjid yang sebelumnya ramai dan penuh sesak dengan jama'ah perlahan mulai sepi dan kosong. Imam di masjid-masjid-pun telah kehilangan separuh lebih makmumnya.

Fenomena

Perliku belanja kebutuhan lebaran di setiap akhir bulan ramadhan sudah menjadi satu fenomena sosial yang biasa di tengah

masyarakat Indonesia. Biasanya pada akhir-akhir bulan ramadhan plaza dan toko-toko pakaian selalu tampak ramai. Rata-rata setiap plaza mengalami kenaikan jumlah pengunjung menjadi 20 persen dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Tidak hanya kenaikan kunjungan saja, tetapi angka transaksi juga meningkat. Hampir rata-rata setiap orang melakukan transaksi minimal 500 ribu rupiah hingga satu juta rupiah. Selain itu, hampir rata-rata plaza dan toko-toko pakaian menambah satu jam waktu tutup toko dari waktu normal.

Intensitas belanja baju lebaran ini memang sudah menjadi tradisi bagi banyak masyarakat Indonesia. Ada semacam ketidak enakan jika lebaran tanpa menggunakan baju baru. Fakta ini yang kemudian membuat ramadhan yang harusnya menjadi bulan penuh berkah secara spiritual malah berubah menjadi bulan konsumerisme secara ekonomi.

Secara positif, efek konsumerisme ini berhasil membawa peningkatan pendapatan bagi para pelaku usaha baik pada level mikro (pedangang kaki lima) sampai kepada level makro (pemiliki toko besar dan plaza). Namun terkadang efek konsumerisme ini juga berdampak negative, di mana masyarakat pada akhirnya lebih mementingkan kebutuhan ramadhan secara

sekunder dan tersier dari pada kebutuhan secara primer. Pada titik inilah harusnya kita menyadari bahwa kita telah kehilangan makna ramadhan yang sebenarnya. Ramadhan yang harusnya sebagai tempat menata hati, jiwa dan diri agar dapat menjadi insan yang baik lagi malah harus dikorbankan dengan kepentingan yang sifatnya materil semata.

Pengaruh promosi dan iklan-iklan produk yang menawarkan diskon besar-besaran tentu menjadi salah satu faktor pendukung menguatnya perilaku konsumerisme ini. Iklan-iklan produk selalu saja menghipnotis kita agar membeli dan menggunakan produk mereka. Dengan segala macam *tagline*, kemasan yang menarik, promosi dengan menggunakan bintang iklan yang tampan dan cantik serta trik-trik marketing lainnya. Kita dibuat menjadi sangat butuh dengan produk tersebut, padahal terkadang produk yang mereka jual tidak ada kaitannya dengan bulan ramadhan.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walter Armbrust. Pada tahun 2004 lalu, sosiolog asal Universitas Oxford Inggris ini mempublikasikan hasil penelitiannya yang menunjukkan kesimpulan bahwa bulan ramadhan selalu dijadikan sebagai bulan multiguna untuk gerakan konsumerisme. Itu

sebabnya banyak ahli pemasaran di seluruh dunia yang menunggu ramadhan, sebab bulan ini menjadi priode bisnis paling penting dalam satu tahun. Indikator yang paling sederhana adalah peningkatan omset penjualan.

Ironisnya, perkembangan budaya konsumerisme di tengah-tengah masyarakat ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan infak dan sedekah selama bulan suci ramadhan. Konsep ikhlas dalam melaksanakan infak dan sedekah membuat banyak masyarakat hanya sedikit sekali menginfakan hartanya. Hampir rata-rata masyarakat kita mengeluarkan infak dibawah lima ribu rupiah.

Padahal jika dilihat dari nilai uang tersebut tidak lagi memiliki arti apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat kita masih hitung-hitungan dalam mengeluarkan infak dan sedekah dibandingkan dalam melaksanakan belanja di plaza atau toko-toko. Padahal seperti apa yang telah disampaikan di atas, selama bulan ramadhan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah termasuk di dalamnya infak dan sedekah.

Penutup

Secara filosofis, ungkapan “marhaban ya Ramadhan” memiliki makna simbol sebagai kesiapan mental untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT selama bulan suci ramadhan. Namun kenyataannya, banyak di antara kita yang justru mencederai ramadhan karena kita justru melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ketika ramadhan datang.

Puasa ramadhan yang sasarannya adalah menciptakan seseorang yang takwa, yang ditandai antara lain dengan kesediaan untuk selalu berinfak dalam segala keadaan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi banyak di antara kita yang justru mengumbar nafsu, mengikuti pola hidup konsumerisme. Padahal konsumerisme adalah bagian dari pemborosan yang dilarang dalam agama dan bertentangan dengan tujuan dari ibadah puasa ramadhan.

Kini gejala konsumerisme ramadhan tidak saja menjadi fenomena dunia Islam, tapi juga sudah menjadi fenomena dunia secara keseluruhan. Banyak orang mengganti karpet, gorden, mebel, mobil, dan lain sebagainya justru pada saat bulan ramadhan. Belanja dapur kaum ibu juga

selalu membengkak selama bulan ramadhan karena konsumsi makanan selalu berlipat.

Akhirnya ramadhan yang selalu dinanti selalu saja dikhianati. Ramadhan yang dicintai, tetapi malah dinistakan. Masjid-masjid selalu ramai di awal tetapi sepi diakhir sebab para jam'ah masjid telah banyak yang melakukan hijrah ke plaza-plaza. Ini adalah gambaran nyata dari prilaku kita selama bulan ramadhan dan itu telah berlangsung dari tahun-ketahun, seolah telah hidup menggenerasi. (*)

Kapitalisme Berkerudung dan Ramadhan Fair⁸

Seorang laki-laki paruh baya baru saja membayar bil tagihan makan. Beberapa langkah dari tempat dia berdiri puluhan anak-anak berkeliaran memegang mangkuk dan gelas plastik, meminta-minta ke setiap meja yang penuh dengan berbagai makan dan minuman.

Wajah mereka tak kalah kusam dengan baju-baju yang mereka pakai. Tanpa lelah, mereka terus saja berkeliling dari meja ke meja. Ada beberapa pengunjung yang memberi uang dengan niat untuk bersedekah. Jika ada yang tidak ingin memberikan uang, anak-anak ini masih menawarkan opsi kedua, yaitu memberikan mereka kue-kue yang tersedia di atas meja.

Gambaran di atas dapat kita temui dalam event tahun yang diselenggarakan oleh Pemko Medan

⁸ Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,

19 Juli 2013

yang diberi nama Ramadan Fair. Sebuah event yang bagi saya tidak hanya mempertontonkan sebuah kemewahan tetapi juga memperlihatkan fakta dari realitas kehidupan kaum miskin kota yang ada di seputaran Medan yang masih sangat *massive*.

Mewah karena untuk satu bulan perhelatan akbar bertajuk wisata kuliner dan UMKM bernuansa islam ini Pemko Medan harus menghabiskan anggaran sebesar 5,5 miliar. Anggaran yang tentunya tidak sedikit. Ironi ini yang selalu mengingatkan saya dengan seorang pengemudi becak dayung yang bernama Pak Usman (baca: Pak Us).

Beliau adalah salah satu sampel dari objek penelitian saya tentang masyarakat miskin kota. Tepatnya setahun yang lalu, di bulan yang sama (Ramadhan), saya mengikutinnya selama satu bulan lebih untuk dapat memahami hakikat kemiskinan masyarakat perkotaan.

Satu sore ketika dia mengantarkan penumpangnya menuju Ramadan Fair di seputaran S.M Raja, sambil memarkirkan becanya di pelataran Masjid Raya Al Mashun dengan tegas Pak Us berkata kepada saya; "eforia yang sungguh menakjubkan." Sebuah perkataan yang bukan tanpa alasan, karena pria

yang berusia paruh baya ini selanjutnya menjelaskan;

“Puasa di bulan ramadhan itu sejatinya mengajarkan kita untuk lebih bisa menahan diri dari segala bentuk pemborosan dan foya-foya. Perhatikan-lah orang-orang yang ada di sana, mereka dipaksa oleh suatu kegiatan yang bertajuk buka puasa bersama atau apalah namanya. Tetapi sadarkah mereka berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk satu kali berkumpul itu? Dan apakah mereka sadar kalau tak jauh dari tempat mereka duduk masih banyak orang yang hanya bisa menikmati segelas air putih untuk berbuka puasa.”

Pernyataan yang sungguh menggugah dan sepatutnya apa yang dikatakan oleh Pak Us tadi dapat menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa Ramadan Fair yang sudah berjalan selama sembilan tahun ini bukan-lah perwujudan yang tepat untuk memeriahkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan.

Kapitalisme Berkerudung

Kata *fair* yang ada pada Ramadan Fair jika dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi adil atau wajar. Tetapi kita tidak akan merasakan atau melihat keadilan (*fairness*) itu selama berada di Ramadan Fair.

Selain fenomena kemiskinan (baca: gelandangan dan pengemis) yang masih tampak pada event tahunan yang memakan anggaran 5,5 Milliar ini, ketidakadilan lain yang dapat dirasakan adalah mahalannya harga-harga makanan yang ada di Ramadan Fair. Tidak salah jika seorang teman pernah berujar jika Ramadan Fair adalah bentuk lain dari pada kapitalisme yang sedang berkerudung.

Ya, baginya, para pedagang yang memiliki stand-stand di Ramadan fair benar-benar memakai konsepsi ekonomi kapitalisme dalam sistem dagangannya. Di mana para pedagang dengan serta merta menerapkan harga dagangannya tanpa bisa diatur oleh Pemko Medan selaku pihak penyelenggara. Hanya demi kepentingan perdagangan yang selalu mengedepankan keuntungan akhirnya para pedagang tanpa disadari merugikan banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah buka puasa di sana.

Sudah menjadi rahasia umum bila kebanyakan para pedagang yang ada di Ramadan Fair bukanlah murni para pelaku UMKM. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempunyai akses ke dinas terkait, baik dengan model-model nepotisme (kekeluargaan) ataupun suap (bayaran), biasanya bisa melalui oknum

petugas atau langsung kepemilik yang telah memenangkan undian dan berniat menjual standnya.

Berapa harganya? Relative, tetapi hampir rata-rata berkisar 2 juta rupiah. Itu semua dilakukan demi mendapatkan satu stand yang diharapkan mampu mengakumulasi keuntungan untuk kebutuhan lebaran nanti.

Tidak salah jika orientasi pedagan kemudian adalah bagaimana mengembalikan modal yang tertanam dan bagaimana mengakumulasi keuntungan untuk dana lebaran. Dua orientasi ini membuat sistem kapitalisme (pasar tanpa intervensi pemerintah) bermain begitu dominan di Ramadan Fair. Inilah yang disimpulkan seorang teman malam itu

Penutup

Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 Wib. *Euphoria* Ramadan Fair terus saja berjalan tanpa memandang waktu. Semua yang ada di dalamnya terhanyut dalam dekapan halus *hedonisme*. Suara imam tarawih dari masjid seberang nyaris tak terdengar. Ramadan Fair tanpa disadari sudah menjauhkan umat dari kegiatan ibadah *mahdhah*.

Kini bulan Ramadan kembali hadir dalam kehidupan kita. Namun sampai kapan kita

harus membiarkannya pergi dengan begitu saja tanpa memanfaatkannya sebagai bulan yang penuh berkah. Bagi sebagian mukmin, kepergian bulan Ramadan jauh lebih disesalkan dari pada kepergian tamu mulia.

Malam semakin larut, seorang pedagang mulai menyapu lokasi standnya. "Maaf ya dik, Ibu harus menyapunya sekarang, kalau nunggu sampai sunyi bisa sampai jam dua malam baru kelar," imbuh wanita paruh baya yang berkerudung biru ini. (*)

Inflasi dan Budaya Konsumtif Di Ramadhan⁹

Gejolak kenaikan harga pangan jelang bulan suci Ramadhan dan lebaran Idul Fitri merupakan fenomena yang sering terjadi setiap tahunnya. Seolah tidak ada langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Padahal peran pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) sangat besar untuk mengatasi persoalan ini.

Salah satu peran yang bisa dimainkan oleh pemerintah adalah sebagai regulator untuk menentukan distribusi pangan antar daerah agar dapat berjalan lancar. Sebab setiap daerah memiliki potensi pangan yang berbeda-beda. Untuk itu, hambatan-hambatan transportasi harus bisa diatasi secara maksimal. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat

⁹ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

menggerakkan pelaku usaha untuk dapat melakukan aktifitas perdagangan secara wajar tanpa melakukan tindakan penimbunan barang.

Pengendalian atas distribusi pangan ini menjadi penting agar harga-harga komoditas pangan dapat terkendali dengan baik. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah perlu lebih focus dalam menjaga inflasi harga bergejolak dengan menyediakan pasokan. Sebab komponen bahan makanan seperti cabai merah, bawang merah dan daging ayam, menjadi penyumbang utama inflasi pada Mei 2015.

Hal ini mengacu pada data BPS yang mencatat tingkat inflasi pada Mei 2015 sebesar 0,5 persen, atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dalam bulan yang sama, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan menjelang puasa dan lebaran. Untuk itu penyediaan pasokan agar dapat mengerem laju inflasi bisa dilakukan dengan membentuk pasar-pasar murah sebagai penyeimbang harga agar daya beli masyarakat terhadap barang-barang pokok dapat terus terjangkau.

Melibatkan Tokoh Agama

Selain keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi, peran serta tokoh agama juga dapat diikuti sertakan khususnya

seperti ulama, kiyai dan ustad. Tokoh agama ini diharapkan dapat memberikan imbauan pada umat islam untuk tidak melakukan konsumsi makanan yang berlebihan selama bulan puasa.

Sebab, banyak masyarakat yang kalap jelang bulan ramadhan dan idul fitri. Kegiatan belanja dengan model memborong semua kebutuhan pokok menjadikan barang-barang yang ada di pasar mengalami lonjakan permintaan yang tinggi. Secara hukum ekonomi, jika permintaan di pasar meningkat maka harga atas barang tersebut juga akan meningkat. Padahal, bulan ramadhan dapat dijadikan momentum untuk melakukan pengendalian diri dengan tidak melakukan belanja besar-besaran. konsumsi yang berlebihan inilah yang kemudian menimbulkan kenaikan harga yang signifikan di pasar.

Oleh karenanya tokoh-tokoh agama harus bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk dapat cerdas dalam berbelanja kebutuhan barang pokok. Berbelanja secara normal seperti biasanya menjadi kunci penting dalam menekan laju inflasi.

Budaya Konsumtif

Naiknya laju inflasi di setiap bulan Ramadhan tentu dapat dijelaskan dengan pengaruh budaya

konsumtif yang masih menyelimuti tubuh masyarakat Islam Indonesia hari ini. Padahal perilaku terhadap budaya konsumtif ini tidak dianjurkan dalam Islam. Tengoklah supermarket dan mal-mal di perkotaan, setiap kali menjelang waktu berbuka hingga malam hari selalu dipenuhi oleh kita sebagai umat Islam.

Ironisnya, kebiasaan ini berlangsung hingga malam hari dengan kebiasaan berleha-leha selepas berbuka. Padahal seharusnya, kita lebih dianjurkan untuk meramaikan masjid dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Akhirnya dampak puasa sebagai ibadah sosial-pun tidak hadir secara nyata dalam kehidupan kita.

Fenomena ini menurut Umar Shihab, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), setidaknya dilatarbelakangi dua hal. *Pertama*, Islam masih dipahami secara *fikih oriented*. Paradigma ini memandang ibadah hanya secara hitam-putih, halal-haram. “Jebakan-jebakan” fikih yang parsial, telah mendarah daging dan menjadi tradisi yang masif dilakukan kalangan umat beragama. Fikih belum mampu membangkitkan spiritual umat menghadapi kondisi riil masyarakat yang tengah dilanda demoralisasi individual dan sosial. Maka tak

salah kalau puasa hanya dilihat sekedar memenuhi perintah syariat belaka.

Faktor *kedua* yaitu bulan Ramadhan telah dijadikan komoditas yang kapitalistik. Berbagai industri, media massa, khususnya stasiun televisi, berpacu memanfaatkan Ramadhan untuk menayangkan program-program dakwah. Semua artis manggung di TV dengan pakaian islami, namun tak sadar kita disuguhi iklan-iklan yang menyuntik *mindset* kita. Mereka, menurut Umar Shihab, memanfaatkan momentum ramadhan. Padahal, produk mereka sama sekali tidak terkait dengan ibadah puasa.

Tanpa kita sadari kedua hal di atas telah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kita selaku umat islam hari ini selalu diposisikan sebagai konsumen potensial setiap kali bulan ramadhan datang. Perkembangan kapitalisme global membuat, bahkan memaksa umat Islam pada suatu kondisi dimana seolah-olah 'hasrat' mengkonsumsi lebih diutamakan. Seolah-olah ibadah puasa nantinya kurang sempurna jika tidak mengkonsumsi makanan serta minuman tertentu atau segala yang disodorkan oleh media dan iklan dengan mengatasnamakan agama.

Penutup

Untuk bisa menahan nafsu dan sifat konsumtif selama bulan ramadhan berlangsung, ada baiknya jika kita menyimak kisah dari Khalifah Umar bin Khathab. Suatu ketika Umar pernah menghukum Amru bin Ash, sang gubernur Mesir kala itu yang berbuat semena-mena terhadap seorang rakyatnya yang miskin.

Seorang gubernur yang bertugas di Hamash, Abdullah bin Qathin juga pernah dilucuti pakaiannya oleh Umar. Sang khalifah menyuruh menggantinya dengan baju gembala. Bukan itu saja, si gubernur diminta menjadi penggembala domba sebenarnya untuk beberapa saat. Hal itu dilakukan Umar karena sang gubernur membangun rumah mewah buat dirinya. “Aku tidak pernah menyuruhmu membangun rumah mewah!” ucap Umar begitu tegas.

Esensi puasa ramadhan juga memberikan nilai ajaran agar orang yang beriman dan bertakwa mengikuti tuntunan Nabi saw yang hidupnya sangat sederhana. Dalam sebuah hadist, Rasulullah juga bersabda, “Berhentilah kamu

makan sebelum kenyang.” Di bagian lain Nabi Muhammad SWA menganjurkan untuk berbuka puasalah dengan tiga butir kurma dan seteguk air minum setelah itu langsung melaksanakan salat magrib.

Itu artinya, puasa ramadhan bukan sekadar menahan rasa lapar dan haus tetapi juga menahan nafsu dan keinginan hedonistis. Karena itu, semoga di bulan Ramadhan ini, kita bisa mengambil hikmah untuk bisa menjalankan hidup yang lebih sederhana dan jauh dari perilaku konsumtif. (*)

Bagian II

Malpraktik Pembangunan

Kita Telah Menjadi Asing di Tanah Leluhur Sendiri

-WS. Rendra-

Malpraktik

Pembangunan¹⁰

Memaknai pembangunan tentu dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, pembangunan ditinjau dari artikata atau defenisi yang diberikan. Untuk aspek ini, makna pembangunan selalu mengacu pada tataran teoritik yang berlandaskan nilai-nilai ideal. Aspek *kedua*, pembangunan dapat dilihat dari proses atau usaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai teoritik dalam sebuah implementasi perencanaan pembangunan. Biasanya, pada aspek kedua ini selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai prakmatis dalam proses implementasinya.

Meski keduanya saling berkaitan, namun pada prosesnya, pengimplementasian pembangunan tidak lagi melihat makna atau nilai-nilai teoritik sebagai komponen yang lebih penting untuk dijalankan. Melainkan lebih mengutamakan nilai prakmatisme atas semangat transaksional berupa proyek-proyek pembangunan. Sehingga pembangunan tidak lagi dimaknai sebagai suatu

¹⁰ Pertamakali diterbitkan di Harian Waspada, Rabu, 8 Juni 2016

proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Namun, hanya dilihat pada aspek ekonomi dengan mengejar pertumbuhan ekonomi dan proyek-proyek pembangunan.

Dosa Pembangunan

Angka kesenjangan sosial di Indonesia berdasarkan gini rasio dalam beberapa tahun ini sudah mencapai 0,43. Angka tersebut menjelaskan bahwa kesenjangan di Indonesia hampir mendekati kesenjangan yang tinggi dengan nilai besar dari 0,5. Selain data tersebut, Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan realitas kesenjangan yang semakin jelas, di mana masyarakat bawah hanya mendapatkan distribusi pendapatan sekitar 13 persen. Sedangkan porsi pendapatan masyarakat menengah menurun hingga di bawah 35 persen dari total pendapatan nasional. Tetapi, jika dilihat pada masyarakat level atas yang jumlahnya hanya 20 persen dari penduduk di Indonesia dapat menguasai hampir 50 persen pendapatan negara.

Realitas kesenjangan tersebut membuat kita bertanya, apakah ini yang diharapkan dari suatu proses pembangunan yang sudah

berjalan selama 70 tahun? Jawabannya tentu saja tidak, sebab sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah kita tentu menginginkan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik. Namun “dosa pembangunan” yang dihasilkan dari para pengambil kebijakan –baik pada tingkat eksekutif dan legislative –pada masa lalu membuat kita harus menikmati efeknya pada saat ini.

Selama tiga puluh dua tahun rezim orde baru berkuasa, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan sokongan modal asing sebagai basis utamanya berakibat pada ketergantungan ekonomi Indonesia yang begitu besar terhadap negara-negara pendonor. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada masa itu yakni berada dikisaran enam persen pertahun yang sebelumnya hanya berada pada angka tiga persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk dalam katagori tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya pada saat itu.

Meski Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat, namun pada kenyataannya ekonomi Indonesia telah dikuasai asing dan pemodal besar. Penghisapan ekonomi-pun terjadi di mana-mana,

keuntungan mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Itu sebabnya *trickle down effect* yang diharapkan muncul dari proses industrialisasi – melalui investasi negara-negara asing – tidak pernah terjadi. Mahal membuat tingkat kesenjangan semakin menjadi-jadi baik antara daerah –desa dan kota, Jawa dan luar Jawa –atau antar kelas dalam masyarakat.

Padahal sebagai negara agraris dan maritim, idealnya orientasi pembangunan Indonesia harus diarahkan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai basis utamanya, bukan pada sektor industri manufaktur. Hal ini disebabkan sektor pertanian dan perikanan merupakan tempat bagi kebanyakan masyarakat Indonesia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun apa daya, kedua sektor ini malah tidak mendapatkan tempat utama dalam proses pembangunan di Indonesia.

Realitas Pertanian

Sektor pertaniannya misalnya, pada tahun 1971 kontribusi pertanian terhadap pembentukan pendapatan nasional (*produk domestik bruto*) mencapai 44,8% atau hampir separuh dari pendapatan nasional. Sumbangan tersebut lebih banyak dari pada industri manufaktur yang menyumbang cuma sebesar 8,4% terhadap

penciptaan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek pemberian kesempatan kerja yang diciptakan, sektor pertanian menyerap porsi tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi, yakni mencapai 64% sementara industri manufaktur hanya menyumbang 6,5%.

Namun gambaran tersebut berubah cukup drastis ketika pembangunan berlangsung selama 30 tahun kemudian. Pada tahun 2001, misalnya, secara umum peta penyerapan tenaga kerja tidak mengalami perubahan secara berarti, dimana sektor pertanian menyerap tenaga kerja 43,8% dan hanya menyumbang pendapatan nasional sebesar 17,0%. Sebaliknya sektor industri manufaktur menyumbang PDB sebesar 25% tetapi cuman menyerap tenaga kerja 13,3%.

Sedangkan pada tahun 2013 lalu, BPS melalui Sensus Pertanian mencatat terjadi penurunan jumlah rumah tangga pertanian dari 31,17 juta pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta (atau 11% dari penduduk Indonesia) pada tahun 2013. Ironisnya, pada periode tahun yang sama (2003-2013) terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. di mana pada tahun 2003 ada 4.011 perusahaan dan pada tahun 2013 naik menjadi 5.486 perusahaan.

Fakta lain yang bisa dilihat dari Sensus Pertanian BPS adalah semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah. Dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta (61,5) di antaranya tidak memiliki tanah. Dengan mudah dapat disimpulkan bahwa selama 30 tahun pembangunan ekonomi dikerjakan secara besar-besaran di Indonesia, lewat strategi industrialisasi, ternyata hanya mementingkan sektor industri dan meninggalkan sektor pertanian yang nyaris karam.

Realitas Perikanan

Realitas kemiskinan pada kelompok petani juga dirasakan oleh kelompok nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari sektor perikanan. Realitas tersebut dapat dilihat dari potensi lautnya yang besar tetapi nasib para nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia, justru hidup miskin dan terpinggirkan dalam pembangunan yang selama ini lebih mengarah kepada daratan. Hal ini menunjukkan bahwa proses kemiskinan dalam komunitas nelayan terjadi bukan secara alamiah, misalnya kurangnya keterampilan, tetapi lebih disebabkan oleh masalah structural yang memperlihatkan kebijakan-kebijakan pemerintah

secara politik dan ekonomi belum berpihak pada kepentingan nelayan.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek; *pertama*, negara dengan telah sengaja mengabaikan sektor kelautan dan perikanan sebagai basis ekonomi nasional. Walaupun sumber dayanya telah tersedia. *Kedua*, negara juga membiarkan sebagian sumber daya perikanan diserobot dan dikeruk oleh nelayan (usahawan) asing, yang setiap hari menjala dan menyedot ikan di perairan Indonesia lewat kapal-kapal besar dan modern.

Ketiga akibat *kealpaan* negara dalam mengurus masyarakat nelayan, sebagaimana besar nelayan di Indonesia bisa digambarkan sebagai komunitas yang hidup subsisten dengan pendapatan yang bukan kecil tetapi juga tidak menentu. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah yang baru memisahkan Department Kelautan dan Perikanan dari Departement pada tahun 1999. Sehingga baru pada masa itu sektor perikanan mendapatkan perhatian yang memadai oleh pemerintah.

Malpraktik

Tujuan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas hidup. Kualitas hidup yang lebih baik memang membutuhkan adanya

pendapatan yang lebih tinggi. Namun, ada banyak indikator lain yang harus diperjuangkan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kebebasan individual.

Jika kondisi ini tidak dapat terwujud maka kita patut untuk curiga, jangan-jangan sudah terjadi aktifitas malpraktik dalam proses pembangunan yang ada disekitar kita? Rasa curiga tersebut tidak lagi harus dicari jawabannya, sebab pada realitasnya kita sudah dapat merasakan dan menyaksikan bagaimana malpraktik pembangunan tersebut terjadi. Demokrasi dengan politik transaksional mengharuskan praktik pembangunan tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan banyak orang tetapi hanya diperuntukkan bagi kepentingan penguasa dan pengusaha yang menjadi sponsor politik penguasa.

Dengan kata lain, pilihan-pilihan pembangunan saat ini tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan dengan berharap pada mantra *trickle-down effect* atau berorientasi pada pemerataan dan keadilan. Tetapi yang ada kini, pilihan-pilihan pembangunan lebih berorientasi

pada aktifitas-aktifitas *rent seeking* baik pada skala nasional atau lokal yang selalu melibatkan pemerintah dan pengusaha.

Penutup

Reformasi sudah terjadi delapan belas tahun yang lalu. Rezim orde baru dengan model kepemimpinan yang diktator dan sentralistik akhirnya tumbang. Harapan akan praktik-praktik pembangunan yang lebih baik -pasca orde baru -ternyata tidak juga terjadi, meski sudah empat presiden silih berganti memimpin negeri. Angka kemiskinan masih cukup tinggi, kesenjangan sosial menjadi realitas sehari-hari. Dampak yang paling dirasakan adalah akumulasi pengangguran, kriminalitas yang tidak bisa teratasi, dan pemasalahan sosial yang terus saja muncul.

Kini praktik-praktik pembangunan harus bisa diarahkan pada kepentingan masyarakat banyak -seperti kelompok petani dan nelayan -jangan sampai, praktik-praktik pembangunan yang sama pada masa dahulu terus saja terjadi secara berulang-ulang dalam setiap masa kepemimpinan. Pemerintahan Jokowi-JK dengan kabinet kerjanya harus bisa mengatasi malpraktik pembangunan yang selama ini terus

terjadi. Bukankah tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? (*)

Bahagia Di Tengah Begal Motor¹¹ ...

Pebruari 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) meliris Indeks Kebahagiaan Indonesia untuk tahun 2014. Data yang diliris oleh BPS tersebut menunjukkan peningkatan kebahagiaan masyarakat Indonesia. Tercatat pada tahun 2013 indeks kebahagiaan sebesar 65,11 dan pada tahun 2014 menjadi 68,28 (pada skala 0-100) atau naik sekitar 3,17 poin.

Kenaikan ini diukur dari 10 aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang mencakup; kondisi rumah dan aset, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keharmonisan keluarga, kondisi keamanan dan keadaan lingkungan. Kesepuluh aspek ini dianggap menjadi indikator yang paling sahi dalam menentukan tingkat kebahagiaan di satu masyarakat. Namun benarkah kesepuluh indikator ini dapat dijadikan acuan kebahagiaan secara riil? Bukan dibalik angka-angka itu semua kita masih sering

¹¹ Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,

1 April 2015

menyaksikan wajah-wajah yang muram dan stress dengan kondisi kehidupan hari ini.

Anomali

Tepat pada bulan yang sama, seorang teman bercerita tentang sepeda motornya yang dirampok oleh sekelompok orang yang ia curigai sebagai begal motor. Aksi rampok itu di luar dugaan, sebab terjadi pada sore hari sekitar pukul tigaan. Aksi perampokan ini berlangsung cepat dan sistematis. Berdasarkan pengakuan teman ini, seorang yang tidak ia kenal, tiba-tiba duduk di belakang boncengan sepeda motornya di saat *traffic light* sedang merah. Orang yang tidak dikenal itu menodongkan pisau di pinggangnya dan meminta teman ini untuk turun dari sepeda motor sambil menyerahkan STNK.

Tidak ada perlawanan yang berarti sebab dirinya sudah dikelilingi oleh sekelompok anggota begal tersebut. Mereka tidak membawa senjata memang, tetapi menatap wajah gerombolan ini saja sudah cukup menyeramkan. Akhirnya, sepeda motor yang baru lunas kredit dua tahun yang lalu itu-pun lenyap begitu saja. Selain sepeda motor dan STNK, uang sebesar 300 ribu dari dompet juga ikut melayang.

Apa yang dialami teman tadi hanyalah bagian dari ratusan kasus terkait aksi begal motor yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Ironisnya, Indeks kebahagiaan justru menunjukkan angka kebahagiaan di wilayah perkotaan relatif lebih tinggi –sekitar 69,62 poin –dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang hanya berkisar pada 66,95 poin.

Padahal rasa aman adalah kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Jika rasa aman secara substantif belum bisa terpenuhi, bagaimana bisa merasa bahagia? Setiap kali ingin pergi meninggalkan rumah takut rumah kemalingan, setiap kali pulang larut malam, takut dengan begal motor. Bukan hanya itu, kita juga mulai cemas dengan lingkungan tempat anak-anak kita berinteraksi, jajanan yang penuh dengan formalin dan bahan kimia berbahaya yang semakin mudah untuk ditemui. Belum lagi persoalan peredaran narkoba yang semakin menjadi. Ini tentunya akan menjadi ancaman bagi masa depan mereka sebagai anak bangsa.

Persoalan di atas hampir setiap hari kita rasakan dan itu selalu memicu rasa kekawatiran yang mendalam. Pada celah inilah indeks kebahagiaan tidak mampu menerangkan kebahagiaan itu secara substantif. Sebab kebahagiaan sesungguhnya terkait dengan wilayah perasaan seseorang yang

sangat khas –ada nilai transedental –dan sulit untuk diukur secara material.

Bukan Fenomena Tunggal

Fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat tidaklah muncul secara tunggal. Ia selalu memiliki kaitan dengan kondisi atau fenomena-fenomena lainnya. Sebagai fenomena sosial, bagal motor tentunya tidak hadir secara tiba-tiba (tunggal), kehadirannya tentu dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari faktor keluarga, teman sebaya atau lingkungan sekolah dan masyarakat.

Fungsi keluarga pada masyarakat perkotaan dinilai sudah mulai berkurang. Rutinitas kedua orang tua –ayah dan ibu –yang banyak menghabiskan waktu bekerja pada sektor publik membuat fungsi pendidikan di dalam keluarga semakin berkurang. Selain itu, fungsi afektif yang merupakan sarana untuk mempertahankan kestabilan kepribadian dan pemenuhan kebutuhan psikologi setiap anggota keluarga saat ini telah luntur.

Naiknya kebutuhan barang pokok memaksa banyak keluarga untuk meningkatkan pendapat ekonomi. Pendapatan ekonomi dinilai menjadi standart yang paling penting untuk dapat memenuhi segala kebutuhan fisik atau materi

bagi setiap anggota keluarga. Fakta inilah yang terungkap pada indeks kebahagiaan yang dilangsir oleh BPS, di mana pendapatan rumah tangga menjadi penyumbang atau memiliki kontribusi paling tinggi sebesar 14,64% yang kemudian diikuti oleh kondisi rumah dan asset 13,22% serta pekerjaan 13,12%. Ini menjadi tiga aspek kehidupan yang memiliki kontribusi paling tinggi pada indeks kebahagiaan.

Akhirnya kini, keluarga hanya menjadi tempat penyaluran kebutuhan biologis (seks) dan pemenuhan kebutuhan fisik -materi -semata. Berkurangnya fungsi afeksi dan pendidikan inilah yang kemudian membuat anak mencari tempat baru (kelompok) yang ia anggap nyaman dengan dirinya dan dapat menyalurkan eksistensinya. Mungkin kelompok begal motor dianggap menjadi tempat yang nyaman. Mungkin! Meski mereka juga mengetahui jika kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak mendapat penerimaan di tengah masyarakat.

Penutup

Studi pengukuran kebahagiaan masyarakat dinilai perlu dilakukan agar dapat mengimbangi indeks komposit objektif seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya yang selama ini dipakai untuk mengukur

kinerja pembangunan. Begitupun, mengukur kebahagiaan bukan hal mudah untuk dilakukan. Persepsi individu terhadap kebahagiaan sangatlah relative-subjektif. Sehingga kebahagiaan di sini tidak bisa diukur secara material –dengan sepuluh indikator yang ada –perlu ada perbaikan terkait sepuluh indikator tersebut yang sangat kental dengan pendekatan material.

Sebab tingkat pendapatan rumah tangga yang tinggi belum tentu bisa menggambarkan kebahagiaan seseorang di dalam satu rumah tangga. Jadi kenaikan *income* yang dialami seseorang belum tentu langsung berkorelasi positif dengan kebahagiaan seseorang. Bagaimana mau bahagia jika kondisi keaman masih belum terjamin. Setidaknya kita perlu bertanya ke dalam diri, sudah kita merasa bahagi di tengah begal motor yang masih berkeliaran di sekitar kita saat ini? (*)

Nawacita

"*Tak Berasap*"¹²

Pembangunan berkelanjutan atau dengan istilah lain sering disebut dengan *sustainable development* memang tidak pernah mendapatkan tempat dikalangan pengambil kebijakan. Komitmen politik pemerintah untuk isu pembangunan berkelanjutan dianggap masih sangat kurang. Fokus pembangunan ekonomi dan sosial masih menjadi prioritas utamanya dan selalu mengesampingkan kepentingan pembangunan ekologi (lingkungan).

Padahal jika kita pahami secara maksimal, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja namun lebih luas dari itu. Pembangunan berkelanjutan –berdasarkan dokument PBB terutama dokument hasil *World Summit 2005*– memfokus diri pada tiga aspek pembangunan yang dilakukan secara bersamaan yaitu;

¹² Diterbitkan Pertamakali di Kolom Opini Harian Waspada,

31 Oktober 2015

pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Prinsip perlindungan lingkungan di tengah usaha pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial inilah yang tidak tampak sama sekali pada program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kasus asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Indonesia -kecuali Pulau Jawa dan Bali - menjadi bukti nyata. Padahal persoalan asap menjadi persoalan tahunan yang dihadapi Indonesia setiap kali memasuki musim panas. Meski sudah menjadi masalah tahunan namun tetap saja antisipasi pemerintah terhadap masalah ini dinilai sangat minim. Sehingga tidak salah jika pertumbuhan dan penyebaran asap sampai hari ini semakin menjadi dan begitu menakutkan.

Ucapan ini bukan tanpa sebab, hampir seluruh aktivitas sosial-ekonomi di tengah masyarakat lumpuh. Mobilitas sosial manusia terganggu dikarenakan banyak jadwal penerbangan yang ditunda bahkan dibatalkan. Dampaknya, kerugian ekonomi maskapai penerbangan menjadi tak terelakkan. Tidak hanya itu, kabut asap juga berhasil mengganggu aktifitas pendidikan. Sekolah-sekolah diliburkan oleh Kementerian Pendidikan, akibatnya jadwal

pembelajaran terganggu dan pedagang yang selalu menggantungkan kepentingan dagangnya kepada siswa-siswa sekolah juga mengalami penurunan tingkat pendapatan dalam beberapa hari.

Itu adalah contoh riil dari dampak yang dihasilkan oleh kabut asap terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Belum lagi jika kita bicara tentang berapa banyak uang negara yang harus dikeluarkan akibat membiayai perawatan kesehatan masyarakat yang menjadi korban dari kabut asap dan berapa banyak juga uang negara yang harus dikeluarkan untuk membiayai operasi penanganan asap di daerah-daerah yang memiliki titik api dalam jumlah besar.

Pada konteks inilah kita harusnya mulai sadar, bahwa perencanaan pembangunan yang hanya berbasis pada pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan perlindungan lingkungan ternyata berakibat fatal bagi pondasi ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.

Nawacita

Usai terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK langsung menetapkan sembilan agenda prioritas untuk jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan

berkepribadian dalam budaya. Sembilan agenda prioritas tersebut kemudian disebut dengan istilah *nawacita*.

Namun sayangnya, sembilan prioritas untuk perubahan Indonesia yang terangkum dalam *nawacita* tersebut tidak satupun memuat isu perlindungan lingkungan. Anda tidak percaya? Silahkan cek diberbagai web atau media masa yang pernah mempublis visi dan misi presiden Jokowi pada masa kampanye.

Jika diringkas *nawacita* hanya memuat persoalan yang diantaranya adalah *pertama*; penguatan perlindungan keamanan nasional dengan membangun pertahanan negara dengan konsep Tri Matra. *Kedua*; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. *Ketiga*; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah atau desa. *Keempat*; melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatahat dan terpercaya.

Kelima; meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9

hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Keenam; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. *Ketujuh*; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. *Kedelapan*; Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan. Dan terakhir *kesembilan*; Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Kesembilan poin yang terangkum dalam nawacita tersebut hanya merangkum pola pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang sama sekali tidak mencantumkan kepentingan perlindungan lingkungan. Padahal bencana yang selalu hadir disebabkan kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi kinerja sosial dan ekonomi masyarakat.

Kita tau bagaimana dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari bencana banjir Jakarta pada tahun 2013 lalu. Belum lagi banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah Kota di Manado dan Tomohon pada 15 Januari 2014 lalu. Pada kasus Banjir Kota Manado ini diperkirakan kerugian yang ditimbulkan mencapai 1,87 triliun, besar bukan?

Persoalan bencana inilah yang harusnya bisa dengan lebih jeli dilihat oleh pemerintah. Apalagi untuk kasus asap dan banjir yang selalu hadir setiap tahun. Hanya saja, persoalan asap tahun ini terasa lebih berat dan melelahkan dengan sebaran asap yang cukup luas. Pada titik inilah kita butuh kerja nyata pemerintah, jangan sampai kata kerja yang tertera pada kabinet kerja hanya menjadi simbol semata tanpa ada dampak aplikatifnya di tengah masyarakat.

Penutup

Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh (rumah), seks dan oksigen. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah Hierarki Kebutuhan Maslow yang di dalamnya terdapat lima tingkat

kebutuhan dasar yaitu; kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

Kini, sekitar 22.535 orang menderita ISPA yang disebabkan oleh kabut asap. Oksigen yang harusnya menjadi kebutuhan paling dasar bagi manusia sudah tidak mudah lagi didapatkan. Nyawa ribuan manusia terancam. Bagaimana mau bicara tentang peningkatan kesejahteraan jika kebutuhan dasar tidak bisa dipenuhi? Bagaimana mau bicara tentang pertumbuhan ekonomi jika ribuan manusia penggerak roda ekonomi mengalami sesak nafas? Bagaimana mau bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika anak-anak sekolah harus libur dan berlindung dari terpaan kabut asap?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang penting untuk kita jawab. Sebab Indonesia hebat mustahil bisa terwujud jika persoalan asap tidak bisa diselesaikan secara cermat. Nawacita boleh saja tak mencantumkan persoalan asap sebagai agenda prioritas yang harus diselesaikan, tetapi jangan hanya karena itu persoalan asap menjadi tidak dianggap serius. Untuk itu kedepan kita butuh langkah antisipasi yang jelas terkait

masalah asap tahunan ini. Jangan sampai kegelamoran nawacita akhirnya harus tertutupi kabut asap yang semakin pekat. (*)

Dilema Usaha Kecil dan Menengah¹³

Menarik memang ketika kita harus berbicara tentang kewirausahaan, ada banyak aspek yang dapat dilihat dari sini di antaranya adalah pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Namun untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan peran serta pemerintah khususnya dalam hal kebijakan untuk mendukung atau mengembangkan kewirausahaan. Sebab dalam banyak kasus terkadang kebijakan pemerintah kurang baik terhadap para pelaku kewirausahaan. Di kerenekan adanya faktor yang disengaja atau yang memang dibuat untuk *mengkebiri* wirausahawan kita.

Kenapa dapat dikatakan pengkebirian terhadap usahawan? karena ada suatu keanehan bila kita lihat bagaimana pemerintah di satu sisi coba untuk mendengung-dengungkan atau mensosialisasikan kemandirian untuk kewirausahaan tetapi dari sisi yang berbeda

¹³ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

terlihat bagaimana pemerintah mengambil sikap yang tragis terhadap para pelaku usaha dengan melakukan penggusuran lahan. Belum lagi bagaimana Negara menyediakan pinjaman atau kredit dengan bunga yang tinggi dan prosudur yang sulit.

Memang pada dasarnya wirausahawan yang banyak dikebiri adalah mereka yang bukan usahawan besar, melainkan mereka yang memiliki modal kecil untuk berkembang. Oleh karenanya dalam hal ini, kita akan coba melihat bagaimana perilaku, tindakan dan kebijakan pemerintah terhadap para usahawan kecil yang ingin mengembangkan usahanya atau bisnisnya.

Secara kausalitas kita bisa melihat munculnya kewirausahaan di karenakan adanya suatu hubungan sebab-akibat. Di mana terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran, dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tanpa ada peningkatan SDM yang berkualitas. Menariknya munculnya wirausahawan selalau saja dikemas dengan isu bahwa setiap pelaku usaha tidak mesti berpendidikan tinggi tetapi asalkan mau berusaha maka ia akan sukses. Hal ini diperkuat dengan dimunculkannya banyak tokoh wirausahawan yang sukses dengan latar

belakang pendidikan rata-rata tidak tamat sekolah tinggi.

Dampaknya, pendidikan seolah dianggap tidak begitu penting bagi seorang (calon) wirausahawan. Padahal pendidikan mampu membantu seorang calon wirausahawan untuk melakukan analisis perencanaan dalam setiap tindakan usaha yang akan ia lakukan sehingga dapat mengurangi tindakan *tray and error* yang banyak dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Untuk itu, pada titik ini dibutuhkan peran pemerintah yang besar dalam melahirkan calon-calon wirausahawan yang handal di bidangnya.

Peran tersebut memang sudah dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahawan pada institusi-institusi pendidikan. Begitu juga program-program bantuan dana untuk pengembangan wirausaha bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Namun itu saja tidak cukup, sebab secara teknis, mereka yang akan menjadi calon wirausahawan harus berhadapan dengan pasar yang penuh dengan gempuran pemodal besar. Belum lagi kebijakan pemerintah terkadang lebih menguntungkan para pemodal besar. Akhirnya wirausahawan kita hanya tumbuh menjadi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak dapat berkembang dengan maksimal.

UKM dan Jebakan Struktural

Struktur masyarakat Indonesia yang didominasi oleh komunitas berpendidikan rendah dan bermodalkan sedikit, membuat pilihan untuk melakukan kegiatan ekonomi tidaklah banyak. Salah satu jalan yang paling mudah dilakukan adalah dengan membuka lapangan kerja sendiri disektor usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor ini disamping tidak memerlukan modal banyak (karena intensitas teknologi yang digunakan relatif rendah) juga kurang mensyaratkan keterampilan tenaga kerja yang tinggi.

Fakta inilah yang kemudian menyulut pernyataan, bahwa UKM merupakan salah satu penyangga penting dari konsep ekonomi kerakyatan. Di luar itu perkembangan UKM yang begitu pesat tidak diimbangi dengan percepatan yang sama dalam hal perhatian pemerintah terhadap sektor usaha ini. Tidak bisa disangkal hambatan terbesar dari pengembangan UKM adalah masih tingginya biaya transaksi yang harus dipikul oleh pelaku ekonomi di sektor tersebut.

Satu diantaranya adalah kebijakan pemerintah yang masih membebani UKM dengan biaya izin usaha dan bantuan kredit dengan bunga yang

relative besar. Sehingga meningkatkan biaya transaksi. Sedangkan dalam kaitannya dengan para pelaku ekonomi lainnya, UKM juga harus menanggung setiap resiko dari setiap kerusakan barang jika terjadi relasi dagang dari perusahaan besar yang hendak membeli input dari UKM. Tentu saja hal itu merupakan biaya transaksi pula yang harus dipikul oleh pengusaha kecil.

Seperti yang terlihat di Indonesia jumlah UKM yang sangat besar tidak identik dengan sumbangannya yang besar terhadap pendapatan nasional (PDB) maupun bagi kesejahteraan pelaku ekonominya. Hal ini menandakan nilai tambah yang berhasil diakumulasikan oleh UKM masih sangat terbatas dibandingkan dengan usaha besar, sehingga kontribusinya kepada pendapatan nasional masih rendah.

Meski kontribusinya kepada pendapatan nasional masih rendah, namun bentuk usaha ini relatif lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Ini terbukti pada tahun 1997-1998 bentuk usaha ini lebih banyak dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 1997, usaha kecil menyerap tenaga kerja mencapai 57 juta orang. Jumlah ini meningkat menjadi 65 juta orang pada tahun 2001. Padahal pada periode tersebut

adalah priode krisis ekonomi terbesar yang pernah dialami oleh bangsa ini.

Para ekonomi biasanya menyebutkan lima keadaan yang memungkinkan industri kecil bertahan dari gempuran persaingan yang datang dari industri bersekala besar (Supratikno, et. al, 1994:26-27). *Pertama*, usaha kecil bergerak pada pasar yang terpecah-pecah. *Kedua*, usaha industri kecil menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi. Maksudnya jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, maka permintaan akan produk tersebut juga akan naik, bukan sebaliknya. *Ketiga*, usaha kecil memiliki tingkat hetrogenitas yang tinggi, khususnya heterogenitas teknologi yang bisa digunakan. *Keempat*, usaha industri kecil tergabung dalam suatu *cluster* (sentra indistri). *Kelima*, indutri usaha kecil diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-produk usaha kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh invansi-invansi produk industri bersekala besar.

Walupun begitu harus diakui bahwa industri kecil atau usaha kecil masih memiliki beberpa keterbelakangan, adapun beberapa ciri-ciri keterbelakangan usaha kecil secara umum

berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mitzerg, serta Musselman dan Hughes (Baswir, 1995:86), sebagai berikut; pertama, kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana. Kedua, struktur organisasi bersifat sederhana. Ketiga, jumlah tenaga kerja yang terbatas dengan pembagian kerja yang longgar. Keempat, kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Kelima, sistem akuntansi kurang baik bahkan kadang-kadang tidak memilikinya. Keenam skala ekonominya kecil sehingga sukar menentukan biaya. Ketujuh, kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas. Kedelapan, margin keuntungan sangat tipis.

Tentu saja, sebab keterbelakangan yang di tampilkan di atas hanya mengacu pada aspek internal usaha kecil dan belum menyentuh aspek eksternal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun penetrasi usaha besar yang menyumbat pasar. (*)

Nasib Nelayan di Negara Maritim¹⁴

Di luar sebutan sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Gugusan perairan yang luas dan panjangnya melebihi daratan, oleh karena itu Indonesia lebih cocok disebut sebagai Negara bahari dan seharusnya memusatkan segala kegiatan ekonominya pada sektor perikanan.

Sebagai negara maritim Indonesia memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km (terpanjang kedua setelah Kanada). Dari 67.439 desa di Indonesia kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir. Luas laut mencakup zona eksklusif, mencapai 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar tiga per empat dari seluruh wilayah Indonesia.

Sayang, sumber daya perairan yang melimpah tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah untuk mengurus sektor perikanan (dan kehidupan nelayan) secara

¹⁴ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

sungguh-sungguh. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek; *pertama*, Negara dengan telah sengaja mengabaikan sektor kelautan/perairan/perikanan sebagai basis ekonomi nasional. Walaupun sumber dayanya telah tersedia.

Kedua, Negara juga membiarkan sebagian sumber daya perikanan diserobot dan dikeruk oleh nelayan (usahawan) asing, yang setiap hari menjala dan menyedot ikan di perairan Indonesia lewat kapal-kapal besar dan modern. *Ketiga* akibat *kealpaan* Negara dalam mengurus masyarakat nelayan, sebageian besar nelayan di Indonesia bisa digambarkan sebagai komunitas yang hidup subsisten dengan pendapatan yang bukan kecil tetapi juga tidak menentu.

Kelas Sosial Nelayan

Pada dasarnya penggolongan sosial dalam masyarakat dan nelayan dapat di tinjau dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jarring, dll) struktur nelayan pemilik dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu, nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi, nelayan buruh hanya menyumbang jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak

yang sangat terbatas. Jumlah nelayan buruh lebih besar dibandingkan dengan nelayan pemilik.

Kedua, ditinjau dari skala investasi modal maka nelayan dibagi atas nelayan besar dan nelayan kecil. *Ketiga*, dipandang dari segi teknologi peralatan maka nelayan dibagi atas nelayan tradisional dan nelayan modern. Perbedaan perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkatan pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial-ekonomi.

Selain dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antar kelas di kalangan nelayan, faktor penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan juga dapat dilihat dari tiga faktor lainnya yaitu; *pertama*, faktor fluktuasi musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. *Kedua*, ketimpangan nisbah ekonomi antara pemilik kapal dan nelayan buruh. *Ketiga*, walaupun nelayan memperoleh hasil tangkapan yang relative banyak seperti pada musim ikan tetapi penghasilan habis untuk membayar utang dan hasil tangkapan juga dibeli dengan harga murah oleh pedagang pelantara. Tiga lapis penyebab kemiskinan dalam komunitas nelayan tersebut tentu saja lebih banyak bersifat structural sehingga menjadi semacam mata rantai eksploitasi, dalam artian dapat terjadi

akibat hubungan yang tidak asimetris antar pelaku ekonomi (nelayan pemilik modal, nelayan buruh dan pedagang pelantara).

Hal tersebut menjadi bukti ketika data yang dihimpun oleh Perhimpunan Pembangunan Nusantara (PPN) mengungkapkan seperempat dari seluruh total penduduk miskin yang berada di Indonesia adalah dari kelompok dan keluarga nelayan tradisional di pesisir, yaitu sebanyak 7,87 juta orang, atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang sebanyak 31,02 juta orang.

Ironisnya, Indonesia yang kaya akan potensi lautnya yang besar tetapi nasib para nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia, justru hidup miskin dan terpinggirkan dalam pembangunan yang selama ini lebih mengarah kepada daratan. Hal ini menunjukkan bahwa proses kemiskinan dalam komunitas nelayan terjadi bukan secara alamiah, misalnya kurangnya keterampilan, tetapi lebih disebabkan oleh masalah structural yang memperlihatkan kebijakan-kebijakan pemerintah secara politik dan ekonomi belum berpihak pada kepentingan nelayan.

Dalam keadaan ini mestinya negara hadir menyelamatkan kehidupan komunitas nelayan

dengan berbagai regulasi kebijakan yang membela kepentingan nelayan buruh sebab jumlah mereka merupakan mayoritas di antara nelayan di Indonesia. Tetapi nyatanya negara absen untuk menjadi pembela nelayan buruh sehingga struktur sosial-ekonomi nelayan tidak banyak berubah dari mulai dulu sampai kini. Nelayan buruh juga saat ini menempati level paling rendah dalam hal kesejahteraan ekonomi dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya di Indonesia.

Kebijakan Yang Kurang Tepat

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan mengadakan koperasi unit desa (KUD) untuk mempermudah nelayan dalam melaksanakan kegiatan operasional dan juga membantu petani dalam banyak hal seperti kredit kapal dll. Tetapi oprasi KUD masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa kelemahan yang bisa dilihat adalah; *pertama*, cara memberika kredit tidak sesuai dengan ritme kehidupan nelayan. Seperti KUD tidak memberika pinjaman kebutuhan hidup nelayan sehari-hari pada hal nelayan pendapatannya tidak menentu. Dengan kata lain KUD tidak menjamin kehidupan subsiten nelayan. *Kedua*,

pemberian bantuan kredit alat tangkap tidak sesuai dengan kondisi perairan yang ada. *Ketiga*, ketidakjujuran pelaksana di tingkat bawah.

Faktor lain yang menyebabkan KUD tidak berfungsi di komunitas nelayan adalah dikarenakan adanya pedagang pelantara yang kehadirannya sudah sangat lama. Pedagang pelantara tersebut bukan saja berfungsi sebagai penyedia modal bila nelayan tidak memiliki uang, tetapi dalam banyak kasus pedagang pelantara juga menjadi tulang punggung nelayan untuk membuka pasar perikanan di wilayah itu. Sebenarnya secara teoritis KUD bisa menggantikan pedagang pelantara tetapi kerana sifat KUD yang birokratis dan sebagian oknum aparat banyak melakukan tindakan manipulative, sehingga menyebabkan kehadiran KUD tidak diterima oleh komunitas nelayan.

Ada beberapa alasan untuk menjelaskan fenomena tersebut. *Pertama*, tidak seperti komunitas miskin lainnya, kelompok nelayan tinggal biasanya tinggal di wilayah yang sangat terpencil sehingga sulit untuk diakses oleh masyarakat luar termasuk akitivitas LSM dan pemerintah. *Kedua*, dinamika kehidupan nelayan jarang di ekspos oleh media masa sehingga persoalan yang mengemuka dalam

komunitas itu tidak muncul ke permukaan. *Ketiga*, tragis baru pada tahun 1999 setelah reformasi Departement Kelutan dan Perikanan dipisahkan dari Department Pertanian. Sehingga baru pada masa itu sektor perikanan mendapatkan perhatian yang memadai oleh pemerintah.

Penutup

Meski pemerintahan Jokowi-JK telah memiliki visi pembangunan berbasiskan kelautan dengan kebijakan poros maritime dan tol lautnya. Namun kita harus tetap jeli melihat apakah kebijakan ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengatasi permasalahan-permasalahan kelautan yang selalu hadir secara terstruktur. Apalagi sampai saat ini kinerja pemerintahan di bawah naungan Jokowi-JK dinilai masih belum maksimal dan belum mampu mewujudkan harapan-harapan rakyat khususnya mereka yang berada jauh dari pusat kekuasaan seperti nelayan tradisional. (*)

Dilema (Ekonomi) Petani di Negara Agraris¹⁵

Tidak ada kegiatan ekonomi di Indonesia yang sesuram sektor pertanian. Sepanjang tahun, jika musim kemarau tiba pasti terjadi kekeringan panjang dan apabila musim hujan menjelang pasti panen gagalkarena terendam oleh banjir. Peminggiran pembangunan sektor pertanian yang dilakukan selama 30 tahun telah menempatkan para pelaku disektor pertanian (petani) dalam kondisi yang hampir sekarat.

Di luar angka-angka yang ditunjukkan dalam statistik pertanian selama ini, misalnya fluktuasi ekspor-import, pertumbuhan negatif, dan penurunan produktifitas. Sesungguhnya sektor pertanian mengalami pembusukan yang akut. Istilah yang lebih tegas untuk ini dapat dikatakan petani sebagai seorang yang selalu kalah.

¹⁵ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

04 Agustus 2015

Bentuk kekalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*; kekalahan yang selalu datang dari alam. Kekalahan ini disebabkan oleh ketidak mampuan petani dalam memprediksi cuaca. Apalagi mengingat kondisi alam sekarang yang sudah mengalami pemanasan global sehingga tidak dapat diprediksi lagi kapan waktunya musim kemarau dan kapan waktunya musim hujan. Harus diakui bahwa ketergantungan petani terhadap alam membuat petani menciptakan ancaman tersendiri di dalam tubuhnya atau dirinya sendiri.

Kedua; terbentuknya masyarakat tani modern yang tergabung dalam suatu kelembagaan yang sangat dekat dengan sistem dan kekuasaan politik. Sehingga telah membuka babak baru dimana buruh tani tergantung kepada majikan. Sehingga mengenai penjualan produk pertanian dan penawaran harus tergantung oleh lembaga tersebut yang selalu menjadi ancaman bagi petani karena selalu di rekayasa oleh praktik ekonomi makro.

Ketiga; ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas malah tidak tercapai, ternyata malah sebaliknya ilmu pengetahuan dan teknologi malah

menjadi dominasi baru yang tak kalah menindas.

Efek Pembangunan Setelah 30 Tahun

Harus diakui bahwa negara ini berdiri diatas realitas yang tidak mungkin dihindari, sebagian besar rakyatnya bekerja dan mencari nafkah di sektor pertanian. Dengan deskripsi tersebut sudah barang tentu pendapatan negara juga mayoritas dihasilkan oleh sektor pertanian. Ambil saja contoh tahun 1971, ketika pembangunan ekonomi mulai dijalankan secara sistematis, pada tahun tersebut kontribusi pertanian terhadap pembentukan pendapatan nasional (produk domestic bruto) mencapai 44,8% atau hampir separuh dari pendapatan nasional. Sumbangan tersebut lebih banyak dari pada industri manufaktur yang menyumbang cuma sebesar 8,4% terhadap penciptaan pendapatan nasional.

Ditinjau dari aspek pemberian kesempatan kerja yang diciptakan, sektor pertanian menyaerap porsi tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi, yakni mencapai 64% sementara industri manufaktur hanya menyumbang 6,5%.

Namun gambaran tersebut berubah cukup drastis ketika pembangunan berlangsung

selama 30 tahun kemudian. Pada tahun 2001, misalnya, secara umum peta penyerapan tenaga kerja tidak mengalami perubahan secara berarti, dimana sektor pertanian menyerap tenaga kerja 43,8% dan hanya menyumbang pendapatan nasional sebesar 17,0%. Sebaliknya sektor industri manufaktur menyumbang PDB sebesar 25% tetapi hanya menyerap tenaga kerja 13,3%. Dengan mudah dapat disimpulkan bahwa selama 30 tahun pembangunan ekonomi dikerjakan secara besar-besaran di Indonesia, lewat strategi industrialisasi, ternyata hanya mementingkan sektor industri dan meninggalkan sektor pertanian yang nyaris karam.

Industrialisasi yang dicanangkan tidak menepatkan sektor pertanian sebagai pemainnya, sehingga pendapatan yang disumbangkan sektor ini merosot dari tahun ketahun. Celakanya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini masih cukup banyak. Sebaliknya sektor industri yang menyumbang terhadap PDB terus meroket tetapi tidak mampu menyerap tenaga kerja. Sehingga pendapatan nafkah petani terus berkurang sedangkan pendapatan nafkah pekerja industri cukup baik.

Penurunan Jumlah

Pada tahun 2013 lalu, BPS melalui Sensus Pertanian mencatat terjadi penurunan jumlah rumah tangga pertanian dari 31,17 juta pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta (atau 11% dari penduduk Indonesia) pada tahun 2013. Ironisnya, pada periode tahun yang sama (2003-2013) terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Di mana pada tahun 2003 ada 4.011 perusahaan dan pada tahun 2013 naik menjadi 5.486 perusahaan.

Fakta lain yang bisa dilihat dari Sensus Pertanian BPS adalah semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah. Dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta (61,5) di antaranya tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut buruh tani di tanah-tanah petani lain, maupun menjadi buruh di perusahaan-perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar.

Hal ini yang kemudian menjadikan lokasi bermukimnya petani selalu menjadi kantong-kantong kemiskinan. Bagi mereka –kaum tani– yang tidak sanggup lagi mengelola lahan pertaniannya dengan berbagai alasan, lebih memilih untuk menjual lahan pertaniannya kepada pengembangan. Penyusutan lahan

pertanian dari tahun ke tahun inilah yang menjadi bukti abainya pemerintah dalam menyikapi persoalan petani selama ini.

Penutup

Persoalan penguasaan lahan yang semakin timpang tersebut, menjadikan rumah tangga petani kecil sudah dapat dianggap beruntung kalau hasil dari pertanian cukup untuk menutupi ongkos produksi. Bahkan pada beberapa kasus sebenarnya menggarap lahan yang sempit itu banyak ruginya. Akhirnya petani terpaksa atau harus mencari sumber pendapatan tambahan di luar sektor pertanian (*off-farm*). Langkah ini merupakan *acrobat* yang dilakukan oleh petani karena kehidupan mereka yang subsisten.

Bahkan perkembangan terbaru menunjukkan struktur pendapatan petani tersebut sudah semakin variatif. Artinya proposi pendapatan *off-farm* lebih besar (dalam banyak kasus) ketimbang dari kegiatan sektor pertanian (*on-farm*). Studi yang dilakukan oleh Reardon et. al. menemukan proposi pendapatan dari aktifitas di luar sektor pertanian mencapai 42% pada rumah tangga pedesaan di Afrika, 40% di Amerika Latin, dan 32% di Asia.

Di Indonesia khususnya di dua Kabupaten Malang, ternyata hampir 80% pendapatan rumah tangga petani kecil berasal dari kegiatan diluar sektor pertanian (*non-from*). Pekerjaan *non-from* itu antara lain menjadi kuli bangunan, ojeg, membuka toko, sektor informal, dan lain sebagainya (Yustika, 2003). Jadi secara formal pekerjaan mereka adalah petani, tetapi secara faktual mereka tidak lagi hidup disektor pertanian (*on-from*). Dalam katagori seperti ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi “masyarakat petani” yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan tersebut. (*)

Depedensi¹⁶

Ketergantungan atau dalam istilah lain disebut dengan *depedensi*. Istilah ini sebenarnya lebih mengacu pada teori pembangunan yang dikembangkan pada akhir tahun 1950an oleh Raul Presihich. Awal mula teori ini mengkritik pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tidak memberikan efek positif bagi negara-negara dunia ketiga. Bahkan terkadang pertumbuhan ekonomi di negara maju sering membawa masalah-masalah ekonomi di negara dunia ketiga.

Inti dari teori ini adalah ketergantungan yang antara negara-negara dunia ketiga (kawasan asia dan afrika serta amerika latin) terhadap negara-negara maju (di beberapa kawasan asia seperti china, jepang dan negara-negara eropa serta amerika). Akibatnya secara sosiologi, masyarakat yang berada pada negara-negara dunia ketiga juga mengalami ketergantungan yang besar terhadap masyarakat negar-negara maju.

¹⁶ Diterbitkan Pertamakali di Medan Bisnis,

07 September 2015

Pola ketergantungan ini kemudian semakin terasa dan seolah tidak dapat ditolak di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Kekuatan globalisasi dan perdagangan bebas lintas negara membuat negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi-politik yang memadai harus terjebak pada ketidakadilan pasar.

Hal ini bisa dilihat dari kondisi ekonomi Indonesia hari ini. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sempat menembus angka Rp.14.000, ternyata banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Satu diantaranya adalah menguatnya nilai dolar setelah pemulihan ekonomi Amerika Serikat pasca krisis tahun 2008. Ironisnya penguatan dolar ini juga terjadi terhadap seluruh mata uang negara-negara di dunia sehingga berpengaruh pada neraca perdagangan global.

Efek ini dirasakan langsung terhadap perdagangan komoditas Indonesia yang dalam lima tahun ini terus menurun. Tiga komoditas utama Indonesia yang mengalami penurunan dalam lima tahun ini adalah; batu bara yang turun 38 persen, dari 1,2 juta/ton menjadi 776 ribu/ton. Kemudian disusul oleh minyak kelapa sawit yang turun 22 persen dari 11 ribu/kg menjadi 8 ribu/kg. Sedangkan untuk komoditas

karet juga mengalami penurunan yang lebih signifikan yaitu 71 persen, dari 57 ribu/kg menjadi 16 ribu/kg.

Turunnya harga komoditas inilah yang membuat kinerja ekspor Indonesia semakin menurun. Idealnya, ketika rupiah mengalami penurunan, kinerja ekspor harus ditingkatkan. Akan tetapi kinerja ekspor malah mengalami penurunan karena ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas barang yang sedang mengalami keanjlokan dalam permintaan dan harga.

Sulit

Sulit memang untuk dapat melepas ketergantungan yang semakin menjadi di era globalisasi dan pasar bebas hari ini. Tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki ikatan perdagangan. Namun hanya saja ikatan perdagangan itu tidak selamanya menguntungkan. Pola hubungan dagang yang merugi selalu saja ditunjukkan pada hubungan antara negara industri maju dengan negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang.

Biasanya, negara-negara dunia ketiga mengeksport komoditi mentah dengan harga murah untuk diolah menjadi produk siap pakai oleh negara-negara industri. Hasil olahan ini kemudian dijual kembali ke negara-negara

dunia ketiga dengan harga yang jauh lebih mahal. Hasil hubungan dagang inilah yang membuat negara-negara ketiga selalu saja dirugikan.

Pada kondisi inilah, Indonesia harus segera berbenah diri di tengah usia ketujuh puluh tahun. Pembenahan pada sektor industri dianggap menjadi hal yang penting. Industri yang mandiri harus bisa diciptakan. Sebab selama ini, meskipun banyak industri yang telah berkembang di Indonesia namun industri-industri tersebut masih sebatas industri yang bersifat sebagai “tukang jahit”, di mana seluruh bahan bakunya masih harus didatangkan dari luar negeri.

Misalnya saja, untuk industri tekstil -khususnya dengan jenis katun -kita masih harus mengimport kapas sebagai bahan baku utama pembuatan katun. Tidak tanggung-tanggung import kapas pada industri tekstil dengan jenis katun ini mencapai 99,2 persen dari semua kebutuhan kapas nasional pertahun.

Itu sebabnya, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat mengatakan, rupiah yang telah menyentuh angka Rp.14.000 per dolar AS tentu akan memberatkan industri tekstil yang membeli bahan bakunya

memakai dolar AS. Menurutnya hal ini akan semakin terasa memberatkan jika industri tekstil yang ada hanya berorientasi pada pasar dalam negeri. Sebab penjualannya akan menurun diakibatkan daya beli masyarakat yang melemah dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder seperti tekstil.

Akhirnya, di tengah anjloknya nilai tukur rupiah terhadap dolar, tidak ada pilihan lain bagi pengusaha industri tekstil yang berorientasi pasar lokal selain menutup industrinya atau mengurangi jam kerja. Efek yang ditimbulkan pasti adalah pengurangan upah kerja atau bahkan PHK bagi buruh tekstil.

Industri tekstil masih menjadi satu contoh kasus di antara banyak industri yang memiliki ketergantungan import terhadap bahan baku produksi mereka. Efek ketergantungan ini yang sesungguhnya membahayakan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sebab sedikit saja kondisi eksternal mengganggu, mulai dari kenaikan dolar atau produksi komoditas yang mengurang pasti akan mengganggu ekonomi Indonesia.

Kita tentu ingat bagaimana kasus naiknya tempe dan tahu yang disebabkan keterbatasan produksi kedelai di Amerika. Persoalan ini hanya disebabkan oleh sebab petani kedelai di sana tidak masuk musim panen. Hal-hal seperti ini sangat rentan mengganggu ekonomi kita, bahkan dalam kasus daging sapi beberapa bulan terakhir ini.

Gejolak Sosial

Kondisi ekonomi, baik berupa inflasi dan deflasi yang menyebabkan krisis ekonomi secara berkesinambungan tentu akan mengundang gejolak sosial di tengah masyarakat. Sejarah tentu mengingatkan kita tentang jatuhnya dua rezim (orde lama dan orde baru) yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di sini jelas, bahwa ekonomi menjadi satu faktor dominan yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan politik di satu negara.

Itu sebabnya beberapa pengamat ekonomi menyebutkan bahwa ekonomi itu merupakan hasil interaksi spontan jutaan manusia. Ia bisa menghasilkan banyak hal, baik itu gejolak sosial dan atau gejolak politik. Persoalannya kini, bagaimana kita menyikapi reaksi dan aksi dari

actor-aktor ekonomi yang dapat mengundang atau bahkan menciptakan gejolak sosial.

Pada persoalan inilah kita membutuhkan peran penting negara melalui pemerintahan. Apakah dapat menjaga stabilitas tersebut atau tidak. Dan itu semua tergantung bagaimana pemerintah dan rakyat memaknai krisis ekonomi yang ada. Apakah dimaknai sebagai titik balik untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Meski rata-rata kita lebih sering memaknai krisis sebagai suatu hal yang bersifat kemelut yang dapat menimbulkan kekacauan.

Penutup

Sekali lagi, kehidupan global dengan model perdagangan pasar bebas membuat banyak negara tidak bisa melepaskan diri dari efek ketergantungan (*depedensi*) terhadap negara lainnya. Hanya saja, ketergantungan di sini harusnya tidak dimaknai secara berlebihan. Sebab jika ketergantungan terhadap negara lain itu muncul secara berlebihan, maka prinsip kemandirian negara secara ekonomi akan hilang.

Itu sebabnya, setiap negara harus mempunyai produksi-produksi andalan yang dapat menguasai pasar dunia. Sehingga negara tersebut menjadi sandaran bagi banyak negara

lain. Kini, pertanyaan itu harus yang harus kita tanya ke dalam diri sendiri (baca; pemerintah), produk andalan apa yang sekarang kita miliki dan dapat kita andalkan di pasar dunia? (*)

Virus n-Ach dan (Aplikasi) Proyeksi Ekonomi Kita¹⁷ ...

Rabu pekan lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama. Dalam paket kebijakan ini, tercatat ada tiga langkah penting yang harus dilakukan. Pertama; mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Kedua; mempercepat proyeksi strategi nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategi nasional. Ketiga; meningkatkan investasi di sektor property.

Tiga langkah tersebut kemudian dirincikan kedalam sepuluh poin. Pertama; penguatan pembiayaan ekspor melalui *National Interest Account*. Kedua; penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri. Ketiga;

¹⁷ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

19 September 2015

kebijakan pengembangan kawasan industri. Keempat; kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi. Kelima; kebijakan simplikasi perizinan perdagangan. Keenam; kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata. Ketujuh; kebijakan elpiji untuk nelayan. Kedelapan; stabilitas harga komoditi pangan khususnya daging sapi. Kesembilan; melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan seperti; percepatan pencairan dana desa serta mengarahkan penggunaan dana desa. Kesepuluh; pemberian Beras Miskin (Raskin) atau Beras Kesejahteraan (Rasta) untuk bulan ke-13 dan ke-14.

Dari kesepuluh rincian poin tersebut, terdapat empat poin yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat miskin, yakni; menjaga stabilitas harga komoditi pangan khususnya daging sapi, mempercepat pencairan dana desa dan pembangunan desa, kemudian pemberian beras miskin serta kebijakan elpiji untuk nelayan. Empat poin ini menjadi kebijakan yang dianggap tepat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam janga pendek dan dapat membantu mengcover kebutuhan rakyat miskin pada saat krisis ekonomi seperti ini.

Sedangkan enam kriteria lainnya dapat dikategorikan sebagai kebijakan ekonomi makro yang membutuhkan kerja jangka panjang dan dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh rakyat banyak. Begitupun, keseluruhan isi dari paket kebijakan pemerintahan ini patut untuk diapresiasi di tengah arus kerisis ekonomi yang semakin dilematis.

Nah, kini, paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini tinggal menunggu aplikasinya saja di lapangan. Apakah dapat berjalan secara maksimal atau malah menjadi belunder yang malah dapat membahayakan perekonomian nasional.

Deregulasi, cukupkah?

Pembangunan selama ini memang cenderung menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi. Sebab keberhasilan pembangunan di satu negara selalu saja ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Konon katanya, dalam sebuah kajian ekonomi, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan dapat membuka 2.000 lebih lapangan pekerjaan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, satu persen pertumbuhan ekonomi kita mampu menyerap 400.000 tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi inilah yang kemudian harus diciptakan

kembali oleh pemerintah di tengah arus PHK yang begitu massif di industri kita saat ini.

Karena itu, melakukan stimulus terhadap industri dengan memberikan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah bagian dari usaha agar dapat terus menjaga kondusifitas roda industri, dan hal ini mendapatkan aspirasi pengusaha dengan berjanji akan *all out* membantu pemerintah memacu gerak ekonomi yang melambat.

Namun apakah hal tersebut cukup? Tentu saja tidak, jika tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat hilir seperti mengeluarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari kementerian terkait. Hal ini yang sebenarnya bersifat mendesak untuk dilakukan dan butuh semangat serta motivasi *ekstra* untuk melakukan tugas berat ini.

Virus n-Ach

David Mc-Clelland seorang ahli psikologi sosial dalam bukunya *The Achievement Motif in Economic Growth*, mengatakan bahwa perubahan sosial pada tingkat makro (masyarakat) ditentukan oleh perubahan pada tingkat mikro (individu) seperti perubahan dalam cara berpikir dan bersikap yang menyangkut norma dan sistem nilai. Norma dan nilai hidup ini yang

menjadi pembeda antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Satu diantara beberapa nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat modern adalah berorientasi pada masa depan dan tidak berorientasi pada masa lalu.

Pada titik inilah dibutuhkan motivasi untuk berprestasi. Motivasi inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk mengeksplotasi peluang untuk meraih kesempatan. Motivasi inilah yang kemudian disebut dengan *need for Achievement* atau yang dikenal dengan istilah n-Ach. n-Ach di sini diartikan sebagai nafsu untuk bekerja secara baik dengan mengesampingkan pengakuan sosial atau gengsi. Tetapi lebih kepada dorongan berkerja demi memuaskan batin dari dalam diri. Bagi mereka yang mempunyai dorongan n-Ach yang tinggi akan bekerja lebih keras dan lebih giat tanpa diikuti oleh motif dan iming-iming apapun.

Nah kini, kita patut bertanya, seberapa besar “virus n-Ach” yang dimiliki oleh pejabat negara, pengusaha dan masyarakat kita untuk dapat mengatasi krisis ekonomi ini secara bersama-sama? Sebab jika motivasi dan semangat untuk mengatasi persoalan ini rendah atau sama sekali tidak ada, maka jangan pernah berharap perbaikan ekonomi dari paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Semangat dari “virus n-Ach” inilah yang sekarang sesungguhnya sedang kita perlukan. Jika langkah untuk pemulihan ekonomi semakin lama terwujud, maka persoalan yang akan dihadapi semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi di atas 5% harus segera genjot untuk dapat menurunkan angka pengangguran. Ratusan ribu orang akan bekerja dan memiliki penghasilan, dengan demikian roda ekonomi secara mikro akan berjalan normal kembali. Konsumsi masyarakat akan mengingkat dan gairah pasar –dengan banyaknya permintaan barang dan jasa –akan kembali terjadi.

Jika ini terjadi maka pajak dari dunia industri dan usaha lainnya dapat dihimpun secara maksimal. Sebab, penghimpunan pajak hingga 31 Agustus 2015 terbilang cukup rendah yakni hanya terealisasi Rp 592,57 triliun atau sekitar 45,76% dari target sebesar Rp 1.249,7 triliun. Jika penerimaan pajak gagal terdongkrak menjelang tutup tahun, maka pemerintah akan mendapat pekerjaan tambahan yakni mencari utangan baru untuk menambal kekurangan dana APBN. Menambah utang, berarti menambah beban negara di masa yang akan datang (Medan Bisnis; Sabtu, 12/09/2015).

Penutup

Sejak masa lalu kita memang selalu terjebak dengan pola hutung setiap kali krisis ekonomi terjadi. Hal ini terus-terusan menjadi beban negara dan pemerintah yang ada. Untuk itu, kini, kita butuh semangat kerja keras dan kerja cerdas dengan mempercepat semua proses regulasi yang diperlukan. Namun begitupun, jangan sampai keinginan untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi terjebak pada kepentingan pengusaha saja dengan memberikan kebebasan yang akhirnya dapat menerobos semua peraturan yang ada.

Untuk itu sekali lagi, “virus n-Ach” harus segera dikembangkan di dalam diri setiap pejabat negara. Jangan sampai, paket kebijakan yang telah dikeluarkan hanya menjadi rekomendasi *semu* yang tidak bisa diaplikasikan di lapangan. Dan pada saat inilah kabinet kerja yang dibentuk oleh Presiden Jokowi harus menunjukkan kinerjanya secara nyata. Bukankah itu yang selama ini kita tunggu? (*)

Menyongsong Pembangunan Global Berbasis SDGs¹⁸

Tidak terasa, agenda tujuan pembangunan milenium yang terangkum dalam Millenium Development Goals (MDGs) dalam waktu dekat akan segera usia. Selama lima belas tahun –sejak September tahun 2000 sampai 2015 –sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan program tersebut dengan target utamanya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015.

Target tersebut kemudian dijabarkan dalam delapan butir tujuan pembangunan yaitu; *pertama*, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dengan target utama adalah mengurangi sampai setengah jumlah penduduk dunia yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dollar perhari dan mengurangi sampai

¹⁸ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

05 November 2015

setengah jumlah penduduk yang kelaparan. *Kedua*, mewujudkan pendidikan dasar bagi semua dengan menjamin agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Poin *ketiga*, mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan dengan cara menghapus ketidaksetaraan jender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan di semua tingkatan pendidikan pada tahun 2015. *Keempat*, mengurangi tingkat kematian anak dengan indikator keberhasilan mengurangi dua pertiga dari angka tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun. *Kelima*, meningkatkan kehatan ibu dengan indikator pencapaian mengurangi tiga perempat dari angka tingkat kematian ibu, terkhusus akibat melahirkan.

Selanjutnya poin *Keenam*, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya dengan cara menghentikan dan mengurangi laju penyebaran penyakit menular tersebut. *Ketujuh*, menjamin kelestarian lingkungan, dengan meningkatkan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program tingkat nasional, mengurangi kerusakan sumber daya alam. Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses kepada air

bersih yang layak minum dan berhasil meningkatkan kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020. Terakhir poin *kedelapan* adalah mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Delapan poin pembangunan millennium memiliki beberapa indikator keberhasilan di dalamnya. Di mana dari beberapa indikator tersebut, ada yang berhasil dicapai ada juga yang belum berhasil dicapai oleh pemerintah atau dengan istilah lain dapat dikatakan harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini didasarkan pada draf laporan singkat pencapaian tujuan pembangunan millennium di Indonesia tahun 2014 yang di dalamnya tercatat ada 14 indikator telah tercapai, 36 indikator menunjukkan kemajuan signifikan dan 13 indikator yang masih diperlukan kerja keras untuk dapat tercapai.

Indikator Yang Belum Tercapai

Adapun 13 indikator yang belum dapat tercapai dan membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya adalah; *pertama*, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. *Kedua*, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. *Ketiga*; angka kematian

Balita per 1000 kelahiran hidup. *Keempat*; angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. *Kelima*; angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup.

Keenam; Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0,46 persen pada tahun 2014. *Ketujuh*; proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. *Kedelapan*; Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan. *Kesembilan*; Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂). *Kesepuluh*; Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati kawasan hutan. *Kesebelas*; Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. *Keduabelas*; Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN (Kepadatan Fasilitas Telepon per Jumlah Penduduk). *Ketigabelas*; Proporsi rumah tangga dengan akses internet.

Tiga belas indikator inilah yang menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk dapat diselesaikan pada akhir tahun 2015 sebelum masuk pada model pembangunan global berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs). Di mana SDGs akan menggantikan

program dari MDGs setelah berjalan selama lima belas tahun.

SDGs

Isu pembangunan global pasca MDGs memang sudah dibahas sejak tahun 2012 lalu pada KTT Rio+20 yang menghasilkan dokumen “The Future We Want”. Pada dokument inilah SDGs dicantumkan berserta arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu; Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan.

Berdasarkan dokument tersebut maka SDGs harus memenuhi empat prinsip yaitu; *Pertama*; tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs. *Kedua*; mempertimbangkan kondisi, kapasitas dan prioritas masing-masing negara. *Ketiga*; Fokus pada pencapaian ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan (pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan). Terakhir koheren dan terintegritas dengan pembangunan pasca 2015.

Selain itu, hal mendasar yang membedakan antara MDGs dan SDGs adalah pembangunan yang terangkum dalam SDGs jauh lebih luas dibandingkan dengan program pembangunan

yang ada di dalam MDGs. Di mana di dalam SDGs tertera 12 *illustrative* goals yang memuat sejumlah isu baru seperti; pengadaan lapangan kerja yang layak, ketahanan energy, pangan dan gizi. Air dan sanitasi, *good government* dan institusi yang efektif, *rule of law*, masyarakat yang stabil dan damai, *global enabling environment* dan *catalyze long term finace*.

Sedangkan untuk kasus kehutan akan tetap mendapatkan perhatian yang lebih. Terkhusus pada SDGs ini persoalan tentang luas tutupan hutan telah tercantum pada tujuan atau poin kesembilan dengan istilah *Manage Natula Resources Assests Sustainably*. Pada poin inilah pemerintah harus serius khususnya dalam model perencanaan pembangunan yang dapat diarahkan pada usaha pembangunan keberlanjutan (*Subtaineble Development*) dengan mengedepankan semangat pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Namun ironisnya, usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap melakukan perlindungan lingkungan dinilai sama sekali tidak tampak. Kasus kebakaran hutan di sumatera dan Kalimantan yang menimbulkan asap tebal hampir di setengah wilayah indonesia menjadi

bukti akan hal tersebut. Apalagi nawacita yang selama ini menjadi agenda prioritas pembangunan ternyata sama sekali tidak mencantumkan persoalan perlindungan lingkungan. Padahal kabut asap, banjir dan tanah longsor adalah persoalan tahunan yang muncul dari akibat dekadasi lingkungan dan kita tidak pernah memperhatikan hal tersebut.

Penutup

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyebutkan, jumlah luas kebakaran hutan tahun ini mencapai 2.089,911 hektar. Angka tersebut diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan sejak 21 Juni - 20 Oktober 2015. Data ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa kita sudah kehilangan ribuan hektar lahan terbuka hijau yang tentunya dapat berdampak pada kondisi alam dan juga kondisi generasi mendatang. (*)

Negeri Serba Darurat¹⁹

Tragedi yang menimpa gadis berusia 14 tahun bernama Yuyun beberapa waktu lalu di Bengkulu menyita banyak perhatian, baik dikalangan masyarakat, pemerintah dan bahkan dunia internasional. Media-media di Australia, India, Inggris, Amerika dan Kanada menjadikan kasus pemerkosaan bergilir dan pembunuhan yang dilakukan oleh empat belas anak dan remaja –yang masih pelajar –terhadap Yuyun sebagai berita utama.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla-pun tak mau ketinggalan untuk ikut mengecam keras tragedi yang menimpa Yuyun ini. Presiden melalui akun twitternya bahkan meminta agar pelaku ditangkap secepatnya dan dihukum seberat-beratnya. Di akhir twitt-nya Jokowi meminta agar perempuan dan anak-anak harus dilindungi dari kekerasan.

Apa yang diminta oleh presiden melalui akun twitter-nya agar melindungi perempuan dan anak dari kekerasan tentunya patut untuk didukung. Apalagi catatan dari Komnas

¹⁹ Pertamakali Diterbitkan di Harian Waspada, Jum'at ,13 Mei 2016.
Hlm B9

Perempuan pada tahun 2016 menunjukkan kasus kekerasan seksual pada perempuan berada di peringkat kedua dengan jumlah kasus mencapai 2.399 atau sekitar 72 persen sedangkan pencabulan mencapai 601 kasus atau 18 persen.

Selain itu, untuk data kasus kekerasan terhadap anak yang dicatat oleh lembaga perlindungan anak sepanjang tahun 2010-2014 tercatat dari 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak, 58 persen masuk dalam katagori sebagai kejahatan seksual. Sisanya, berupa kekerasan fisik, penelantaran dan lain sebagainya. Dengan adanya data-data tersebut di atas, membuat Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Indonesia saat ini berstatus darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Penetapan status darurat ini menjadi yang kesekian kalinya dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah juga menetapkan negeri ini dalam status darurat terhadap narkoba, pornografi dan korupsi. Dengan banyaknya penetapan status darurat tentunya membuat kita bertanya-tanya, sudah "parah" itukah negeri ini? Adakah yang salah dengan pola hubungan antar individu di negari ini? Sehingga setiap kali masalah yang hadir selalu

saja berefek seperti “gunung es” yang hanya tampak sedikit di permukaan tetapi sangat besar dan mengakar di lapisan bawah.

Saat ini hampir semua kehidupan sosial yang menghubungkan pola-pola interaksi di dalam masyarakat terasa menjadi begitu menakutkan. Anak-anak tidak lagi mendapatkan lingkungan sosial yang nyaman, sebab hampir setiap aktifitas keseharian mereka berpotensi untuk menimbulkan tindakan kekerasan, pemerkosaan dan *trafficking*.

Begitu juga di kalangan perempuan, hampir setiap hari kita bisa menemukan berita-berita – di koran kriminal –terkait masalah pemerkosaan dan KDRT yang dialami oleh perempuan. Sedangkan dikalangan anak dan remaja laki-laki, efek peredaran narkotika, miras dan video/film/situs porno membuat perilaku anak dan remaja laki-laki menjadi begitu tidak terkontrol.

Ironisnya, hampir semua analisis pengamat – baik itu pengamat sosial, psikologi dan kriminologi –selalu saja menempatkan keluarga sebagai sumber munculnya masalah sosial di tengah masyarakat. Keluarga telah dianggap *disfungsi* dalam menjalankan perannya di antara struktur sosial lainnya. Tetapi kita tidak pernah

menyelidiki mengapa keluarga sebagai satu bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi penting dalam proses sosial menjadi tidak berfungsi lagi?

Pertanyaan itulah yang penting untuk kita jawab secara bersama-sama, sehingga dalam mengatasi persoalan sosial yang begitu rumit dan beragam ini tidak lagi hanya diselesaikan pada tataran hilir saja dengan memberikan sanksi dan hukuman kepada para terdakwa. Jika pola-pola seperti ini masih terus dipertahankan maka persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat -baik itu persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan, korupsi, pornografi dan narkoba -tidak akan pernah selesai.

Keluarga Kita

Fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat tidaklah muncul secara tunggal. Ia selalu memiliki kaitan dengan kondisi atau fenomena-fenomena lainnya. Sebagai fenomena sosial, kekerasan terhadap anak dan perempuan tentunya tidak hadir secara tiba-tiba (tunggal), kehadirannya tentu dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari faktor pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial yang tidak terkontrol dan tidak berperannya keluarga secara utuh.

Fungsi keluarga pada masyarakat pedesaan dan perkotaan dinilai sudah mulai berkurang saat ini. Rutinitas kedua orang tua –ayah dan ibu – yang banyak menghabiskan waktu bekerja pada sektor publik membuat fungsi pendidikan di dalam keluarga semakin berkurang. Selain itu, fungsi *afektif* yang merupakan sarana untuk mempertahankan kestabilan kepribadian dan pemenuhan kebutuhan psikologi dan spiritual bagi setiap anggota keluarga saat ini telah luntur.

Naiknya kebutuhan barang pokok memaksa banyak keluarga untuk meningkatkan pendapat ekonomi. Pendapatan ekonomi dinilai menjadi standart yang paling penting untuk dapat memenuhi segala kebutuhan fisik atau materi bagi setiap anggota keluarga. Efeknya, kini, keluarga hanya menjadi tempat penyaluran kebutuhan biologi (seks) dan pemenuhan kebutuhan fisik –materi –semata. Itulah realitas dari keluarga kita hari ini.

Berkurangnya fungsi afeksi dan pendidikan inilah yang kemudian membuat anak mencari tempat baru (kelompok) yang ia anggap nyaman dengan dirinya dan dapat menyalurkan eksistensinya. Penyaluran eksistensi tersebut sangat beragam, mulai dari mabuk dan sakau bersama (baik yang dihasilkan dari efek miras,

nyabu, ganja atau bahkan efek lem), nongkrong di sudut-sudut gang atau di tempat sunyi, dan nonton video/film porn secara bersama dengan kelompok yang mereka bentuk.

Ini adalah fakta dari kehidupan sosial anak dan remaja kita hari ini. Kondisi ini makin diperparah dengan sikap acuh tak acuh dari keluarga –yang pada posisi ini diwakili oleh ayah, ibu, dan saudara kandung –sehingga aktifitas sosial mereka sehari-hari tidak lagi dapat terkontrol dengan baik, masyarakat juga melakukan hal yang sama dengan bersikap apriori (masa bodoh). Fakta ini tidak akan bisa kita bantah, karena hal ini menjadi realitas sehari-hari yang sangat mudah kita temui.

Variabel Lain

Selain *disfungsi* keluarga, variabel lain yang bisa menjelaskan munculnya fenomena pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah berkembangnya budaya populer yang tidak dapat dibendung oleh nilai dan budaya lokal sehingga memunculkan efek geger budaya.

Jika kita mau jujur, sesungguhnya perilaku anak dan remaja kita saat ini –baik laki-laki dan perempuan –sudah di luar batas nilai dan moral masyarakat Indonesia. Saat ini kita sangat

mudah menemukan hotel-hotel yang bisa dijadikan tempat mesum bagi anak-anak atau remaja. Tidak hanya hotel, akses mereka terhadap diskotik –yang kini mulai menjamur – juga semakin mudah. Sehingga perilaku-perilaku amoral –seperti berhubungan seks di luar nikah –sangat mudah terjadi.

Hanya dengan mengatas namakan “cinta”, pelajar-pelajar kita baik yang masih anak-anak dan remaja dengan mudah melepaskan keperawanannya dan keperjakaannya. Itu jika mereka punya pacar, jika tidak, mereka bisa memakai jasa pekerja seks komersial (PSK) yang bisa dibayar sesuai dengan kemampuan kantong masing-masing. Dan PSK-PSK ini sangat mudah untuk ditemui, baik dijalanan, diskotik atau bahkan di sekolah dan di kampus-kampus. Mereka bekerja dengan jaringan yang luas. Tak jarang, transaksinya juga dilakukan secara online dengan bantuan media sosial. Kondisi ekonomi selalu menjadi faktor dominan kemunculan PSK. Sayangnya, kebanyakan dari PSK itu kini adalah mereka yang berstatus ABG (baca: anak baru gede). Dan itu mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan material agar tampak lebih glamor, ironis bukan?

Dengan realitas sosial anak dan remaja tersebut, kemudian muncul pertanyaan

bagaimana dengan anak atau remaja yang tidak memiliki pacar dan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses atau memakai jasa PSK? Sedangkan akses anak dan remaja saat ini terhadap pornografi sangatlah *massif*. Asumsinya, secara logika, hasrat seksual yang tumbuh tersebutlah kemudian disalurkan dengan aktifitas pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban yang dianggap lemah.

Anda boleh saja menolak asumsi yang saya utarakan di atas. Tetapi yang perlu diingat keterikatan atau pengaruh dari budaya populer –seperti perilaku seks bebas –tersebut (sebagai satu variable) yang tidak bisa diakses oleh semua anak dan remaja tentu akan disalurkan dengan cara yang dianggap mudah untuk diakses yaitu dengan jalan pemerkosaan.

Penutup

Sesungguhnya, tidak hanya faktor keluarga yang disfungsi secara sosial, tetapi kondisi sosial anak dan remaja yang sudah jauh dari batas nilai dan norma bangsa menjadi faktor pendukung yang sangat determinan terhadap munculnya persoalan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pertumbuhan diskotik dan hotel-hotel melati serta mudahnya akses terhadap video dan film porno harusnya bisa diatasi dengan langkah yang kongret. Selain kembali memperkuat fungsi keluarga sebagai lembaga informal yang menyumbang peran besar terhadap perubahan sosial di tengah masyarakat, kita juga harus bisa mengawasi pertumbuhan tempat-tempat yang dijadikan lokasi cabul secara legal. Akhirnya, revolusi mental seperti yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo harus wujudkan segera mungkin, jangan sampai lebel negeri serba darurat melekat pada diri bangsa kita dan anda tentu tidak menginginkan itukan? (*)

Bagian III

Kota Dalam Pusaran Pembangunan

**Tanda-Tanda Orang Nan Celaka Antara Lain: Bergairah Dalam
Mengerjakan Perbuatan-Perbuatan Haram Dan Menjauhi
Nasihat**

-Ali Bin Abi Thalib-

Medan (Menuju)

Kota Tyranopolis²⁰

Studi tentang perkotaan memang tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan bahkan kini semakin menarik untuk dikaji di tengah banyak persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh perkotaan dari tahun ketahun. Persoalan tersebut muncul dari ketidaksihgan aparaturn pemerintahan kota dalam merencanakan pengembangan dan pembangunan kota. Itu sebabnya mengapa semakin berkembang satu kota maka semakin banyak persoalan yang dihadapi kota tersebut.

Persoalan-persoalan tersebut selalu saja terkait satu sama lain. Urbanisasi, kemiskinan, sektor informal, kriminalitas dan degradasi lingkungan adalah persoalan-persoalan utama yang dihadapi oleh kota. Tingginya laju urbanisasi diperkotaan membuat beban kota semakin tinggi. Bayangkan pada tahun 2025 Bank Dunia memprediksi sebanyak 68 persen populasi Indonesia bakal memadati wilayah

²⁰ Diterbitkan Pertamakali di Opini Harian Waspada,

11 Desember 2015

perkotaan jika gelombang urbanisasi tidak bisa dikendalikan.

Secara spesifik dalam laporan yang bertajuk *East Asia's Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of a Spatial Growth*, Bank Dunia menunjukkan tingkat urbanisasi di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia, dengan rata-rata pertumbuhan 4,4 persen per tahun sejak 1960 hingga 2013. Berikutnya diikuti oleh Tiongkok, Filipina, dan India, dengan pertumbuhan kaum urban masing-masing per tahun 3,6 persen, 3,4 persen dan 3 persen.

Ironisnya hal tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Dampak yang timbul kemudian adalah munculnya pengaguran dalam jumlah besar di perkotaan. Apakah hal ini menjadi ancaman bagi kota? Tentu saja ya. Sebab dalam banyak kasus semakin tinggi angka pengaguran di satu perkotaan akan berkolerasi secara positif dengan tingkat kriminalitas dan pelacuran.

Di sisi lain, tidak tersedianya lapangan pekerjaan membuat banyak kaum urban yang ada di perkotaan memilih menjadi pekerja di sektor informal dengan mendirikan lokasi dagang kaki lima di ruas jalan perkotaan. Penyempitan jalan menjadi tidak terelakkan,

sedangkan laju pertumbuhan kendaraan terus meningkat mengikuti laju deret ukur. Kemacetan menjadi hal yang tak dapat dihindari lagi setiap waktu.

Selain itu, urbanisasi juga berdampak pada degradasi lingkungan. Ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi kaum urban menjadi titik persoalan utama atas degradasi lingkungan ini. Kota selalu dibayangkan dengan pemukiman kumuh di balik mewahnya apartment dan gedung-gedung pencakar langit. Pemukiman itu hadir di pinggir rel kereta api dan bantaran sungai yang tentu berefek pada penyempitan luas sungai.

Belum lagi produksi sampah yang semakin meningkat seiring dengan laju konsumsi dan pertumbuhan masyarakat perkotaan. Parahnya sampah tidak dikelola secara maksimal oleh pemerintah dan terkesan hanya mengandalkan sistem kumpul-angkut-buang dari rumah tangga-TPS ke TPA. Sistem ini-pun tidak sepenuhnya berhasil menangani permasalahan sampah. Tercatat hanya sekitar 85 persen sampah-sampah yang mampu untuk diangkut ke TPA. Sisanya, sekitar 15 persen diserap oleh bank sampah, pemulung dan sungai.

Fenomena lain yang juga sedang menghantui perkotaan adalah tumbuhnya pemukiman dengan model kompleks perumahan bagi masyarakat menengah atas. Kemunculan kompleks perumahan ini tidak jarang berada di wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Selain itu, kemunculan kompleks perumahan ini juga tidak diikuti dengan analisis yang jelas terkait penyediaan dan kapasitas drainase. Hal ini yang kemudian menjadi faktor utama penyebab munculnya banjir di perkotaan.

Kondisi inilah yang sesungguhnya sedang dihadapi masyarakat medan dalam interaksi kehidupan sosial sehari-hari dan seakan tidak dapat lagi diatasi secara maksimal oleh pemerintah kota. Jika ini terus diabaikan maka tidak menutup kemungkinan medan akan menjadi kota yang tyranopolis.

Kota Tyranopolis

Lewis Mumford dalam buku *The Culture of Cities* (1983) menyimpulkan adanya enam tahapan dalam sejarah perkembangan kota, mulai dari berdirinya sampai runtuhnya. Tahap pertama *neopolis* yaitu kota menjadi pusat daerah pertanian dengan adat istiadat bercorak pedesaan dan sangat sederhana. Tahap kedua

adalah *polis* yaitu tahap di mana kota menjadi pusat kehidupan keagamaan dan pemerintahan. Di kota ini terdapat tempat-tempat khusus untuk peribadatan, perdagangan, industri kecil, lembaga pendidikan dan sarana olahraga serta tempat hiburan. Bentuk kota ini menyerupai benteng seperti kota-kota pada zaman kejayaan romawi kuno.

Tahapa ketiga yaitu kota *metropolis* yang ditandai dengan banyaknya bertemu orang-orang dari berbagai bangsa untuk kepentingan bisnis. Di kota ini juga terjadi perkawinan antar antara ras dan bangsa akibat adanya kepercayaan baru. Namun yang paling menonjol dari kota dengan model *metropolis* ini adalah ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin yang tampak semakin jelas.

Tahap keempat adalah kota dengan model *megapolis*, kota ini ditandai dengan semakin tingginya gejala sosiopatologis. Ketimpangan sosial yang tinggi menjadi ciri utamanya. Pengusaha, birokrasi dan elit politik semakin merajalela dengan kekuasaannya. Di sini lain, kemiskinan semakin meluas yang ditandai dengan aksi perlawanan seperti demonstrasi yang terus terjadi.

Tahap kelima yaitu tahap *tyranopolis*. Pada tahap ini kota dilanda oleh kepincangan berupa degenerasi dan korupsi. Moral penduduk kota hilang, terdapat hubungan yang erat antara kekuatan politik, ekonomi dan kriminalitas. Pelayanan umum kacau dan terkesan dapat dibeli. Selain itu, orang-orang kelas bawah menjadi satu kekuatan baru yang tidak dapat diremehkan. Dan tahapan terakhir adalah *necropolis* yaitu tahap di mana peradaban kota runtuh. Kota telah menjadi bangkai seperti Babylonia, Nineve dan Roma Kono.

Kondisi Kota Medan

Konstruksi Kota Medan yang digambarkan sebagai kota *metropolitan* dalam beberapa tahun ini setidaknya memang sudah terlihat jelas dengan pembagunan gedung-gedung pencakar langit yang terus berlangsung dan diikuti dengan ketimpangan penduduk -antara kelompok kaya dan miskin yang semakin terlihat jelas -diperkotaan. Tidak hanya itu, jika diamati secara mendalam kondisi sesungguhnya Kota Medan sudah dapat dimasukkan kedalam katagori kota tyranopolis.

Ungkapan ini bukan tanpa alasan yang jelas. Fakta menunjukkan dalam satu bulan ini saja telah terjadi dua penembakan di Kota Medan

yang dilakukan oleh warga sipil terhadap masyarakat biasa. Belum lagi hampir setiap minggu kita membaca laporan berita terkait aksi begal motor di jalan raya yang memakan korban.

Kasus korupsi apalagi. Dua mantan Walikota Medan dan satu Wakil Walikota Medan pernah dipenjarakan karena kasus korupsi. Pada tahun ini kasus tersebut masih juga terjadi dengan terlibatnya mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan lima Pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 yang sebagian besarnya adalah warga Kota Medan. Ini menjadi satu bukti bahwa moral warga kota semakin merosot.

Di sisi lain, hubungan kekuasaan politik - birokrasi dan elit pejabat -bersama kekuatan ekonomi -pebisnis dan pengusaha -selalu saja berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat miskin kota. Masyarakat miskin selalu menjadi korban penggusuran atas nama pembangunan. Belakng perlawanan warga terhadap penggusuran mulai marak dan selalu memicu konflik sosial seperti kasus penggusuran di jalan timah dan penggusuran pedagang di jalan veteran adalah bukti perlawanan yang sangat nyata, di luar kasus perlawanan atas penggusuran masjid.

Akhirnya pertanyaan kemudian muncul, benarkah ini fenomena umum yang biasa? Atau jangan-jangan ini adalah gambaran atas fakta dari perkembangan kota yang sedang menuju tahap kehancuran? Pertanyaan inilah yang penting untuk dijawab oleh pemerintah Kota Medan dengan menyusun perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan, arif dan bermatabat. Bukankah kita butuh kenyamanan hidup sebagai warga kota? (*)

Medan (Bukan)

Kota Sampah²¹

Sewaktu penelitian thesis tahun 2014 lalu, saya mengambil topic upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah. Topic ini sengaja saya pilih dikarenakan permasalahan sampah di Kota Medan sudah dapat dimasukkan dalam katagori serius. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan sampah yang sangat signifikan dalam bebebrapa tahun belakangan ini. Data pertumbuhan sampah dari tahun 2008 hingga tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan tersebut.

Pada tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan produksi sampah sebesar 33,85 ton. Sedangkan dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 677,89 ton. Namun, di antara tahun 2010 ke tahun 2011 malah terjadi penurunan produksi sampah sebesar 22,6556 ton. Dan pada tahun berikutnya 2011 ke tahun 2012 kembali terjadi peningkatan produksi sampah sebesar 270,3306 ton.

²¹ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

Sedangkan untuk tahun 2013, jumlah volume sampah setiap harinya yang dihasilkan masyarakat Kota Medan berkisar 1700 ton/hari. Jika ditotal setiap bulannya masyarakat dapat memproduksi sampah sekitar 44.000 ton/ bulan sepanjang tahun 2013. Dan pada tahun 2015 produksi sampah di Kota Medan sudah mencapai 1.900 ton/hari. Namun sayangnya, angka pertumbuhan ini tidak dianggap menjadi persoalan yang serius oleh pemerintah.

Pada hal di satu sisi, tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Kota Medan masih menggunakan sistem open dumping. Sistem ini dapat dikategorikan sebagai sistem TPA yang paling sederhana dan murah. Karena kesederhanaannya, maka TPA dengan sistem seperti ini rawan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan menimbulkan polusi yang dihasilkan dari cairan-limbah (*leachate*) yang dapat mengalir ke tempat-tempat lain.

Selain itu, dalam UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 44 ayat 2 dikatakan bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pembuangan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Dan tepat pada tahun 2013

lalu, UU ini genap berusia 5 tahun, namun pemerintah daerah masih saja mengabaikan apa yang menjadi peraturan negara.

Penyebab Pertumbuhan Sampah

Pertumbuhan sampah secara kuantitas dipengaruhi oleh tiga faktor utama di antaranya; pertumbuhan jumlah penduduk. Faktor ini menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan sampah. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Rampir rata-rata setiap individu menghasilkan 0,5 kg sampah/hari. Bahkan di Jakarta tercatat setiap individu menghasilkan 1 kg sampah/hari.

Faktor kedua adalah keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Sama dengan jumlah penduduk, semakin tinggi keadaan ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang. Dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga bisa dibedakan kriteria sampah yang dihasilkan. Biasanya, semakin tinggi kelas ekonomi masyarakat semakin sedikit menghasilkan sampah organik dan lebih banyak menghasilkan sampah anorganik. Sebaliknya, semakin rendah kelas ekonominya maka semakin banyak menghasilkan sampah sampah

organik dan sedikit menghasilkan sampah anorganik.

Faktor ketiga adalah; kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah. Hal ini disebabkan pemakaian bahan baku yang semakin beragam. Sehingga menghasilkan jenis sampah yang semakin beragam pula, misalnya sampah-sampah hasil produk elektornik.

Partisipasi Masyarakat

Persoalan sampah memang tidak hanya menjadi ranah pemerintahan kota saja. Tetapi peran serta masyarakat sebagai individu yang memproduksi sampah juga harus dimintai pertanggung jawabannya. Pengelolaan sampah dengan pendekatan partisipatif dalam banyak kajian teoritis dan aplikatif dianggap yang paling tepat. Hanya saja persoalannya, adakah keinginan pemerintah sempat atau setidaknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat menggerakkan atau mendampingi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara partisipatif dan mandiri?

Pertanyaan ini yang penting untuk diajukan di tengah maraknya program berbasis kelestarian lingkungan yang secara aplikatif tidak berdampak langsung pada pengentasan

masalah lingkungan terkhusus masalah sampah. Fakta ini bisa dilihat langsung di lapangan. Masih banyak masyarakat yang buta dengan pemilahan sampah berdasarkan prinsip 3-R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Meski sudah banyak tong-tong dan bak-bak sampah yang menganjurkan masyarakat untuk membuang sampah secara terpisah (antara organik dan anorganik) tetapi sekali lagi, pada prakteknya masih banyak masyarakat yang mencampurkan sampah-sampahnya. Lebih ironisnya lagi, jika masyarakat sudah memilah sampah berdasarkan tempat pembuangannya tetapi pada saat pengangkutan ke truk sampah malah disatukan kembali. Akhirnya proses pemilahan yang berlangsung di tengah masyarakat (hulu) berjalan sia-sia.

Kebijakan seperti inilah yang harus dikritikan secara bersama-sama. Sebab, pendekatan pembangunan partisipatif harus mensinkronkan antara keinginan pemerintah dan masyarakat serta harus ada juga kesatuan kerja antara pemerintah dan masyarakat. Jika tidak maka kebijakan yang terapkan tidak akan pernah berjalan secara maksimal.

Mendukung Bank Sampah

Bank sampah adalah satu wujud dari usaha pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3-R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Di Bank sampah, sistem yang diterapkan adalah sistem mengelola sampah dan menampung, kemudian memilah dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengolahan sampah yang lain atau kepada pihak yang membutuhkan. Di sini nilai guna barang yang sudah menjadi sampah dapat ditingkatkan, yang sebelumnya tidak berguna menjadi barang berguna. Selain itu, usaha penampungan dan pengolahan sampah dengan mendistribusikan ke fasilitas pengolahan sampah yang lain atau kepada pihak yang membutuhkan juga bisa membantu pengurangan intensitas pembuangan sampah ke TPS atau TPA.

Karena peran sertanya yang dapat mendaur ulang sampah dan meningkatkan kegunaan sampah secara tepat maka peran serta bank sampah harus dapat didukung dengan baik oleh pemerintahan daerah. Apalagi bank sampah dapat mengurangi intensitas pembuangan sampah ke TPS atau TPA yang dapat mengerem laju pertumbuhan sampah di setiap TPS dan TPA.

Untuk itu, upaya mendukung bank sampah harus dilakukan. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan berupa uang atau fasilitas lainnya. Tetapi juga harus dapat membantu pendistribusian hasil pengelolaan sampah yang ada di bank sampah. Sebab selama ini, persoalan pemasaran produk hasil olahan di bank sampah yang selalu menjadi kendala bagi pengurus bank sampah.

Upaya mendukung program bank sampah ini menjadi penting untuk dilakukan agar jumlah pertumbuhan sampah di Kota Medan dapat direm dengan semaksimal mungkin dan Medan dapat menjadi kota yang tidak lagi bermasalah dengan sampah. (*)

Tata (R)uang²²

Jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 milik TNI AU beberapa waktu lalu di Jalan Jamin Ginting Medan ternyata merembet pada isu tata ruang di Kota Medan. Beberapa pihak bahkan menyatakan jika Bandara Polonia atau yang sekarang menjadi Pangkalan Udara Suwondo tidak layak lagi beroperasi sebagai landasan udara militer atau VVIP. Sebab jarak antara Lanud Suwondo dan pemukiman penduduk tidak sesuai dengan aturan. Idealnya, pangkalan TNI AU ring paling luar 5 kilometer tidak ada obstacle. Begitu kira-kira keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU Mareskhal Pertama Dwi Badarmanto di Jakarta belum lama ini.

Jika kondisi tersebut benar adanya, maka kita patut bertanya, mengapa banyak pemukiman yang dibiarkan tumbuh di seputaran Lanud Suwondo? Bukankah bandara ini –ketika masih bernama Polonia –jauh lebih dahulu dibangun dibandingkan dengan pemukiman-pemukiman yang ada sekarang? Bahkan jika dilihat dengan

²² Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

10 Juli 2015

kondisi kekinian, tidak hanya pemukiman yang tumbuh di seputaran Lanud Suwondo, tetapi pusat bisnis, pertokoan dan perumahan-perumahan mewah telah banyak berdiri di sana. Mengapa ini terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab atas izin mendirikan bangunan di sana? Atau jangan-jangan, pemberian izin mendirikan bangunan di sana selama ini sama sekali tidak memperhatikan kepentingan tata ruang?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian penting untuk dijawab oleh pihak-pihak terkait, mulai dari lembaga eksekutif -Pemko Medan, Pemrov-SU, Kementerian Perhubungan -dan lembaga Legislatif lokal -DPRD Medan dan DPRD-SU -serta pihak Angkatan Pura atau TNI AU. Sebab, kita tentu tidak menginginkan adanya kata-kata bahwa keberadaan Lanud Suwondo di tengah Kota Medan menghalangi pembangunan di kota ini. Harusnya pembangunan -yang berorientasi pada pendirian gedung-gedung pencakar langit - lebih dapat menyesuaikan posisi dengan hal-hal yang sifatnya lebih penting seperti ketahan dan keamanan wilayah. Tentu kita bisa belajar banyak dari Lanud Halim Perdana Kusuma yang masih dapat beroperasi di tengah

pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.

Persoalan Lain

Lepas dari persoalan keberadaan Lanud Suwondo yang kini sedang mengalami kontroversi, sesungguhnya kita dalam kehidupan sehari-hari telah disajikan dengan permasalahan tata ruang yang semakin tidak tertib. Di Kota Medan khususnya, kita bisa lihat bagaimana kondisi ketidaktertiban pada tata ruang yang ada. Perda Kota Medan Nomer 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 belumlah diterapkan secara maksimal.

Untuk memenuhi standar ruang terbuka hijau (sekitar 30 persen dari luas wilayah perkotaan) saja Kota Medan masih mengalami kesulitan. Apalagi jika harus memenuhi kriteria lainnya. Fakta ini ternyata berbanding terbalik jika dibandingkan dengan perkembangan pusat-pusat bisnis yang semakin tidak teratur. Ini bisa kita lihat secara kasat mata. Hampir di semua wilayah Kota Medan kita melihat perkomplekan bisnis yang dibangun dengan begitu megah di tengah pemukiman penduduk yang terkadang terkesan kumuh, dan ironisnya lanju pertumbuhan tersebut seolah tidak bisa

dihentikan. Itu masih pada pusat bisnis. Jika dirujuk pada pertumbuhan hotel, plaza, rumah sakit, perkompelakan penduduk dan lain sebagainya, maka muncul pertanyaan; apakah peruntukan keseluruhan bangunan tersebut telah memenuhi prosuder tata ruangan yang ada?

Pertanyaan ini juga harus dijawab dengan serius oleh semua pihak yang memangku kepentingan umum. Sebab tidak jarang kita mendengar isu dan fakta-fakta bagaimana peruntukan tata ruang kota bisa dirubah melalui transaksi ekonomi antar pihak yang terkait kepentingan.

Pada aspek inilah tanah pada sebuah ruang menjadi bahan bisni yang menguntungkan bagi pemangku kepentingan (sebut saja pemerintah). Atas dasar inilah tataruang selalu berkaitan erat dengan konsep tata uang. Di mana uang dapat mempengaruhi bentuk tata ruang yang ada dan ironisnya itu sudah menjadi satu rahasia publik.

Rakyat sangat mudah untuk dikelabui pada persoalan ini. Mitos-mitos pembangunan selalu saja dijadikan tameng untuk mengatasi protes keras rakyat. Bagi pemerintah, pendirian dan pembangunan gedung-gedung pencakar langit diharapkan mampu menambah pendapatan dan pemasukan pemerintah serta membuka

lapangan pekerjaan yang berefek pada peningkatan pendapatan penduduk.

Kosep inilah yang selalu saja diiming-imingi di dalam benak rakyat. Padahal pembangunan perkotaan buka saja soal pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan tetapi lebih dari itu. Kota harus dirancang secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat.

Perhatikan saja bagaimana kondisi kota ini sekarang. Setiap hujan turun, beberapa lokasi di pusat kota langsung mengalami banjir. Pembanguna rumah toko (Ruko) yang selalu saja menutup saluran *drainase* menjadi salah satu pemicu banjir diperkoataan selain dari tanah resapan yang semakin berkurang.

Pertumbuhan pemukiman penduduk dengan tidak memperhatikan kapasitas *drainase* juga menjadi faktor pemicu hadirnya banjir diperkotaan. Beban perawatan kota menjadi meningkat sebab kehadiran banjir selalu saja membuat aspal jalan semakin cepat mengeropos, belum lagi dampak kesehatan lingkungan yang ditimbulkan dari banjir tersebut yang kesemuannya membutuhkan biaya dari APBD daerah yang relatif besar.

Selain itu, persoalan peruntukan tata ruang kota yang selalu berbasis transaksional itu juga berbias pada aspek sosial-budaya masyarakat. Berapa banyak tempat ibadah dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang harus menjadi korban keganasan pembangunan pusat-pusat bisnis. Itu dari segi makro.

Sedangkan dari segi mikro kita bisa melihat hadirnya pedagang kaki lima selalu saja mengorbankan kepentingan pengguna jalan. Trotoar yang harusnya menjadi hak bagi pejalan kaki dijajah dengan semena-mena oleh pedagang kaki lima dan tiang-tiang reklame toko-toko yang ada. Di tambah lagi tidak tertata parkir lokasi perparkiran yang ada. Dampaknya tata ruang tampak menjadi sempit dan tidak teratur. Dan potensi kemacetan menjadi jauh lebih besar.

Penutup

Perilaku transaksional yang dimainkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan tata ruang tentu saja merugikan bagi rencana pembangunan kota yang berkelanjutan. Ironisnya pemerintah selaku pihak yang mengontrol tata ruang kota juga terlibat dalam lingkaran transaksional tersebut. Kehadiran pusat-pusat bisnis yang melanggar ketentuan

tata ruang kota tentu saja selalu melibatkan oknum-oknum pemerintah dan juga jejaringan politik serta jejaringan pembisnis besar lainnya.

Ironisnya hal ini juga berlaku pada level yang lebih mikro seperti pedagang kaki lima. Mereka juga selalu menggunakan jasa preman, kelompok pemuda setempat dan bahkan terkadang juga melibatkan oknum OKP untuk mendapatkan lapak jualan yang strategis plus pengaman dari pihak-pihak yang mengganggu.

Fakta inilah yang membuat penataan tata ruang kota tidak akan pernah berhasil. Kekuatan pemerintah tumpul untuk melakukan control. Bahkan untuk sekelas pengaman pedagang kaki lima sekalipun. Penertiban pedang kaki lima hanya berlangsung selama satu atau dua minggu saja. Setelah itu mereka kembali berjualan. Sedangkan untuk kelompok-kelompok pengusaha yang lebih makro yang menggunakan lahan dengan sembarangan, pemerintah tidak mempunyai gigi sama sekali untuk mengatasinya. Kini tata ruang kota akan selalu berhadapan dengan konsep tata uang yang dimainkan oleh pihak-pihak pebisnis baik secara makro atau mikro. (*)

Arus Balik dan Dilema (Ekonomi) Perkotaan²³

Lebaran baru saja usai. Jutaan orang yang melakukan mudik kini harus bersiap-siap melakukan perjalanan kembali ke daerah tempat mereka hidup mencari nafkah. Kegiatan kembali dari tempat asal ke daerah tempat mencari nafkah ini kemudian kita kenal dengan istilah arus balik. Ya arus balik. Setelah mudik, puluhan mata kamera media masa akan sibuk untuk memberitakan kegiatan ini. Sebab kegiatan arus balik seolah sudah ditakdirkan menjadi satu rangkaian dengan kegiatan mudik.

Meski tidak bisa digeneralis, namun pada faktanya kebanyakan orang atau keluarga yang melakukan mudik pasti akan melakukan arus balik kembali. Jika mereka tidak kembali ketempat asal mencari nafkah, seolah mereka dianggap gagal merantau atau dianggap punya

²³ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

22 Juli 2015

masalah diperantauan sehingga harus melarikan diri ke kampung halaman. Sehingga mau tidak mau banyak orang yang tetap melakukan arus balik usai lebaran.

Namun ironisnya, jumlah arus balik ke kota terkadang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemudik ke desa. Tidak jarang banyak orang atau keluarga yang mengajak sanak saudaranya untuk mengadu nasib (mencari pekerjaan) di perkotaan. Apalagi ditengah masyarakat kita masih mengadopsi budaya sungkan, yaitu budaya yang sulit untuk menolak permintaan atau ajak orang lain. Biasanya pemuda atau gadis-gadis desa banyak yang tergiur untuk mengadu nasib di perkotaan setelah melihat sanak saudara mereka berhasil di rantau. Rayuan untuk ikut ke kota biasanya akan sering muncul.

Pada proses ini kemudian arus mudik selalu berkolerasi positif dengan urbanisasi penduduk. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan serius bagi setiap kota besar di Indonesia. Apalagi sampai saat ini kota masih menjadi satu daya tarik tersendiri bagi warga desa untuk mengejar impian. Tampilan iklan-iklan di media dan sinetron yang selalu menggambarkan budaya *popular* di perkotaan membuat banyak orang

terhayut akan ke modernan kehidupan perkotaan.

Desa - Kota

Apa yang digambarkan oleh media, pada faktanya adalah suatu yang jauh panggang dari api. Kota pada kenyataannya kini bukanlah suatu yang ramah bagi pendatang baru bahkan bagi warganya sendiri. Disparitas lingkungan antara pemukiman kumuh dan kompleks perumahan menjadi gambaran dari perkotaan hari ini. Angka pengangguran yang tinggi selalu saja memicu tindak kriminalitas dan pelacuran. Persoalan lain adalah degradasi lingkungan yang semakin serius atas pertumbuhan pemukiman penduduk. Lantas apa yang sesungguhnya kita harapkan dari perkotaan? Pertanyaan inilah penting untuk dijawab oleh para urbanis.

Secara umum tentu kita mengetahui bahwa faktor penarik urbanis datang ke kota adalah; kehidupan kota yang lebih modern, sarana dan prasarana kota lebih lengkap, banyaknya lapangan pekerjaan di perkotaan, dan pendidikan sekolah atau perguruan tinggi yang lebih baik dan berkualitas. Meski terkadang beberapa faktor penarik tersebut hanya sebatas

ilusi semu yang selalu hadir dalam pikiran kaum urbanis.

Ilusi itu semakin kuat ketika persoalan-persoalan di desa tidak pernah teratasi secara maksimal. Lahan pertanian yang semakin sempit, lapangan pekerjaan yang terbatas, sarana dan prasarana desa yang tidak memadai adalah bagian dari persoalan yang belum teratasi hingga kini. Persoalan tersebut membuat infrastruktur antara desa dan kota semakin senjang. Hal ini menjadi bukti kegagalan pembangunan yang bersifat sentralistis di mana kota selalu menjadi patron pembangunan. Tidak salah jika efek yang kemudian dihasilkan adalah arus urbanisasi yang selalu hadir dalam skala besar setiap akhir lebaran.

Pada tahun 2013 lalu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memperkirakan jumlah pendatang baru yang masuk ke sejumlah kota besar di Indonesia pasca Idul Fitri bisa mencapai angka 500 ribu orang. Jumlah ini bahkan diperkirakan akan terus meningkat selama beberapa tahun ke depan. Tidak hanya sampai di situ, Bank Dunia bahkan memprediksi sebanyak 68 persen populasi Indonesia bakal memadati wilayah perkotaan pada tahun 2025

jika gelombang urbanisasi tidak bisa dikendalikan.

Secara spesifik dalam laporan yang bertajuk *East Asia's Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of a Spatial Growth*, Bank Dunia menunjukkan tingkat urbanisasi di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia, dengan rata-rata pertumbuhan 4,4 persen per tahun sejak 1960 hingga 2013. Berikutnya diikuti oleh Tiongkok, Filipina, dan India, dengan pertumbuhan kaum urban masing-masing per tahun 3,6 persen, 3,4 persen dan 3 persen.

Laju pertumbuhan urbanisasi inilah yang kemudian seharusnya dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah. Sebab jika tidak, maka permasalahan di perkotaan akan terus meningkat. Kota akan menjadi lautan manusia yang secara ekonomi tidak memiliki produktifitas yang tinggi. Sektor-sektor informal akan terus tumbuh tanpa dapat direm. Akhirnya kota akan mengalami satu dekadasi yang kompleks mulai dari degradasi lingkungan hingga dekadasi sosial.

Konsep membangun dari desa yang dicanangkan oleh pemerintah harus dapat segera diwujudkan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa,

membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru, memproduktifkan kembali lahan pertanian, membangun infrastruktur desa dan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memadai untuk kepentingan pembangunan desa. Jangan sampai dana desa yang berjumlah miliaran rupiah tidak memiliki dampak sama sekali terhadap pemerataan pembangunan seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Kondisi Ekonomi Kini

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2015 sebesar 4,7 persen, melambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2014 sebesar 5,1 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi produksi misalnya, produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam, produksi minyak mentah dan batubara turun sehingga industri kilang minyak juga negatif. Selain itu, distribusi perdagangan melambat karena menurunnya pasokan barang impor dan kinerja konstruksi juga mengalami perlambatan akibat terlambatnya realisasi belanja infrastruktur.

Secara jelas BPS juga menyampaikan efek dari pertumbuhan ekonomi yang melambat adalah meningkatnya jumlah pengangguran dari 7,15 juta orang menganggur pada Februari 2014 menjadi 7,45 juta orang menganggur pada Februari 2015. Fakta inilah yang penting untuk dipahami pemerintah selaku pengambil kebijakan. Sebab kehadiran para urbanis pasca lebaran di beberapa kota besar di Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang tampak melambat tentu akan sangat berdampak negative bagi kehidupan masyarakat khususnya di perkotaan.

Biaya oprasional perusahaan yang meningkat tidak menutup kemungkinan para pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawan mereka pasca lebaran demi efesiensi di tubuh perusahaan. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka pengaguran akan menjadi persoalan yang serius yang akan dihadapi oleh masyarakat kota. Maka bersiaplah, sebab jika persoalan ini tidak bisa diatasi dengan baik, maka kota akan menjadi tempat menumpuknya pengangguran para pengangguran. (*)

Siaga Bencana, Siaga Bersama²⁴

Sejumlah rentetan bencana alam yang bersifat hidrometeorologi dan geologi terus menghantui beberapa daerah di Indonesia pada awal tahun 2014. Akibatnya, ratusan ribu orang harus bersedia menginap di tenda pengungsian. Banjir di DKI Jakarta, Pantura, dan Jawa Tengah, banjir bandang di Mando, serta letusan Gunung Kelud dan erupsi Gunung Sinabung yang baru terjadi beberapa hari lalu menjadi segurat catatan penting tentang kesiapan negara dalam menangani bencana.

Kompas pada *Headline*-nya tanggal 23 Januari 2014 yang berjudul; “Pemerintah Gagap Menghadapi Bencana” mengungkapkan bagaimana ketidaksiapan pemerintah dalam merespon bencana. Pada isi pemberitaannya terungkap sejumlah fakta menarik, diantaranya; jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tingkat provinsi telah terbentuk 33 BPBD dari 34 provinsi. Sedangkan untuk

²⁴ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

tingkatan kabupaten-kota se Indonesia yang berjumlah 505, telah terbentuk sebanyak 402 BPBD. Namun ironisnya, sejumlah daerah yang sedang dilanda bencana, seperti banjir di Kota Bekasi dan Kabupaten Kerawang, serta letusan gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, justru belum memiliki BPBD Kabupaten/Kota.

Fakta lain yang terungkap dari pemberitaan Kompas tersebut adalah banjir yang merendam 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi hanya diurus oleh 26 personel BPBD sedangkan total jumlah pengungsi 57.000 orang. Tentu kita tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab utama pemerintah 'gagap' menghadapi bencana, jika merujuk pada pengalaman penanganan kebencanaan seperti Tsunami di Aceh, gempa di Pangandaran dan Padang Sumatera Barat, serta letusan gunung Merapi di Yogyakarta seharusnya sudah bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam pencegahan dan penanganan bencana.

Lepas dari persoalan di atas, kini yang harus diperhatikan adalah bagaimana usaha untuk mempersiapkan penanganan bencana khususnya dalam hal pencegahan bencana (mitigasi) dan pengurangan resiko bencana. Apalagi saat ini tercatat ada 19 Gunung Api

bersatus waspada dan tiga dalam kondisi siaga (Kompas, 4/02/2014). Setidaknya kita harus mulai mempersiapkan antisipasi-antisipasi kebencanaan.

Anggaran Kebencanaan

Satu hal penting yang harus dilihat dari ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi bencana adalah seberapa besar anggaran yang ditetapkan untuk penanggulangan bencana setiap tahunnya? Pada nota keuangan dan APBN 2014 terlihat anggaran belanja BNPB pada APBN-P 2013 sebesar Rp 1,48 triliun, ditambah dana kedaruratan sebesar 4 triliun. Sedangkan pada tingkat daerah, relokasi anggaran untuk kebencanaan jauh lebih kecil. Rata-rata bekisar 0,1 persen dari total APBD tiap tahunnya.

Cukupkah dana tersebut untuk penanggulangan dan pencegahan bencana? tentu jawaban ini perlu pengkajian yang lebih mendalam. Namun jika kita membandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan pada saat tanggap darurat dan pemulihan dari bencana, maka rata-rata dibutuhkan dana mencapai miliaran rupiah.

Misalnya saja, di Manado, Kementerian Sosial menyiapkan dana tanggap darurat sebesar 5

Milliar rupiah. Sedangkan untuk penanganan bencana banjir di Jakarta tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana sebesar 3,5 Triliun rupiah dan untuk penanganan banjir Pantura Pemda setempat mengeluarkan dana tanggap darurat sebesar 800 juta rupiah. Untuk pemulihan lahan pertanian pasca erupsi gunung Sinabung diperkirakan akan menelan biaya 63,5 Milliar rupiah. Angka-angka ini praktis cukup besar - yang wajib untuk dikeluarkan - dan dapat dipastikan akan mempengaruhi postur anggaran setiap tahunnya baik dalam APBD atau R-APBD.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah adakah dana atau anggaran khusus yang disediakan untuk Mitigasi kebencanaan? Di mana dalam hal ini mencakup pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana dan pengembangan budaya sadar bencana. Untuk poin pengembangan budaya sadar bencana ini menjadi satu poin penting, mengingat kini hampir setiap saat bencana bisa hadir tidak hanya dalam bentuk ledakan gunung merapi, gempa atau tanah longsor, tetapi dapat juga dalam bentuk banjir, kekeringan dan kebakaran.

Tanggung Jawab Bersama

Pengembangan budaya sadar bencana memang bukan saja menjadi domain tanggung pemerintah dan BNPB atau BPBD saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak ketiga, dalam hal ini bisa saja perusahaan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sosialisasi dan pelatihan ini bisa saja dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan, perguruan tinggi dan badan kebencanaan seperti BNPB dan SAR (*Search And Rescue*) yang kemudian membentuk satu tim relawan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Pada dasarnya, pengembangan budaya sadar bencana bisa saja melalui sosialisasi dan pelatihan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi satu bencana, Bagaimana melakukan penyelamatan pertama ketika menghadapi situasi bencana, serta mungkin lebih jauh lagi adalah bagaimana menamkan prilaku hidup yang lebih mengharagai lingkungan dan tidak melakukan perusakan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana.

Menambah Kampung Siaga Bencana

Siaga bencana, siaga bersama adalah sebuah harapan akhir jika pengembangan budaya sadar bencana sudah berjalan dengan baik. Akhirnya akan terbentuk satu masyarakat dan perkampungan yang siaga bencana.

146 kampung siaga bencana dengan dukungan 33.000 Taruna Siaga Bancana (Tagana) yang telah dibentuk Kementerian Sosial di 33 Provinsi akan terus bertambah dengan kesadaran masyarakat melalui partisipasi dan tanggung jawab bersama semua pihak. Semoga. (*)

Mencari Figur

Walikota (M)edan²⁵

Genderang kampanye telah ditabu oleh KPU Medan. Dua pasang calon Walikota Medan - Eldin-Akhyar dan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma -siap bersaing untuk menduduki kursi orang nomer satu di medan. Keduanya tentu mempunyai peluang yang sama meski beberapa lembaga survei lokal dan nasional telah mempunyai data siapa yang memiliki peluang paling besar untuk menang. Tetapi sekali lagi, ini persoalan politik, kondisinya bisa berubah bahkan dalam hitungan menit.

Namun sesungguhnya pada perhelatan pilkada kali ini, kita harusnya tidak lagi sekedar mencari sosok pemimpin yang hanya berani pencitraan dengan ribuan program bagus tetapi pada akhirnya sangat sulit untuk diimplementasikan sebab harus tersandera dengan politik balas budi yang dimainkan oleh para pemodal. Kita juga tidak butuh dengan model kepemimpinan walikota yang bersifat birokratif, yang hanya

²⁵ Diterbitkan Pertamakali di Opini Harian Waspada,

12 September 2015

bisa bicara soal keterbatasan anggaran, ketiadaan perda dan perwal atau hanya bisa bicara soal kenakalan oknum-oknum PNS yang menghambat pelayanan terhadap rakyat. Kita tidak butuh itu sekarang.

Kita juga tidak lagi butuh dengan program-program pembangunan yang sifatnya *kuratif*. Yang kita butuh sekarang adalah program pembangunan yang dapat mengatasi persoalan secara substantif yang berpokok pada persoalan-persoalan di hulu. Program-program pembangunan juga harus bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan persoalan *human-ekologi* (lingkungan dan manusia). Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita dan calon Walikota Medan nantinya.

Untuk itu kita butuh sosok calon walikota yang tidak hanya visioner dan bernas dalam berpikir tetapi lebih dari itu, kita butuh walikota yang "*edan (gila)*". *Edan* dalam bekerja dan mengatasi persoalan yang melanda Kota Medan hari ini. *Edan* dengan tidak lagi bekerja dengan siklus pada umumnya tetapi harus berani bekerja di luar *mainstream*. Sebab persoalan yang melanda Kota Medan sudah bisa dikategorikan rumit. Jika tidak diatasi segera mungkin, maka Medan akan seperti Jakarta yang sumpek dan tidak

nyaman lagi bagi penduduknya, sebab semua persoalan perkotaan sudah ada di sana. Mulai dari degradasi lingkungan, banjir, macet, urbanisasi dan ketimpangan pendapatan penduduk yang sangat signifikan. Belum lagi etnik lokal (betawi) yang semakin terpinggirkan oleh pembangunan.

Nah, kita juga mempunyai persoalan yang sama. Mulai dari tata ruang kota yang semakin berantakan, degradasi lingkungan yang ditandai dengan banjir, macet yang selalu hadir setiap pagi-siang dan sore. Belum lagi ketimpangan pembangunan antara medan utara dan medan selatan serta ketimpangan pendapatan antar etnis yang semakin besar –dan ini dapat memicu kecemburuan sosial diakar rumput –ditambah lagi etnik lokal (melayu) yang semakin terpinggirkan. Padahal medan merupakan kota melayu yang identik dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya.

Masalah Penting

Di antara itu semua, tata ruang menjadi permasalahan yang penting untuk diatasi. Persoalan tata ruang ini yang kemudian membuat kota medan tampak semakin tidak teratur. Bangunan-bangunan ruko, pusat-pusat bisnis, apartement dan perumahan komplek

lainnya tampak sangat mudah berdiri di Kota Medan. Kita tidak pernah tau, apakah keseluruhan bangunan yang ada tersebut memiliki IMB dan atau sesuai dengan peruntukan lahan yang ada? Hal ini bertambah pelik dengan semakin banyaknya papan-papan reklame yang berdiri tanpa izin dari Pemko Medan.

Tidak hanya pada skala makro, tetapi pada skala mikro saja, kita masih sulit untuk mengerem laju pertumbuhan pedagang kaki lima di pinggir jalan. Lihat saja di beberapa titik jalan kota medan yang selalu dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki terabaikan sebab trotoar sudah kehilangan fungsinya. Belum lagi persoalan penantaan parkir yang belum berjalan secara maksimal, lihat saja di beberapa sekolah-sekolah di perkotaan yang selalu memakai badan jalan untuk keperluan parkir mobil-mobil jemputan keluarga.

Fakta-fakta ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Perda Kota Medan Nomer 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 belumlah diterapkan secara maksimal. Untuk memenuhi standar ruang terbuka hijau (sekitar 30 persen dari luas wilayah perkotaan) saja, Kota Medan masih mengalami kesulitan. Apalagi jika harus

memenuhi kriteria lainnya. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh pemilik modal untuk pengembangan apartement, plaza dan kompleks-komplek perumahan selalu saja berdampak pada semakin banyaknya warga (asli) Kota Medan harus berpindah ke wilayah-wilayah pinggiran dan luar Kota Medan.

Ini yang kemudian membuat banyak penduduk medan tidak lagi merasakan bahwa medan merupakan rumah mereka. Sebab banyaknya orang asing (bukan pribumi) yang telah menjadi penghuni Kota Medan membuat kota ini hilang identitas budayanya (*culture identity*). Inilah yang menjadi pekerjaan rumah terpenting bagi calon Walikota Medan. Jika tidak dilakukan, maka jangan pernah berharap medan akan menjadi kota yang ramah bagi penduduknya.

Tapak Umbara

Visi pembangunan Kota Medan dibawah naungan Rahudman-Eldi pada priode lalu tentang medan lebih baik hari ini dari hari kemarin dan hari esok harus lebih cerah dari hari ini, tentu bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Sebab sampai hari ini tidak ada

satu-pun perbaikan yang terasa dan tidak ada kecerahan yang terjadi.

Jalan-jalan masih saja terus berlubang, mengurus KTP, KK dan bentuk administrasi lainnya seperti kartu medan sehat, masih saja sulit untuk diurus. Ada saja oknum-oknum yang melakukan pungli. Di sini letak pentingnya calon walikota atau walikota nantinya yang telah terpilih untuk melakukan tapak umbara.

Tapak umbara tidak seperti konsep belusukannya Jokowi yang selalu diikuti media. Tapak umbara lebih kepada perjalanan pemimpin untuk dekat dengan rakyatnya dengan kembali menjadi rakyat biasa untuk dapat mendengar dan memahami kebutuhan hidup rakyat yang terkadang selama ini tidak terwakilkan oleh siapa-pun. Perjalanan ini pernah dilakukan oleh Prabu Siliwangi saat ingin tau dengan kondisi rakyatnya. Ia menyamar sebagai rakyat biasa untuk bisa mengetahui kebutuhan rakyat dan bagaimana pelayanan adipati kerajaan terhadap rakyat.

Namun pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah ada pemimpin yang mau untuk menyamar menjadi rakyat biasa dan hidup seperti rakyat pada umumnya? Pertanyaan

inilah yang penting untuk dijawab oleh kedua pasangan calon Walikota Medan saat ini. Sebab dengan jalan seperti ini mereka akan mengetahui bagaimana kehidupan rakyat yang sesungguhnya dan dari hal ini pula mereka akan mengetahui bagaimana buruknya pelayanan pemerintah terhadap rakyat yang selama ini sering terjadi di kantor-kantor pemerintahan.

Penutup

Di sinilah konsep tapak umbara berbeda dengan blusukan dan sidak yang selalu dilakukan oleh pemimpin rakyat dengan membawa media masa agar mereka tampak “sedang bekerja”. Dan konsep tapak umbara ini hanya bisa dilakukan oleh mereka calon walikota yang benar-benar *edan*. Calon walikota yang rela melepas simbol kepemimpinannya dan menghapus sekat pembatas antara pemerintah dan rakyat yang selama ini begitu jauh.

Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini memang selalu menjadi contoh dan patokan walikota ideal yang didambakan oleh rakyat. Mereka memiliki “*ke-edanan*” masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan kita sedang mencari sosok-sosok seperti mereka

bahkan melebihi mereka berdua dalam bekerja untuk rakyat. Namun apakah sikap dan perilaku “*ke-edanan*” dalam bekerja untuk rakyat ada pada kedua pasang calon Walikota Medan hari ini? (*)

Bagian IV

Pembangunan Untuk Pembangunan

**Memang Benar Pepatah Jerman: *'Der Mensch Ist, War Es Iszt'*,
Artinya: Sikap Manusia Sepadan Dengan Caranya Ia Mendapat
Makan.**

-Mohammad Hatta-

Membangun (Tanpa) Utang²⁶

Pembangunan –di satu negara –tentunya membutuhkan modal. Modal tersebut dalam kajian ekonomi pembangunan klasik dapat diperoleh dari dalam negeri –dengan mengusahakan peningkatan tabungan penduduk –dan dari luar negeri –melalui penanaman modal asing dan utang luar negeri. Pada prosesnya, pilihan terhadap penggunaan modal pembangunan di Indonesia lebih banyak berorientasi pada utang luar negeri.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah utang yang diwariskan dari presiden ke presiden lainnya, atau dari pemerintah ke pemerintah berikutnya. Pada era Presiden Soekarno misalnya, Indonesia melakukan pinjaman luar negeri ke negara-negara blok timur seperti Uni Soviet dan sekutunya. Diakhir rezimnya, Soekarno mewariskan utang ke pemerintahan Suharto sekitar USD 2,3 miliar. Angka tersebut di luar utang pemerintahan Hindia Belanda sebesar

²⁶ Pertamakali Diterbitkan di Harian Waspada **Kamis, 23 Juni 2016, Hlm B 8**

USD 4 miliar yang harus dibayarkan oleh Indonesia atas kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, sebagai syarat kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan.

Namun ironisnya, selama 32 tahun rezim orde baru berkuasa di bawah naungan Presiden Soeharto, utang luar negeri Indonesia semakin meningkat dengan rajinnya pemerintah orde baru melakukan pinjaman ke negara-negara blok barat dan lembaga asing seperti Bank Dunia dan *Internasional Monetary Found* (IMF). Atas dasar utang tersebut, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan di segala sektor. Pertumbuhan ekonomi dikejar, dengan membangun infrastruktur, industri dan lain sebagainya. Hasilnya, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni berada dikisaran enam persen pertahun yang sebelumnya hanya berada pada angka tiga persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk dalam katagori tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya pada saat itu.

Asumsi lepas landas yang diharapkan pemerintah orde baru akhirnya hanya menjadi angan-angan semata. Sebab hasil dari pembangunan -yang modal utamanya adalah

pinjaman luar negeri tersebut –tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor produktif tetapi malah dijadikan lahan korupsi bagi lingkaran penguasa. Perilaku koruptif dan beban utang luar negeri yang besar membuat struktur ekonomi Indonesia keropos. Terbukti pada saat krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara pada 1997, Indonesia menjadi negara yang hampir bangkrut dengan hutang luar negeri sebesar Rp. 1.500 triliun. Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa selama 32 tahun rezim orde baru berkuasa, utang negara bertambah sekitar Rp. 46,88 triliun setiap tahunnya.

Atas kejadian ini, rakyat baru sadar bahwa pembangunan yang dilakukan selama 30 tahun oleh rezim orde baru hanya menghasilkan utang-utang berbunga yang mesti dibayarkan. Jika dirata-ratakan maka dari 200 juta penduduk Indonesia, setiap kepalanya dibebani utang sekitar delapan hingga sembilan juta rupiah. Angka yang cukup fantastis bukan?

Pasca Reformasi

Pasca reformasi, ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri semakin besar. Pada masa kepemimpinan Habibie, Indonesia menambah akumulasi utang sebesar USD 20

milliar, sehingga total utang Indonesia menjadi USD 178 miliar. Meski pada priode berikutnya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat menurunkan utang Indonesia menjadi USD 157 miliar, namun tetap saja, utang pemerintahan Indonesia masih sangat tinggi. Jika diakumulasikan dalam nilai rupiah pada saat itu bekisar Rp. 1.273 triliun.

Jumlah utang tersebut kemudian dikurangi kembali oleh Presiden Megawati menjadi Rp. 1.225 triliun dari hasil penjualan aset-aset negara. Meski sempat mengalami penurunan, namun diakhir masa jabatan Megawati, utang Indonesia kembali meningkat menjadi Rp. 1.299 triliun dan utang ini kembali diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya yang dinaungi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bukannya mengurangi utang negara, pemerintahan SBY yang berkuasa selama dua priode justru menambah utang Indonesia sebesar Rp. 724 triliun.

Kebijakan pembangunan yang sangat bergantung pada modal asing menjadi penyebab tinginya angka utang Indonesia pada masa pemeritahan SBY. Bahkan program-program sosial seperti BLSM, KUR, PNPM Mandiri, Jamkesmas, Raskin dan lain sebagainya -yang sangat populer pada saat itu -

didanai dari hasil pinjaman utang luar negeri. Untuk tahun 2008 saja tercatat, Bank Dunia menggelontorkan dana untuk PNPM Mandiri sebesar 400 juta. Ironisnya, utang tersebut harus dikembalikan pada tahun 2030, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kini, hal senada juga terjadi pada era pemerintahan Jokowi-Jk. Pemerintahan yang resmi terpilih pada 2014 lalu juga sudah menumpuk utang yang sangat besar. Tercatat utang pemerintahan Jokowi-Jk hingga akhir 2015 mencapai angka Rp. 3.089 triliun atau setara dengan USD 223,2 miliar. Angka ini terbilang besar dengan masa pemerintahan yang baru berjalan dua tahun. Lesunya perekonomian Indonesia dan minimnya penerimaan negara dari pajak sepanjang tahun 2015 menjadi alasan kuat pemerintah melakukan pinjaman (atau utang) luar negeri untuk modal pembangunan.

Pengulangan

Dalam beberapa bulan ini, kita sering menyaksikan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke daerah sambil meresmikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan pembangkit listrik, jalan Tol, sarana perkereta apian, pelabuhan,

waduk, dan lain sebagainya. Gerakan pembangunan ini bahkan selalu digembargemborkan Jokowi dalam setiap pidato-nya. Tetapi apakah kita pernah sadar bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini selalu menggunakan utang luar negeri yang pada saatnya harus dibayar? Tentu saja tidak.

Jadi apa yang dilakukan Jokowi, sesungguhnya hanyalah pengulangan saja. Pilihannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan tetap saja berbasiskan pada modal pinjaman (utang) luar negeri dan atau investasi asing. Dan tindakan ini juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Politik ekonomi berdikari yang menjadi slogan Jokowi-Jk pada saat kampanye presiden lalu akhirnya hanya isapan jempol semata. Sinyal ekonomi-politik berdikari akan menjadi isapan jempol sebenarnya telah tampak sejak awal masa kampanye. Di mana Jokowi-Jk kurang banyak mengelaborasi soal penyelesaian utang luar negeri Indonesia dalam kampanyenya. Bahkan dalam bundle visi-misi yang diserahkan ke KPU, tercatat pasangan Jokowi-Jk hanya menyinggung soal pengurangan utang negara secara bertahap, tetapi tetap membuka peluang utang baru untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif.

Sehingga tidak terlihat sama sekali ketegasan pemerintahan Jokowi-Jk dalam menyelesaikan utang.

Penutup

Kini kas negara semakin “cekak”, pemerintah harus mengurangi biaya belanja kementerian dan lembaga negara. Hal ini terlihat dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2016, di mana pemerintah memangkas APBN 2016 sebesar Rp. 50,6 triliun. Efeknya hampir semua kementerian kena pangkas dalam hal pembelanjaan keuangan. Efisiensi memang menjadi pilihan terakhir, apalagi sampai saat ini serapan pajak belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.

Efisiensi terhadap belanja keuangan kementerian dan lembaga menjadi sinyal bahwa negara sedang tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai pembangunan. Program pengampunan pajak yang diharapkan bisa menambah pendapatan negara juga belum bisa terealisasi. Sedangkan di satu sisi, pemerintahan Jokowi-Jk terus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur. Pada titik inilah kita perlu mengingatkan pemerintah, jangan sampai, egoisme untuk mengejar pembangunan infrastruktur dengan mencitrakan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, malah harus

menambah hutang baru bagi negara, seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru.

Kini, pilihan-pilihan kebijakan pembangunan harus lebih rasionalitas. Jangan sampai pembangunan yang diharapkan mampu mempersempit kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah menjadi sumber petakan bagi masa depan negara karena dibiayai dari utang luar negeri.

Nah, jika pemerintah tetap memilih melakukan pembangunan infrastruktur dengan cara mengutang, maka sebenarnya pemerintah bukan sedang membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi yang terjadi adalah pemerintah sedang membangun utang. Jadi kapan utang-utang itu bisa dibayar? (*)

Kemiskinan dan Kesenjangan di Tahun Politik²⁷

Kemiskinan, kata yang cukup akrab terdengar di telinga kita. Bahkan di saat-saat masa kampanye, kata ini sering keluar dari mulut para juru kampanye yang selalu saja menjanjikan perubahan. Isu tentang kemiskinan memang cukup menarik, meski terbilang klasik. Klasik karena sejak jaman penjajahan hingga 68 tahun setelah kemerdekaan, urusan kemiskinan belum juga tuntas. Bahkan cenderung fluktuatif, bisa naik dan bisa juga turun.

Naik dan turunnya jumlah penduduk miskin sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kemiskinan. selain faktor inflasi, upah minimum buruh, tani, dan tenaga bangunan serta stabilnya harga bahan pokok.

²⁷ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

05 April 2014

Dalam beberapa laporan yang dilansir oleh BPS dan dikutip berbagai media, dikatakan angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 persentasi kemiskinan 16,7 persen. Kemudian pada tahun 2009 turun menjadi 14 persen dan turun lagi menjadi 13,33 persen pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 12,36 persen dan pada 2012 turun menjadi 11,66 persen. Terakhir pada Maret 2013 angka kemiskinan turun menjadi 11,37 atau turun menjadi 28.07 juta orang.

Hasil di atas menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan Indonesia relatif lambat. Jika dilihat, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin berkisar pada 0,87 persen pertahun. Begitupun, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan ini kemudian menjadi klem-klem penting bagi partai politik yang mendukung pemerintahan sepanjang 2009-2014 untuk dapat mendulang kembali suara pada Pemilu tahun 2014.

Benarkah penurunan angka kemiskinan ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan? Jika dilihat dari upaya penurunan angka kemiskinan, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah yang dari tahun ke tahun berhasil menurunkan angka

kemiskinan –meskin relatif kecil-. Tetapi, di satu sisi, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan (IKK).

Indeks kedalaman kemiskinan (IKK) justru menunjukkan kecenderungan naik. Pada Maret 2013, IKK tercatat 1,75 persen menjadi 1,89 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43 persen (maret) menjadi 0,48 persen. Kenaikan indeks ini menunjukkan dua faktor yang sedang terjadi di tengah masyarakat yaitu; semakin melebarnya kesenjangan antara penduduk miskin dan semakin rendahnya daya beli masyarakat. Ini yang kemudian membuat kemiskinan di Indonesia secara kualitas justru mengalami Involusi.

Pertumbuhan dan Kesenjangan

Meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai rata-rata 6,0 namun tidak semua pertumbuhan tersebut menguntungkan masyarakat. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 6,0 tersebut banyak digerakan oleh sektor jasa yang *notabene* lebih banyak diisi oleh masyarakat kelas menengah dan atas.

Sedangkan masyarakat kelas bawah yang lebih banyak berada pada sektor rill tidak mendapatkan manfaat yang berarti. Sektor pertanian yang menjadi tumpukan hidup bagi 40 persen angkatan kerja dan sekitar 60 persen rumah tangga miskin harus terjebak dalam pertumbuhan yang cukup rendah dalam beberapa tahun belakangan ini.

Tidak salah jika kemudian indeks gini berhasil menembus angka 0,41 poin pada tahun 2011 dan terus awet hingga sekarang. Angka ini dapat dimaknai 20 persen penduduk berpendapatan tinggi menikmati 48,94 persen dari total pendapatan yang tercipta dari hasil perekonomian. Sedangkan 40 persen penduduk berpendapatan rendah hanya dapat menikmati 16,88 persen dari total pendapatan yang tercipta dari hasil perekonomian.

Apa yang diharapkan dari *trickle down effect* (pertumbuhan yang menetes kebawah) tidaklah terbukti benar. Pada kasus ini, pertumbuhan ekonomi justru hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada pada lingkaran tertentu. Di Indonesia tidak jarang kita temukan orang kaya yang bertambah kaya dan juga orang kaya baru. Hal ini terungkap dari laporan Credit Suisse yang menyatakan pertumbuhan jumlah orang

kaya di Indonesia tercepat di dunia dengan peningkatan 5 kali lipat dalam satu dekade.

Hal ini terbukti pada tahun 2008 akumulasi kekayaan 40 orang terkaya setara dengan kepemilikan 30 juta penduduk, lalu pada tahun 2011 semakin melonjak setara dengan kepemilikan 77 juta penduduk miskin. Lantas apakah pertumbuhan ekonomi dan kemunculan orang-orang kaya baru pantas untuk dikleam menjadi satu keberhasilan pembangunan?

Tentunya pembangunan tidak hanya sebatas pertumbuhan ekonomi semata. Dudley Seers misalnya, seorang ekonom pembangunan asal Oxford, pada tahun 1970 dalam bukunya yang berjudul *The Meaning of Development*, menyatakan ada tiga tolak ukur pembangunan yaitu; apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Jika salah satunya saja memburuk, maka sangatlah aneh disebut pembangunan meski pendapatan berlipat.

Pentup

Berapa bulan yang lalu, banyak yang orang dihebohkan dengan fenomena Aisyah dan Ayahnya yang harus tinggal menggelandang di atas becak. Aisyah yang terbilang masih belia

harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan ayahnya yang juga menderita sakit. Mereka hidup di tengah kegelamoran masyarakat kota dan polusi asap yang dihasilkan dari mobil-mobil berharga ratusan juta rupiah.

Realitas dari hidup Aisyah dan ayahnya ini adalah satu dari sekian banyak kasus kemiskinan yang belum terselesaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah pemerintah yang baru nantinya dapat lebih fokus pada persoalan kemiskinan yang lebih substantif dan tidak hanya berorientasi pada angka-angka pertumbuhan? (*)

Puasa Subsidi BBM, Cukup-kah?²⁸

Anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2014 yang mencapai angka sebesar 210,7 triliun dengan kuota 48 juta kiloliter dapat dipastikan jobol atau melewati batas yang telah ditetapkan. Begitu kira-kira isi dari berita yang diterbitkan Medan Bisnis pada senin 21 April 2014. Dalam pemberita tersebut, pemerintah kemudian mewacanakan akan melakukan puasa BBM dua hari sepekan untuk mengatasi persoalan ini.

Buruknya sistem sistem pelayanan pada angkutan publik dan bertambahnya jumlah kendaraan dari tahun ketahun menjadi alasan utama penyebab bobolnya anggaran subsidi BBM. Memang jika dilihat, persoalan subsidi BBM seolah tidak pernah selesai. Ratusan triliun rupiah dari anggaran belanja negara tiap tahunnya harus dikururkan untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM yang justru

²⁸ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

05 Mei 2014

sangat menguntungkan bagi kalangan the have (berpunya).

Dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi persoalan subsidi BBM ini pemerintah seolah minim obsi. Jika tidak tetap melakukan subsidi, pasti mencabut subsidi. Dan setiap pencabutan subsidi selalu saja memunculkan respons negatif dari berbagai kalang yang berdampak pada munculnya aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tidak hanya itu, kenaikan BBM pasca pencabutan subsidi juga selalu diikuti oleh inflasi di pasar.

Belakangan, untuk mengatasi dampak-dampak yang muncul, pemerintah mencoba mencari jalan alternatif yang terkadang juga tidak masuk di akal. Misalnya, pemerintah sempat ingin mengeluarkan kebijakan perihal penggunaan kartu kendali untuk BBM bersubsidi di setiap SPBU. Namun kebijakan ini kembali gagal dijalankan dan dinilai terlalu rumit untuk dilaksanakan serta diterapkan pada tiap SPBU.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga masih terus mencoba untuk melakukan konversi dari BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas), baik untuk kendaraan pribadi dan atau untuk angkutan umum. Namun, apa hendak dikata, upaya itu terhalang oleh minimnya

infrastruktur yang ada, di mana minimnya jumlah SPBG menjadi kendala utama.

Kini pemerintah coba mencari jalan alternatif lainnya dengan mewacanakan puasa BBM bersubsidi 2 hari/minggu. Langkah ini diharapkan mampu menghemat anggaran subsidi BBM sebesar 1 triliun/minggu, atau sekitar 4 triliun/perbulan. Namun apakah nantinya kebijakan ini akan berjalan efektif? Dan apakah hanya dengan obsi puasa BBM bersubsidi 2 hari/pekan persoalan kemudian akan selesai?

Pertanyaan itu, memang sulit untuk dijawab. Tetapi, harusnya pemerintah sudah mulai tegas dalam beberapa peraturan, khususnya dalam mekanisme kepemilikan kendaraan-kendaraan pribadi. Setidaknya, pertumbuhan kendaraan pribadi dari tahun ke tahun haruslah dibatasi sembari memperbaiki sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik.

Jika untuk menekan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor dan memperbaiki sistem transportasi yang terintegrasi pemerintah belum sanggup mengatasinya, maka jangan harap puasa subsidi BBM akan berhasil mengatasi persoalan bobolnya anggaran. Diizinkan nya produksi mobil mewah di pasar Indonesia

setidaknya juga harus dipertanyakan kembali ke pemerintah.

Begitupun, persoalan utamanya dari meningkatnya konsumsi BBM dari tahun ke tahun tidak hanya terletak pada pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Namun ada dua hal lain yang harus dilihat yaitu tidak terintegrasinya sistem transportasi yang ada dan infrastruktur jalan raya yang pertumbuhannya sangat minim. Ini kemudian menjadikan persoalan ini sangat sistemik.

Jika mau uraikan kira-kira begini; buruknya sistem pelayanan transportasi darat mulai dari bus, metromini, angkutan kota, dan lain sebagainya membuat banyak orang beralih ke kendaraan pribadi. Betapa tidak, jika dilihat, adakah transportasi publik di negeri ini yang sesuai dengan standart yang ada? Tidak jarang kita temukan banyak angkutan umum yang tidak diremajakan, rangka mobil yang berkarat, kenalpot yang mengeluarkan asap hitam, dan plus supir yang ugal-ugalan di jalan raya. Pernah kita protes itu, dan kepada siapa kita harus mengadu tentang itu? Maka tidak jarang kita mendengarkan selentingan yang menyebutkan kalau mau cepat ke “surga” maka naiklah angkutan umum di Indonesia.

Selain persoalan tersebut di atas, kita juga sering saksikan - tidak usah jauh-jauh, di Kota Medan saja - adanya beberapa angkutan kota yang memiliki line trayek yang sama. Terkadang yang hanya membedakan cuman pada satu jalan, misalnya yang satu lewat dari jalan halat dan yang satu lewat dari jalan HM Joni, sisanya secara keseluruahn line jalannya tetap sama.

Banyaknya jumlah angkutan kota yang tidak tertata dan terintegrasi dengan baik tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana-pun mereka tetap menjadi bagian dari penikmat BBM bersubsidi. Harusnya, ada satu pola angkutan kota yang dibangun secara terintegarasi antara satu wilayah ke wilayah lain, antar satu kota pinggiran ke pusat-pusat kota dan itu dikontrol melalui terminal yang berada di perbatasan antara pusat kota dan kota-kota pinggiran.

Bukan hanya angkutan kota, bus atau metromini, kini kita juga menemui satu fenomena tentang becak bermotor (betor). Pertumbuhan betor juga tidak bisa direm dengan cukup baik. Alasannya, mereka -para pengemudi betor- adalah orang-orang yang juga sedang bekerja dan mencari nafkah di jalan. Mereka, seolah menjadi opsi lain di antara banyak pilihan transportasi umum. Begitupun, kita masih bingung untuk menyatakan apakah

betor layak untuk dikatakan sebagai satu transportasi umum yang sudah memenuhi standart?

Kini, yang tampak adalah, seluruh transportasi yang ada, baik kendaraan pribadi - sepeda motor, mobil - angkutan umum - betor, bus, metromini - dan lainnya sebagainya tumpah ruah menjadi satu di satu jalan raya yang tidak pernah bertambah lebar dan berakibat pada kemacetan di jalan raya. Dalam banyak kajian, kemacetan selalu saja memicu konsumsi BBM yang lebih banyak dari pada kebutuhan biasanya.

Tidak heran jika, konsumsi BBM di beberapa kota besar di Indonesia melebihi konsumsi BBM di beberapa kota lainnya. Hal ini akibat dari pertumbuhan kendaraan pribadi, sistem angkutan umum yang tidak tertata secara terintegrasi dan pertumbuhan jalan raya yang melambat. Akhirnya dari berapa persoalan yang ada, sudah cukupkah puasa subsidi BBM dapat dipakai untuk mengatasi persoalan jebolnya anggaran subsidi BBM? Kenapa tidak dilakukan perbaikan yang lebih intensif dan mendalam berkaitan dengan sistem transportasi yang ada?
(*)

Kemacetan Lalu Lintas dan Potensi Ekonomi²⁹

Udara sore ini sedikit lebih panas dari biasanya, pancaran matahari dengan sangar menghantam wajah-wajah para pekerja kantoran yang tampak musam. Mata-mata mereka sibuk melihat cela-celah jalan yang bisa disusupi. Kemacetan sore memang selalu menjadi satu aktifitas yang harus dilalui oleh setiap warga kota. Tidak hanya bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi warga Bandung, Surabaya, Makasar dan Medan yang kini mengalami hal serupa.

Di tengah kemacetan sore itu, terdapat beberapa anak-anak yang sibuk mengatur lalu lintas yang ada di setiap persimpangan yang tidak memiliki *traffic light* dan tidak diawasi oleh satuan lalulintas. Mereka menawarkan jasa untuk setiap mobil yang ingin memutar atau menyebrang. Bayarannya tidak besar memang, cuman 1000 atau 2000 rupiah. Namun jika dikalkulasikan penghasilan mereka bisa

²⁹ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

22 Pebruari 2014

mencapai 30 sampai 50 ribu rupiah bahkan bisa lebih.

Mungkin jumlah rupiah yang terbilang besar tersebut membuat wajah mereka masih bisa bersemangat di tengah gempuran cahaya panas sang surya. Semangat mereka ini kemudian mengingatkan saya kepada Yogi (bukan nama sebenarnya). Seorang anak berusia 14 tahun yang merupakan satu dari beberapa subjek penelitian saya tentang fenomena pekerja anak di jalanan. Pada penelitian ini, Yogi saya masukkan kedalam katagori pengatur lalu lintas *informal*. Meski dalam beberapa istilah lain lebih populer dikenal sebagai “polisi cepek” atau “pak ogah”.

Yogi mempunyai alasan tersendiri ketika ditanya mengapa harus bekerja di jalanan dan memilih untuk menjadi pengatur lalu lintas. Ia mengaku, bekerja di jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ayah Yogi meninggal saat usianya genap 10 tahun. Praktis, tanggung jawab keluarga kini ada di pundak ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Gaji ibunya yang tidak terlalu besar itu-lah yang harus dipakai untuk memenuhi biaya hidup dan

biaya pendidikan kedua adiknya yang masih berumur tujuh dan delapan tahun.

Selama empat jam bekerja di jalanan, Yogi bisa menghasilkan 20 sampai 30 ribu rupiah. Hasil jeri payahnya ini kemudian ia bagi menjadi tiga. Sebagian ia berikan kepada ibunya untuk keperluan keluarga, sebagian ia tabung dan sebagian lagi ia gunakan untuk keperluan sehari-harinya. Ironi memang, tetapi itu adalah sebagian fakta dari kehidupan pekerja anak di jalanan.

Dari sekian banyak fakta yang terkumpul, ada yang satu hal yang menarik dari alasan mengapa Yogi memilih bekerja sebagai pengatur lalu lintas *informal*. Baginya, menjadi pengatur lalu lintas informal adalah satu hal yang menguntungkan, di mana dengan kerja yang sedikit dapat mengumpulkan uang yang banyak.

Hitungannya begini, jika setiap mobil memberikan 1000 rupiah, dan dalam empat jam mereka bisa membantu penyebrangan tiga puluh mobil maka mereka bisa mengantongi 30 ribu rupiah dalam empat jam.

Alasan kedua, pekerjaan menjadi pengatur lalu lintas informal tidak membuat dirinya menjadi seorang peminta-minta tetapi menjadi seorang

yang menawarkan jasa terhadap sekelompok orang yang membutuhkan jasa ketika kemacetan terjadi.

“Kami ini hanya membantu para pemilik mobil yang kesusahan ketika ingin menyeberang dan berbelok. Hanya itu yang kami berikan kepada mereka, kalau dibayar kami ambil, kalau tidak ya juga tidak ada masalah. Kami tidak memaksa dan kami juga tidak meminta-minta,” ujar Yogi ketika diwawancarai.

Mengulang Penjelasan Durkheim

Emile Durkheim adalah satu dari sekian banyak sosiologi di era modern. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Kant, Simon, dan Comte. Pada tahun 1893, Durkheim mengeluarkan karyanya monumentalnya yang berjudul; *The Division of Labor in Society*. Karyanya tentang pembagian kerja dalam masyarakat ini kemudian menjadi catatan penting dalam ilmu sosial, yang sampai sekarang masih dijadikan rujukan untuk menjelaskan pola pembagian kerja di masyarakat yang kemudian berhasil mempengaruhi perubahan struktur pada masyarakat.

Jika merujuk pada karya Durkheim ini, maka munculnya pengatur lalu lintas informal di atas dapat dijelaskan melalui apa yang disebutnya

sebagai solidaritas organis. Masyarakat dengan solidaritas organis dicirikan Durkheim sebagai masyarakat modern yang terdiferensiasi dan terspesialisasi. Artinya, dalam masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis tersebut, setiap orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Oleh kerananya, tidak salah jika kemudian munculnya pengatur lalulintas informal dapat dijelaskan sebagai sebab dari ketidakhadiran Institusi pemerintah yang seharusnya bekerja dan bertanggung jawab atas persoalan kemacetan di setiap persimpangan jalan di kota.

Ketiadaan tanggung jawab tersebut kemudian diisi oleh mereka yang jeli melihat peluang dan menjadikan kemacetan lalulintas sebagai potensi ekonomi dan pekerjaan baru. Sehingga terbentuk satu profesi dan identitas pekerjaan baru di tengah masyarakat yang pada akhirnya menjadi satu bagian penting dari struktur sosial.

Penutup

Sudah 30 menit saya dan teman terjebak macet dan berhasil memutar arah berkat bantuan para pengatur lalulintas informal. Kaca mobil diturunkan, teman tadi memberikan uang tanda terimakasih, namun setelah itu ia berkomentar miring; "harusnya kita tidak membayar lagi,

pajak yang kita bayar sudah diberikan kepada mereka yang harusnya bekerja untuk mengatur kelancaran kita berlalulintas. Sehingga tidak membiarkan anak-anak ini bekerja di jalanan sebagai pengganti tugas mereka. Bukankah anak-anak ini juga dilindungi oleh undang-undang?" pungkasnya sembari menggerutu. (*)

Dilema Pembangunan Kesehatan³⁰

Di Indonesia, kata pembangunan menjadi sebuah kata kunci yang dipahami sebagai upaya memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Namun, arti kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat sangat sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak heran jika kemudian pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang diperoleh masyarakat dalam bidang ekonomi saja.

Meminjan pemikiran Armartya Sen, seorang pemenang nobel ekonomi tahun 1998, yang dengan bijaknya mengatakan, hampir semua pendekatan kesejahteraan berujung kepada pertimbangan terhadap kesehatan dan pendidikan selain dari pada pendapatan (ekonomi). Analisis Sen ini kemudian dijadikan bagian dari apa yang disebut PBB sebagai *Indeks Pembangunan Manusia* (Todaro:2009).

³⁰ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

Oleh karenanya, jika pembangunan ingin berjalan secara optimal, maka ketiga pendekatan tersebut harus terintegritas dengan maksimal. Di mana setiap pendekatan memiliki fungsi tersendiri. Misal, fungsi peningkatan pendapatan ekonomi, dapat mengacu pada bagaimana upaya melakukan pertumbuhan kewirausahaan, industrialisasi dan penarikan pajak bagi setiap individu, yang nantinya diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan.

Sedangkan untuk pendidikan dapat diartikan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya manusia demi tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan. Terakhir adalah pendekatan kesehatan, yang dapat merujuk pada bagaimana merawat dan melindungi masyarakat dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya (seperti: tertimpa penyakit atau bencana alam dll).

Secara logis, fungsi pendapatan ekonomi memang diperlukan agar perawatan kesehatan dan pengembangan pendidikan dapat terlaksana dengan maksimal. Karena tanpa pendapatan ekonomi yang memadai, bagaimana mungkin suatu wilayah dapat mengembangkan sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Begitu juga

dalam skala mikro, pendapatan ekonomi terkadang juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.

Namun, fungsi pendidikan dan kesehatan juga memiliki juga memiliki posisi penting dalam ranah pembangunan. Karena kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Oleh karenanya ketiga fungsi tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain.

Jika dianalogikan, pendapatan ekonomi sebagai sebuah kepala pembangunan, maka kesehatan dan pendidikan adalah kedua kaki yang menopang kepala tersebut agar tidak terjatuh. Jelas bahwa, fungsi pendidikan dan kesehatan juga merupakan fungsi utama dalam pembangunan.

Di antara banyak fungsi kesehatan yang belum berjalan maksimal di tengah-tengah masyarakat adalah masih belum meratanya pelayanan kesehatan antar kabupaten/kota se-Sumut. Hal ini tampak dari sedikitnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memiliki kualitas pelayanan tipe A dan tipe B.

Ketidakhormatan juga didukung dari data yang dikeluarkan oleh PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) pada tahun 2013 yang menyatakan baru 38 persen rumah sakit di Sumatera Utara yang terakreditasi.

Penilaian akreditasi itu sendiri biasanya menyangkut bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap pasien, standart prosedur yang dijalankan, standart profesi dan para pekerja rumah sakit, serta pelayan medis. Dengan demikian tidak salah jika kita bertanya, apakah pemerintah benar-benar *welcome* terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sumut?

Kenyataan Dari Pelayanan Kesehatan

Permasalahan pelayanan tidak hanya sebatas *service* yang diberikan oleh pekerja puskesmas, klinik, atau rumah sakit terhadap seorang pasien tetapi juga menyangkut tersedianya sarana kesehatan yang menunjang, seperti ruang operasi, IGD, poliklinik, ruang rawat balita dan ruangan kamar rawat inap bagi pasien. Namun tidak semua rumah sakit yang ada di Kabupaten/Kota di Sumut memiliki ruangan-ruangan tersebut, jika pun ada mungkin kondisinya masih jauh dari layak.

Dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan berakhir pada tahun 2015 ini, pembangunan kesehatan dapat dilihat dalam dua indikator. Pertama indikator komperhensif, di mana penilaian dilihat dari rendahnya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan serta usia harapan hidup yang meningkat.

Kemudia indikator yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang dapat dinilai dengan terpenuhinya rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah penduduk yang seimbang, distribusi tenaga kesehatan yang merata dan yang terpenting adalah informasi lengkap tentang sarana dan prasarana kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Namun apakah indikator-indikator tersebut sudah dapat kita penuhi secara layak? Jangankan bicara soal jumlah tenaga kesehatan yang harus seimbang dengan jumlah penduduk, untuk bicara soal informasi dan data lengkap sarana rumah sakit di satu wilayah saja kita masih tidak mampu.

Beberapa bulan lalu, ketika saya menghadiri sebuah diskusi bersama beberapa pakar kesehatan, mereka mengatakan dari sekitar 78 rumah sakit yang ada di Kota Medan hanya sepuluh persennya saja yang memiliki ruangan

ICU. Itu *pun*, tutur mereka, belum lagi ditinjau berapa jumlah daya tampung yang mampu diterima oleh setiap ruangan ICU di setiap rumah sakit.

Hal ini bertambah ironi jika kita berbicara soal ruangan khusus perawatan bayi seperti *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU). Beberapa rumah sakit yang mempunyai ruangan tersebut? Jika memiliki, berapa jumlah daya tampung yang mereka punya? Padahal NICU menjadi satu dari sekian banyak fasilitas penting untuk mendukung proses pasca persalinan yang *notabene* menjadi satu dari sekian banyak variabel yang mendukung harapan hidup bayi.

Pentingnya NICU sebagai satu sarana penunjang pasca proses persalinan dapat dilihat dari kasus yang pernah terjadi di Jakarta. Di mana keterbatasan sarana (ruangan rawat) NICU di sebagian RS di Jakarta mengharuskan bayi bernama Dera meninggal sebelum mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan.

Kasus ini menjadi sebuah dilema besar dalam dunia kesehatan, di mana Jakarta sebagai sebuah kota megapolitan yang berkembang cukup pesat dalam berbagai sektor ternyata

masih belum mampu untuk mempersiapkan layanan kesehatan yang baik bagi warganya.

Penutup

Akses terhadap kesehatan memang menjadi begitu penting karena berkaitan dengan keberlanjutan hidup manusia dan ini masih menjadi ironi di beberapa daerah yang gagal memenuhi pelayan kesehatan mengharuskan warganya untuk hijrah ke kota lain.

Ini terungkap dari sepasang suami-istri yang harus rela hijrah ke Medan dan meninggalkan kehidupan sosial ekonominya di Labuhan Batu Utara demi mendapatkan pelayanan *hemodialysis* (cuci darah) bagi sang istri.

“Saya diminta untuk membawa istri saya ke medan, karena rumah sakit disana tidak ada menyediakan *hemodialysis* (cuci darah). Istri saya harus mendapatkan pelayanan cuci darah dua kali seminggu. Jadi untuk menghemat biaya kami harus sewa rumah di sini dan meninggalkan rumah kami di sana,” jelasnya dengan mata berkaca-kaca pelayanan. (*)

Pusaran Dilema

Industri Kreatif³¹

Industri kreatif, kata ini masih menjadi perbincangan hangat dikalangan para pengusaha, pelaku industri kreatif dan pemerintah. Industri yang tebilang belia ini masih diperlakukan seperti “anak tiri”, meski pada kenyataannya industri kreatif telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bukan tanpa sebab, sulitnya mengakses modal pinjaman ke perbankan menjadi tanda bahwa industri ini belum mendapatkan tempat yang pas. Fakta ini mengingatkan saya kepada seorang teman - pemilik biro advertising (percetakan, pembuatan konsep iklan dan *branding* produk) - yang mengaku sangat sulit dalam mengembangkan bisnisnya karena kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal dari perbankan.

³¹ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

04 Maret 2014

“Kami ini bekerja dengan otak dan hati, hanya itu modal yang kami punya. Apa kami harus menjaminkan itu ke bank?” Itulah komentar miring yang disampaikan teman tadi kepada saya.

Kesulitan dalam meminjam modal memang selalu menjadi alasannya klasik, perbankan tidak akan memberikan pinjaman jika tidak ada jaminan atas penjaminan tersebut. Itu bagian dari aturan yang harus dijalan dan cukup merepotkan bagi para pelaku industri kreatif. Persoalan lain yang muncul kemudian adalah sulitnya mencari pangsa pasar untuk produk yang akan ditawarkan atau dijual kepasar. Setidaknya, apa yang dikeluhkan oleh teman ini akan sama persis dengan apa yang dialami oleh seluruh pelaku industri kreatif lainnya.

Anak Muda Dan Hobinya

Tidak bermaksud membatasi usia, tetapi hampir rata-rata para pelaku industri kreatif adalah mereka yang masih berada pada usia muda (20 sampai 30 tahunan). Atas dasar hobi mereka menjalankan bisnisnya sampai menjadi seorang professional. Prosesnya tidak instan memang, *try and error* yang dibalut ide, pengalaman dan

tindakan yang bersifat *just do it* adalah rumus utamanya.

Akan tetapi kebanyakan tindakan yang muncul kemudian hanya berupa keinginan untuk dapat dilihat dan dihargai sebagai sebuah bentuk “eksistensi diri” atau dalam bahasa lain disebut sebagai *self actualization needs*. Sehingga, kreatifitas mereka terkadang identik dengan sebuah idealisme.

Jika ini yang muncul, maka kreatifitas bukanlah suatu hal yang dapat dinilai dengan materi tetapi ia adalah sebuah nilai keharusan yang muncul atas dasar keinginan dan kepuasan untuk suatu apresiasi besar. Begitupun, jika harus dinilai dengan materi, maka ia membutuhkan angka-angka yang tidak sederhana.

Di Medan, secara kasat mata, kebanyakan para pelaku industri kreatif adalah mereka yang berusia muda. Berbisnis dengan bermodalkan kemampuan, skill dan hobi adalah kenikmatan yang luar biasa. Dalam dunia fasion misalnya, banyak baju hasil karya mereka yang patut diacungi jempol. Cara pemasarannya sederhana, melalui teman-ke teman yang biasanya aktif pada sebuah komunitas, entah group band, klub olahraga, dan lain sebagainya. Mereka berusaha

untuk membrending diri sendiri dan teman-temannya. Ya, begitulah cara mereka membentuk pangsa pasarnya.

Menghidupkan Industri Kreatif

Untuk dapat menjadikan kreatifitas sebagai sebuah industri bisnis yang profesional – tidak hanya sebatas pada nilai “idealisme” semata – maka dibutuhkan beberapa point penting sebagai pendukung, di antaranya adalah; keunikan/ciri khas produk, analisa kebutuhan pasar, manajemen promosi dan jaringan (*networking*) yang mencakup *fans*, promotor, mitra kerja.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas persoalan ciri khas produk dan analisa pasar, tetapi lebih kepada upaya promosi dan membangun jaringan kerjasama. Untuk menjawab persoalan tersebut saya mencoba memberikan satu usulan yang semoga dapat diterima oleh para pelaku industri kreatif.

Membangun jaringan memang bukan suatu hal yang mudah, setidaknya butuh waktu dan proses yang lama. Untuk itu dibutuhkan satu wadah (komunitas) tempat kerjasama antar para penggiat industri kreatif. Wadah ini merupakan tempat kerjasama berkumpulnya segala jenis

industri kreatif - mulai dari arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, kuliner, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film documenter dan fotografi, periklanan, layanan computer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, serta permainan interaktif - untuk membicarakan perkembangan bisnis mereka, membuat strategi pemasaran dan bertukar informasi. Jadi wadah ini lebih bersifat sebagai tempat silaturahmi antar pemilik dan pelaku industri kreatif.

Membangun Jaringan

Mendisain setiap pertemuan bulanan, mengatur jadwal pengisi acara yang akan digilir satu-persatu kesetiap pelaku industri untuk menampilkan hasil-hasil karya mereka dan berdiskusi dengan para pelaku industri lainnya - yang tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan masyarakat umum untuk menciptakan *fans* dan pasar baru - serta aparat pemerintah dan *stakeholder* terkait (perbankan dan perusahaan-perusahaan swasta). Dari kegiatan pertemuan bulanan ini diharapkan mampu membukan mata masyarakat, aparat pemerintah dan *stakeholder* terkait bahwa

industri kreatif layak untuk didukung perkembangannya.

Setidaknya, - jika belum mampu mendapatkan bantuan pinjaman atau dana CSR – para pelaku industri kreatif dapat melebarkan sayap pasar mereka dengan menggarap beberapa proyek kreatifitas yang memang ada disetiap prusahaan. Bisa saja berupa, pembuatan film dokumentasi, foto dokumentasi, disain kantor atau ruangan kerja, pengadaan barang-barang – yang bisa saja dikerjakan oleh kelompok-kelompok pengerajin lokal – surve atau riset. Sedangkan untuk pelaku industri kuliner, musik, seni pertunjukan dan permainan interaktif bisa saja mengambil projek event tahunan yang biasa dilaksanakan perusahaan-prusahaan. Baik itu, peringatan hari ulang tahun, *family gedring*, seminar, pelatihan dan lain sebagainya.

Penutup

Industri kreatif sering dikaitkan dengan industri kecil-kecil tapi banyak. Meskipun begitu, Industri ini tidak boleh dipandang remeh. Bayangkan, pada tahun lalu saja, nilai ekspor bisnis yang banyak dilakoni anak muda ini mencapai 26 triliun. Harusnya, pemerintah lebih

peduli dengan kondisi yang dialami oleh para pelaku industri kreatif dan mulai *maintenance* upaya pengembangan industri kreatif dengan mendorong pihak perbankan untuk terlibat aktif dalam pemberian pinjaman modal.

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong perusahaan-perusahaan negara agar lebih mengutamakan pemakaian jasa industri kreatif lokal dalam setiap kegiatan yang membutuhkan tenaga-tenaga kreatif. Semoga! (*)

Risalah Pertanian di Tengah Pertumbuhan Ekonomi³²

Sejak dua tahun belakang ini, indeks gini belum juga mengalami perubahan yang signifikan, setidaknya masih berada pada 0,413 poin dan masih bertahan hingga sekarang. Tentunya ini menjadi keanehan tersendiri, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya mencapai 5,0 hingga 6,0 persen.

Angka di atas dapat menjadi satu kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berkorelasi (berhubungan) positif terhadap tingkat kesenjangan ekonomi. Pada kasus ini lah, apa yang diharapkan dari *trickle down effect* (pertumbuhan yang menetes ke bawah) tidak berlangsung secara sempurna.

Mekanisme pasar yang bergerak bebas dengan tanpa atau kontrol yang lemah, membuat

³² Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

21 April 2014

beberapa pelaku pasar harus terpinggirkan. Di mana tampak sesungguhnya kebijakan ekonomi telah didikte pasar. Ini yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kaku dan belum mampu menciptakan kesejahteraan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pembangunan industri manufaktur dan pertanian yang stagnan dan berdampak pada tingginya angka kesenjangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,0 persen sesungguhnya lebih banyak digerakan oleh sektor jasa yang *notabene* banyak diisi oleh masyarakat kelas menengah dan atas. Sedangkan untuk kelas bawah yang lebih banyak bekerja pada sektor rill tidak merasakan manfaat yang berarti. Hasilnya, rasio gini mencapai angka 0,413, yang bermakna kesenjangan semakin melebar karena penciptaan lapangan pekerjaan yang berbasis industri ekspor seperti manufaktur dan pertanian mengalami stagnanisasi.

Khusus untuk sektor pertanian yang menjadi tumpukan hidup bagi 40 persen angkatan kerja dan sekitar 60 persen rumah tangga miskin harus terjebak dalam pertumbuhan yang cukup rendah dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Prof. Dwi Andreas Santosa, sejak tahun 2003

hingga 2013, sebanyak 5,1 juta rumah tangga petani kehilangan lahan pertanian. Sebelumnya mereka mempunyai 1.000 meter persegi (*Kompas*, 3/4/14).

Kini, hampir di semua tempat dan lokasi di mana bermukimnya kaum-kaum tani selalu saja menjadi kantong-kantong kemiskinan. Bagi mereka -kaum tani- yang tidak sanggup lagi mengelola lahan pertaniannya dengan berbagai alasan, lebih memilih untuk menjual lahan pertaniannya kepada pengembangan. Setelah itu, mereka -kaum tani - ini mencoba mencari peruntungan dengan hijrah ke kota-kota. Namun, celakanya, banyak di antara mereka pada akhirnya hanya menjadi kaum miskin kota dan bekerja pada sektor-sektor informal.

Hal ini kemudian menjadi bukti bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah yang sangat abai terhadap sektor pertanian. Apa yang menjadi bukti dari abainya pemerintah terhadap sektor pertanian adalah penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sensus Pertanian tahun 2013 mencatat sebanyak 5,1 juta keluarga tani tercerabut dari sektor pertanian sejak 2003.

Selain itu, bukti abainya pemerintah terhadap sektor pertanian tampak dari meningkatnya jumlah pangan dalam beberapa tahun terakhir. Gula misalnya, pada tahun 2004 diimpor sebesar 1.200,0 (ribu ton) dan pada tahun 2013 impor gula mencapai 2.500,0 (ribu ton). Tampak kenaikan impor gula sekitar 108,33 persen sepanjang tahun 2004-2013. Sedangkan beras, pada tahun 2004 mengalami impor sebesar 236,9 (ribu ton) dan pada tahun 2013 naik menjadi 302,3 (ribu ton). Di mana kenaikan impor sepanjang tahun 2004-2013 mencapai 27,61 persen (*Sumber: Kompas 18/3/14*).

Memang dalam banyak kasus, opsi import pangan selalu menjadi obsi yang relative paling gampang digunakan untuk mengendalikan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Pilihan kebijakan ini dianggap paling tepat untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi disektor pangan.

Selain itu, impor pangan juga menjadi lahan baru bagi pihak ketiga yang memang sengaja mencari keuntungan di tengah ketidakpastian pasar untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen akan pangan. Harga pangan impor yang jauh lebih murah, menjanjikan untungan yang cukup besar untuk dijual kembali di pasar

Indonesia. Tidak salah jika kemudian dalam beberapa kasus impor pangan yang memakai sistem rente itu ternyata juga melibatkan oknum-oknum partai politik, pejabat pemerintah dan juga pengusaha.

Meski demikian, alasan apapun itu, kalau sudah menyangkut impor pangan pastinya akan berdampak negatif terhadap kehidupan para petani. Oleh karenanya, kini, kita selaku konsumen pangan dan juga para petani yang bekerja disektor pertanian sangat membutuhkan satu model kebijakan baru yang lebih mengutamakan sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan dan perluasan lapangan pekerjaan. Mengingat, seperti yang diutarakan sebelumnya sektor pertanian menjadi tumpuan hidup bagi 40 persen angkatan kerja.

Sehingga, tidak salah jika kita mengatakan bahwa jantung persoalan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini adalah persoalan tentang bagaimana pemerintah mampu untuk menerapkan satu model kebijakan yang lebih mengutamakan sektor pertanian. Sebab, setinggi apapun pertumbuhan ekonomi itu, jika sektor yang menyerap banyak tenaga kerja - seperti sektor pertanian- tidak dibangun, maka

ketimpangan dan kesenjangan akan terus terjadi.

Akhirnya, di tengah euforia pemilu legislative yang telah usai dan eksekutif yang akan berlangsung, adakah kita menemukan sosok wakil rakyat dan atau presiden yang lebih peduli dan fokus pada persoalan ini? Atau adakah satu solusi baru yang dapat mereka tawarkan untuk dapat mengatasi permasalahan ini? (*)

SPG Dalam Bingkai Produksi Kapitalisme³³

Puluhan orang mendatangi gerai-gerai pameran bulanan, beberapa produk dipamerkan di atas estalase-estalase mewah yang tertata rapi. Tidak jauh dari estalase mewah itu, beberapa perempuan berdiri dengan anggun, membagi brosur dan menawarkan suatu produk yang sedang dipamerkan.

Wajah mereka tampak mempesona dibalut serpihan *make up* dan lipstick yang serasi, tubuhnya tinggi - meski tidak semua dapat ditemui dengan tinggi yang sama, - namun tetap terlihat anggun. Senyum sumbringah selalu tampak setiap kali menyambut para pembeli datang. Puluhan pertanyaan dijawab dengan nada yang ramah. Seolah mereka mengetahui segala bentuk hal yang remeh-temeh dari produk tersebut.

Begitulah kira-kira gambaran dari sebuah event pameran yang selalu tersaji di hampir setiap

³³ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

08 Maret 2014

plaza dan mall-mall di beberapa kota besar. Perempuan yang pada konteks ini disebut sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) memang selalu menjadi bagian penting dalam produksi kapitalisme. Mereka - para kapitalisme itu - selalu menampilkan kecantikan dan keindahan tubuh perempuan untuk mensiasati penjualan produksi mereka. Ini yang kemudian disebut oleh Lyotard - seorang filsuf berkebangsaan Prancis - sebagai bentuk dari ekonomi libido.

Meminjam Gagasan Foucault

Michel Foucault adalah satu dari beberapa filsuf, sejarawan dan sosiolog berkebangsaan Prancis. Satu karya besarnya adalah *the history of sexuality* (sejarah seksualitas). Dalam gagasannya, Foucault melihat ada dua bentuk kekuasaan yang beroperasi pada tubuh manusia. *Pertama*, kekuasaan yang memancar dari dalam tubuh berupa hasrat dan potensi libido. *Kedua* adalah kekuasaan atas tubuh, yaitu kekuasaan dari luar (*eksternal power*) yang mengatur segala bentuk tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh tubuh seperti aturan hukum, undang-undang, dan nilai dan norma keagamaan.

Kedua bentuk kekuasaan ini biasanya saling bertentangan, di mana hasrat dan libido selalu mencoba menentang kekuasaan eksternal berupa

aturan-aturan hukum dan agama. Ia - hasrat dan libido - biasanya melakukan revolusi tubuh agar terbebas dari berbagai macam aturan. Pada titik ini, kapitalisme melalui budaya produksinya mencoba masuk dan membatu hasrat dan libido untuk dapat membebaskan diri.

Pada kasus SPG ini, kapitalisme coba membebaskan hasrat dan libido terhadap kukungan aturan hukum dan aturan keagamaan. Setidaknya upaya pembebasan itu bisa dijelaskan dengan alasan profesionalisme kerja. Namun, ketika alasan ini diterima maka kapitalisme akan menggrogoti sisi lain kebebasan tersebut, yaitu mengeksploitasi potensi atas hasrat dan libido untuk kemudian dikomersialisasikan.

Tubuh-tubuh SPG sengaja didampirkan dengan berbagai jenis barang-barang produksi yang sedang dipromosikan atau dijual. Bahasa symbol dan tanda dari tubuh SPG yang indah, anggun dan seksi (meski tidak semua SPG berpenampilan seksi), serta di tambah wajah manis dan senyum ramah, menjadikan tubuh-tubuh SPG memiliki nilai tukar dan nilai keuntungan yang sangat menjanjikan bagi kaum kapitalisme.

Tidak salah jika kemudian SPG menjadi sebuah bingkai untuk mempercantik dan memperindah produksi produk-produk kapitalisme yang ingin dipromosikan dan dijual di pasar. Ini yang dalam pengertian ekonomi libido juga dapat disebut sebagai upaya menjadikan segala bentuk energi libido dari dalam tubuh manusia sebagai komoditas dalam rangka mendatangkan dan mendapatkan keuntungan.

Tidak Ada Pilihan Lain.

Bagi beberapa SPG yang coba saya wawancarai, mengakui bahwa tidak ada pilihan pekerjaan lain. Keinginan untuk dapat hidup mandiri dan tidak lagi menjadi beban keluarga menjadi alasan utama mereka memilih untuk berprofesi sebagai SPG. Bukan tanpa sebab, dengan berprofesi sebagai SPG mereka dapat mengumpulkan pundi-pundi uang yang lebih banyak dalam waktu singkat.

Untuk satu kali event mereka biasanya dibayar minimal 150 s/d 200 ribu rupiah dengan waktu kerja enam jam untuk I *shift*. Jadi jika mereka mulai bekerja dari jam 9 pagi, maka selesainya jam 4 sore. Bagi beberapa SPG yang giat, mereka akan melanjutkan pekerjaan untuk *shift* ke II, dari jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam.

Jika bekerja dengan dua *shift* sekaligus maka setiap SPG dapat membawa uang pulang ke rumah sekitar 300 s/d 400 ribu rupiah dalam sehari. Untuk setiap kali event besar biasanya akan berlangsung dalam waktu 4 s/d 7 hari. Banyangkan, jika event berlangsung 5 hari saja dan mereka bekerja *full time*, maka mereka bisa membawa pulang uang berkisar Rp. 1.500.000,- s/d 2.000.000,-. Jika bekerja *part time* maka angka yang bisa dibawa pulang berkisar Rp. 750.000,- s/d 1.000.000,-. Angka-angka memang terbilang cukup menjanjikan, apalagi dengan waktu kerja yang tidak terlalu lama.

Meski demikian, berprofesi sebagai SPG ini bukan tanpa resiko. Selain konstruksi sosial (pandangan) masyarakat yang selalu berpandangan negative terhadap profesi SPG ini, beberapa SPG yang diwawancarai juga mengaku pernah didatangi ibu-ibu dan dibentak-bentak karena dianggap “seolah sedang menggoda suami mereka” saat mempromosikan suatu produk. Jika hal ini terjadi, mereka harus sabar dan menjelaskan bahwa itu hanya kesalah pahaman dan tidak ada maksud untuk berbuat seperti itu.

Penutup

Begitupun, beberapa dari SPG mengaku tetap ingin mencari pekerjaan lain. Bagi mereka berprofesi sebagai SPG tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa dijadikan sebagai pekerjaan yang tetap.

“Kalau kita sudah tua, keriput dan tidak cantik lagi, mana mungkin kita masih bisa bekerja sebagai SPG. Jadi ada masa waktunya. Kalau ada pekerjaan yang lain yang lebih memadai pasti saya pilih pekerjaan tersebut.” ungkap salah seorang SPG. (*)

Waktunya (Menuai) Gerakan Filantropi³⁴

Tepat pada awal April lalu di satu ruangan hotel bintang lima di Jakarta, Bill Gates menyebutkan Indonesia “fantantis dan luar biasa.” Apresiasi itu diberikan Bill Gates atas kepedulian para pengusaha Indonesia terhadap gerakan filantropi.

Tercatat, sebanyak 5 juta dollar AS atau sekitar 50 Milliar berhasil dikumpulkan oleh para pengusaha Indonesia pada malam pertemuan itu. Jika ditotal dengan sumbangan yang diberikan oleh Bill Gates maka tercatat sumbangan yang berhasil dikumpulkan oleh para pengusaha berlabel nasional dan internasional ini mencapai 900 miliar rupiah.

Dana yang berhasil dikumpulkan tersebut – menurut berbagai media- nantinya sekitar 75 persennya akan disumbangkan untuk keperluan penanganan masalah HIV/AIDs, malaria dan tuberculosis (TB) di Indonesia di bawah global

³⁴ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

28 April 2014

fund, serta untuk program keluarga berencana. Sisanya, sebesar 25 persen akan disumbangkan untuk memerangi polio, khususnya di Pakistan, Nigeria dan Afganistan.

Apa yang diapresiasi oleh Bill Gates kepada para pengusaha Indonesia yang ikut menyumbang dalam gerakan amal tersebut dapat dikatakan tidaklah berlebihan. Pasalnya, gerakan filantropi di tengah masyarakat Indonesia memang terbilang sudah mendarah daging dan bahkan telah menjadi satu budaya tersendiri.

Fakta ini dapat dilihat dari munculnya hari sedekah nasional sejak tahun 2012 lalu. yang penyelenggaraannya selalu dilaksanakan pada tanggal 27 April. Kemunculan gerakan ini konon katanya dimulai dari seruan ustad Yusuf Mansur pada satu acara di stasiun tv swasta nasional. Ustad Yusuf menantang siapa saja untuk bisa melakukan sedekah yang lebih besar. Setidaknya sehari dalam setahun semua keuntungan disedekahkan.

Bak dayung bersambut, tantangan ustad Yusuf ini ternyata mendapat sambutan dari para pengusaha nasional yang tergabung dalam komunitas Spritual Company. Berapa di antaranya adalah; Sandiga Uno (Group Sartago),

Jody Broto Suseno, pemilik jaringan Waroeng Group dan pengusaha-pengusaha lainnya dari berbagai level-pun akhirnya ikut bergabung.

Dari gerakan sedekah yang spontan ini, para pengusaha itu kemudian sepakat untuk mendorong gerakan serupa ke tingkat nasional dan akhirnya menjadikan tanggal 27 April sebagai hari Gerakan Sedekah Nasional (Harsena). Di mana setiap tanggal 27 April, mereka -para pengusaha- yang memiliki sejumlah warung dan outlet ini sepakat untuk mendedikasikan seluruh keuntungannya kepada orang-orang yang membutuhkan melalui satu lembaga filantropi modern. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun awal gerakan Harsena ini berhasil mengumpulkan dana 3,5 Milyar rupiah. Luar biasa besar bukan?

Fakta lain yang menarik untuk dilihat dari gerakan Filantropi di Indonesia adalah jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat umum di Indonesia dari gerakan Filantropi dalam setahun mencapai angka 19,3 trilliun rupiah. Hal ini terungkap dari hasil survey yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005. Dana Filantropi yang mencapai 19,3 trilliun tersebut berasal dari zakat, infak, dan sedekah.

Selain itu, hasil survey CSRS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengungkapkan besarnya jumlah aset wakaf di Indonesia yang mencapai 590 triliun rupiah. Dan aset-aset wakaf tersebut menurut CSRS sebagian besar diperuntukkan untuk membangun kompleks pemakaman dan masjid-masjid mewah yang terkadang berada di antara pemukiman-pemukiman kumuh.

Namun sayang, dana yang berhasil dikumpul tersebut belum juga mampu mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah; kebanyakan dari masyarakat kita dalam memberikan sedekah, infak dan zakat lebih memilih untuk memberikannya secara langsung kepada pihak yang dianggap membutuhkan (yang dalam istilah *syar'i* disebut sebagai *asnaf tsamaniyah*). Sehingga dana yang diberikan bersifat sporadis, sementara dan tidak berkelanjutan dan pada akhirnya malah memunculkan ketergantungan antara si pemberi dan si penerima.

Sedangkan, lembaga-lembaga filantropi modern yang bekerja untuk mengelola dana-dana filantropi dari masyarakat, hanya mampu menyerap sekitar 5 sampai 7 persen dari dana

filantropi yang ada. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pola pikir masyarakat yang belum memahami fungsi-fungsi dari lembaga filantropi modern. Dampak yang muncul kemudian adalah konsep-konsep pengembangan ekonomi produktif dan berkelanjutan yang harusnya dapat dikelola oleh lembaga filantropi modern dari dana infak, zakat dan sedekah tersebut tidaklah dapat dijalankan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Tidak salah jika kemudian orang-orang miskin, gelandangan dan pengemis masih terus menjamur di hampir setiap sudut-sudut kota, di persimpangan jalan dan di setiap-setiap rumah makan, serta tidak jarang kita temui di rumah-rumah ibadah.

Penutup

Bill Gates, Ustad Yusuf Mansur dan para pengusaha, serta seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang yang memang memiliki rasa kepedulian dan kedermawanan yang sangat tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dari bagaimana upaya yang telah mereka lakukan agar dapat menolong orang yang dianggap membutuhkan pertolongan. Selain itu, kepedulian mereka juga dilihat dari banyak jumlah sumbangan yang

telah mereka berikan, baik dalam bentuk bantuan uang, saran pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Namun kini, yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi kita adalah bagaimana dana-dana yang berhasil dikumpulkan dari gerakan filantropi ini dapat benar-benar mampu untuk menghidupkan dan mengentaskan orang-orang miskin dari segala bentuk persoalan kehidupan yang selama ini membelenggu mereka.

Setidaknya, konsepsi tentang *to help people to help themselves* (orang yang ditolong dapat menolong dirinya sendiri) harus dapat kita jalankan dengan baik. Sehingga orang-orang yang ditolong tidak lagi memiliki ketergantungan dengan orang-orang yang menolongnya. Dan pada akhirnya, nilai-nilai kesejahteraan sosial di tengah masyarakat dapat lebih cepat terbangun dan terwujud. (*)

Brazil; Kemiskinan dan Industri Sepak Bola³⁵

Siapa yang tidak kenal dengan negara Brazil? Setiap kali menyebut negara ini, kita selalu diingatkan oleh dua hal. Sepak bola dan kopi. Namun, di sisi lain, negara penghasil kopi ini juga memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak kalah banyaknya dari Indonesia.

Seperti pada umumnya, penduduk-penduduk miskin ini biasanya tinggal di favela-favela (pemukiman kumuh) yang hampir tersebar di sudut-sudut kota. Hal ini bisa dilihat setiap kali kita mengunjungi sudut-sudut kota Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Vitoria dan Aracaju.

Sama seperti pemukiman kumuh lainnya, favela ini menunjukkan wajah kemiskinan yang ekstrim. Satu diantaranya adalah persoalan tata ruang. Di mana sulitnya menemukan ruang di mana tempat anak-anak untuk bermain. Praktis untuk bermain bola mereka hanya bisa

³⁵ Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

15 Maret 2014

memanfaatkan gang, lorong-lorong sempit, dan atau badan jalan raya. Jika-pun ada lapangan, luasnya juga tidak terlalu besar hanya sebesar lapangan futsal. Itupun untuk bermain di sana harus mengikuti antrian yang begitu panjang.

Berkah Ketiadaan Ruang

Namun, di tengah keterbatasan ruang dan tempat itulah skill olah bola anak-anak Brazil ini diasah. Bola yang mereka mainkan seakan dipaksa untuk terus lengket di kaki agar tidak melebar dan mengenai dinding-dingin rumah warga yang begitu rapuh karena terbuat dari kardus, seng dan puing-puing dari sisa bangunan. Ajaibnya kondisi lingkungan seperti ini selalu melahirkan nama-nama pesepak bola yang berkualitas dan diakui oleh dunia. Di dahului oleh Pele, Ronaldo dan yang terakhir Neymar.

Berprofesi sebagai pemain sepak bola, ketiga nama di atas dapat merubah kehidupan sosial ekonominya yang dahulunya miskin menjadi kaya raya. Neymar misalnya, saat berusia 15 tahun dan bermain untuk Santos dirinya sudah berpenghasilan 10.000 reais/bulan dan pada usia 16 tahun meningkat menjadi 25.000 sampai akhirnya mendapatkan kontrak penuh dan berhasil memperbaiki kehidupan ekonomi

keluarga dengan membeli rumah pertama mereka di kawasan Vila Belmiro.

Inilah yang kemudian membuat sepak bola menjadi idiologi yang membebaskan atau dengan istilah lain disebut *change the way of life* (jalan merubah kehidupan) bagi sekelompok anak-anak muda miskin di Brazil. Perkembangan industri sepak bola di Eropa dan sentuhan globalisasi yang dibantu oleh media massa makin memperkuat posisi idiologi ini dan mereka dengan sangat senangnya berlomba-lomba mempertontonkan kemampuan skill serta bakat sepak bola mereka kepada siapa saja yang menyaksikan permainan mereka dengan tujuan segera mendapatkan nilai kontrak yang menggiurkan.

Tidak hanya untuk Eropa, hampir di semua benua kita dapat menemui pesepak bola asal Brazil. Bahkan di klub-klub Indonesia kita bisa jumpai sederet nama pemain Brazil yang bergaji milyaran rupiah. Eksodus besar-besaran tidak hanya bermanfaat bagi diri pemain saja tetapi juga bermanfaat bagi negara. Bayangkan berapa jumlah devisa yang berhasil dikumpulkan Brazil dari para pemain ini. Belum lagi jika kita bercerita kiriman uang yang diberikan para pemain untuk membantu kehidupan keluarganya di Brazil yang sudah

tentu dapat menggerakkan kehidupan ekonomi keluarga di sana.

Konsepsi inilah yang semestinya dapat kita pelajari dari Brazil. Sepak bola yang merupakan industri jasa seharusnya bisa menjadi salah satu penyokong utama kekuatan ekonomi negara. Hal ini bukan tanpa alasan, kita masih memiliki lahan yang cukup luas untuk lapangan sepak bola, kita juga punya kualitas sumber daya manusia yang tak kalah hebat. Hanya saja tinggal bagaimana keinginan pihak terkait seperti; PSSI, Koni dan Kemenpora untuk serius melakukan pembinaan dan pengembangan industri sepak bola di tanah air. Sehingga kita dapat menciptakan “TKI-TKI handal” untuk dunia, tidak lagi sebatas pembantu rumah tangga yang selalu tak berdaya disiksa sang majikannya.

Untuk menciptakan sepak bola yang membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan serta sepak bola yang dapat membantu kehidupan ekonomi negara tentulah tidak gampang. Syaratnya haruslah dilakukan pengembangan dan pemberdayaan sepak bola secara terintegrasi. Mulai dari pembenahan dan standarisasi sekolah sepak bola, memperjelas mekanisme penyaluran pemain ke klub-klub,

memperbaiki iklim kompetisi liga dan yang terakhir memperbaiki sistem rekrutmen pemain.

Keempat poin di atas memang menjadi pekerjaan rumah yang paling penting yang harus diselesaikan oleh PSSI. Khususnya untuk sistem rekrutmen pemain ke tim nasional, haruslah benar-benar mempunyai standarisasi yang jelas. Setiap pemain harus diseleksi berdasarkan kemampuan yang dia miliki dan kebutuhan tim. Sehingga tidak lagi penilaian dari pelatih atau pengurus yang berdasarkan suka (*like*) atau tidak suka (*dislike*), pemain titipan atau bukan titipan. Inilah yang membuat pelatih-pelatih Indonesia terdahulu seperti Ivan Kolev, Peter With dan Alferd Redel kewalahan dalam membangun tim sepak bola nasional Indonesia yang tangguh.

Penutup

Sekitar dua bulan lagi, mata para pencinta sepak bola seluruh dunia akan tertuju ke Brazil. Tiga puluh dua negara siap memperebutkan piala dunia yang digagas oleh Julius Ramet beberapa dekade silam. Kini, bagi negara-negara yang ikut serta dalam event empat tahunan ini, piala dunia adalah sebuah gengsi dan eksistensi diri. Kematangan dan kekompakan tim serta keberhasilan regenerasi pemain di suatu negara

akan terlihat di sini. Daya tarik ini yang kemudian membuat banyak klub-klub eropa juga akan memanfaatkan piala dunia sebagai tempat pencarian bibi-bibit pemain baru yang nantinya siap bermain untuk klub-klub mereka.

Pemain, negara, klub, dan sponsorship serta media masa menjadi *panca* element yang saling terkait dan membuat industri sepak bola berkembang. Harusnya kita sudah mulai iri, melihat industri sepak bola dunia -khususnya eropa -yang terus menginvasi pasar di Indonesia. Berapa banyak fans-fans club eropa yang muncul di Indonesia dan membeli segala bentuk pernak-pernik dan merchandise mereka.

Ini yang kemudian membuat seorang teman melontarkan pertanyaan yang terdengar sedikit sinis; "Kapan ya Indonesia bisa bermain di piala dunia?" dan Kapan ya, baju-baju klub-klub Lokal di Indonesia bisa menerobos pasar dunia dan dipakai oleh ratusan orang-orang dari benua yang berbeda?" (*)

Anak dan Ancaman Konsumsi Pangan³⁶

Pernahkah kita mengawasi secara maksimal konsumsi pangan yang dimakan oleh anak kita? Khususnya selama mereka melakukan aktifitas di luar rumah. Pertanyaan ini penting untuk diajukan, sebab masih banyaknya ditemukan makan yang tidak aman dan tidak sehat yang beredar di pasaran. Lebih khusus makanan yang dikonsumsi oleh anak selama jam sekolah berlangsung. Apalagi fenomena ini sangat mudah kita temui di lingkungan sekolah.

Banyak terdapat pedang yang tidak memandang penting faktor kesehatan makanan yang mereka jual ke pembeli (anak usia sekolah). Mereka (pedang) lebih mengutamakan asumsi ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari belanja yang murah. Hal paling sederhana yang bisa kita temui adalah pada makanan anak-anak sekolah. Benarkan saus pada setiap makanan sudah memenuhi standart pengawasan yang layak?

³⁶ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

Oleh karenanya, faktor kebersihan dan higienitas menjadi kata kunci penting di sini. Pedagang boleh saja mencari keuntungan ekonomi yang besar, tetapi dua faktor itu tetap harus dijaga. Ini semua demi masa depan anak bangsa. Mereka yang mengkonsumsi makanan yang tidak layak bersiko terkena penyakit bawaan beresiko.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berpandangan keamanan pangan sebagai masalah global seharusnya mendapatkan prioritas perhatian. Data global *Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group* WHO 2010 menyebutkan, diperkirakan ada 582 juta kasus penyakit, terdiri dari 22 macam penyakit pencernaan bersumber dari makanan dan 351.000 kematian terkait penyakit itu.

Di Indonesia, penyakit bersumber dari makanan yang dominan di antaranya diare dan disentri. Menurut Riset Kesehatan Dasar, insiden diare di Indonesia 3,5 persen. Hal ini didukung dengan data dari BPOM yang menunjukkan, cemaran

mikroba menjadi ancaman utama dalam pangan jajanan anak sekolah.

Pada tahun 2014 saja BPOM mencatat ada 23,82 persen pangan tidak memenuhi syarat dari semua sampel pangan jajanan anak sekolah yang dicurigai tak aman. Dari pangan yang tak memenuhi syarat tersebut, 74,89 persen tercemar mikroba. Sisanya tidak memenuhi syarat karena memakai bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan secara berlebihan.

Tidak sampai disitu, angka kematian yang dihasilkan dari pengkonsumsian pangan yang sembarangan juga cukup besar. *Ada dua juta orang di dunia setiap tahunnya yang meninggal akibat makanan dan minuman yang tidak aman, terutama anak-anak. Sekitar 1,5 juta anak meninggal di dunia setiap tahunnya, sebagian besar karena makanan dan minuman yang tercemar.*

Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terkait pemilihan makanan yang aman dan sehat masihlah sangat terbatas. Hal ini bertambah ironis ketika pelaku produksi

makanan yang tidak aman dan tidak sehat terus saja menjalankan bisnisnya di tengah masyarakat tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pengawasan dan pemberian hukuman terhadap mereka -distributor pangan yang tidak aman dan bersih -terbilang sangat lemah. Kita sangat mudah menemui makanan tanpa kemasan yang beredar dipasaran. Harusnya pihak terkait seperti pemerintah dan pemerintah daerah melalui dinas dan instansi yang membidangi persoalan pangan ini dapat lebih tangkas dalam mengatasi persoalan yang ada.

Setidaknya, ada pengujian dan pengawasan sample pangan secara priodik di tengah masyarakat. Meski terkadang alasan anggaran selalu saja menghantui untuk setiap pengawasan dan pengujian sampel makanan yang ada. Selain pengawasan yang masih lemah, penyebab beredarnya makanan tidak aman di masyarakat ialah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku yang produksi makanan yang tidak sehat. Contoh *rill* yang bisa dilihat adalah sepanjang tahun 2012-2014 hakim

hanya menjatuhkan hukuman paling tinggi satu tahun masa percobaan.

Butuh Pengawasan

Pengawasan terhadap keamanan pangan selama ini belum berjalan maksimal. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik, masyarakat akan menjadi korban. Padahal dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Disebutkan setiap orang bertanggung jawab dalam setiap rantai produksi hingga distribusi makanan harus memenuhi syarat sanitasi yang ditetapkan.

Di sini, seluruh element memiliki tanggung jawab atas persoalan pagang hari ini. Mulai dari pemerintah pusat -Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, dan BPOM -Pemerintah Daerah. Namun kinerja institusi pemerintah sampai saat ini belumlah makasimal. Tentu kita tidak bisa menyalahkan secara keseluruhan kinerja pemerintah, di sini dibutuhkan peran serta masyarakat khususnya

keluarga dan sekolah (lembaga pendidikan) dalam mengawasi konsumsi makan anak-anak.

Keluarga bisa melakukan pengawasan dengan memperingatkan dan memberi tau bahaya makanan yang ada disekitar mereka atau bisa juga dengan memberikan bekal makanan dari rumah. Sedangkan peran yang dapat dimainkan oleh pihak sekolah adalah dengan menyeleksi dan melakukan pengawasan terhadap makanan yang layak jual di kantin-kantin sekolah.

Oleh karenanya penting bagi kita untuk lebih peduli terhadap apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita setiap hari. Sebab, apa yang mereka konsumsi hari ini sangat menentukan masa depan mereka. Apakah menjadi generasi yang sehat atau menjadi generasi yang lemah dan sakit. Jika yang muncul adalah generasi yang lemah dan sakit maka negara harus menanggung banyak kerugian untuk memenuhi semua biaya perobatan mereka ke depan. (*)

APBN 2016 dan Tahun (Pengampunan) Pajak³⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016 pada akhir oktober lalu akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah sebelumnya rapat paripurna ini sempat diskors selama 2,5 jam untuk pelaksanaan lobi antar pimpinan fraksi. Begitupun, meski penetapan APBN tahun 2016 ini terbilang alot tetap saja tidak menampung kepentingan rakyat banyak.

Hal ini bisa dilihat dari postur anggaran APBN tahun 2016 di mana anggaran subsidi yang diberikan kepada rakyat dikurangi oleh pemerintah. Satu diantaranya adalah pengurangan subsidi BBM, BBN dan LPG sebesar 17,1 triliun rupiah yang menjadi 64,7 triliun dari sebelumnya berjumlah 81,8 triliun. Selain itu, subsidi listrik juga dikurangi oleh

³⁷ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

pemerintah dari 76,6 triliun dikecilkan menjadi 73,1 triliun rupiah.

Pencabutan subsidi oleh pemerintah selama ini selalu dialaskan untuk kepentingan pembangunan agar tepat sasaran. Tetapi apakah selama ini pencabutan subsidi dari rakyat untuk pembangunan infrastruktur sudah dianggap tetap sasaran? Jawabannya tentu saja tidak sebab pada tahun anggaran yang sama pemerintah malah menyetujui proyek pembangunan gedung DPR yang memakan dana sekitar 740 miliar rupiah untuk pembangunan tujuh mega proyek kompleks DPR. Proyek ini akan dianggarkan secara *multiyear* dan akan dikerjakan secara bertahap. Di mana pada tahun 2016 ini anggaran yang disetujui baru 740 miliar.

Belum lagi pada APBN ini juga DPR mendapatkan dana sebesar 2,239 miliar untuk program pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dan program peningkatan sarana dan prasarana DPR RI. Parahnya lagi, jika diruntut dalam lima tahun kebelakang, anggaran DPR mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 meski besaran anggaran ini tidak diikuti dengan kinerja yang maksimal oleh anggota DPR.

Defisit

Selain fakta banyaknya subsidi untuk rakyat yang dicabut oleh pemerintah pada APBN anggaran 2016, pada APBN tahun 2016 ini juga terjadi defisit yang cukup besar yaitu; 273,2 triliun. Besarnya defisit ini membuktikan bahwa pejabat negara sama sekali tidak pernah menghitung efisiensi anggaran yang harusnya dikelola oleh pemerintah dengan baik.

Defisit anggaran ini juga semakin mengkwatirkan dengan serapan pajak pada tahun 2015 yang belum terlaksana secara maksimal. Tercatat, Sisa saldo APBN 2015 kini semakin tipis. Per September, sisa anggaran arus kas (*cash flow*) hanya Rp 4,6triliun. Pemasukan dari sektor pajak ternyata sangat lamban, yaitu baru 60 persen per 4 November 2015. Sementara, hingga akhir tahun diprediksi hanya mampu menarik 85 persen dari target Rp 1.295triliun dalam APBNP 2015.

Idealnya pemerintah harus dapat belajar dari serapan pajak pada tahun ini yang tidak bisa terlaksana secara maksimal. Namun begitupun pemerintah masih menaikan target penerimaan pajak pada tahun 2016 yang diwacanakan sebesar Rp. 1.565,8 triliun atau naik sekitar lima

persen dari target penerimaan perpajakan dalam APBN-P sebesar 1.489,3 triliun.

Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp1.565,8 triliun masih wajar dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini dan prospek tahun depan. Kewajaran itu dinilai dari perlambatan perekonomian tahun 2015 dan prospek tahun 2016 serta langkah ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan pemerintah, katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (25/8).

Menkeu menjelaskan upaya pencapaian target penerimaan perpajakan tersebut harus dilakukan karena potensi pajak nasional masih cukup besar, kepatuhan pembayaran pajak perlu ditingkatkan dan kebocoran pajak harus diminimalkan dengan upaya perbaikan distribusi pendapatan.

Pengampunan Vs Penghukuman

Walau mengusung tahun penegakan hukum bagi wajib pajak pada 2016, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan kebijakan pengampunan pajak. Meski pengampunan pajak awalnya akan diterapkan pada 2017. Namun, karena pada 2017 akan

berlaku *Automatic Exchange of Information* (AEOI) atau pertukaran otomatis informasi data wajib pajak di tingkat internasional, maka pengampunan pajak dipercepat pada tahun depan. Diharapkan pengampunan pajak ini akan sangat efektif untuk menggenjot penerimaan pajak. Sebab katanya, amnesti pajak akan memberikan ruang fiskal lebih besar dalam APBN.

Namun itu-pun menurut beberapa pakar perpajakan, pemerintah harusnya tidak terburu-buru memberlakukan pengampunan pajak karena secara administrative pemerintah dianggap belum siap untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Sistem administrasi menjadi satu hal yang penting untuk mekanisme pengampunan pajak khususnya mekanisme administrasi pasca pengampunan.

Setidaknya pemerintah harus bisa melakukan pengawasan terhadap seseorang yang sudah diberikan pengampunan pajak. Jangan sampai pemerintah tidak bisa membedakan mana seseorang sudah diampuni dan mana seorang yang belum diampuni. Jadi persoalan pendataan di sini menjadi penting untuk dilakukan. Apalagi selama ini administrasi pemerintahan kita dinilai sangat amburadul terkait persoalan data.

Begitupun, meski pemberian pengampunan kepada pihak penunggak pajak belum siap dilakukan, namun dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat membuat orang-orang yang selama ini melakukan penghindaran pajak untuk membayarkan kewajibannya. Kerena dengan membayar pajak tersebut akan ada diskon pajak cukup besar bagi seseorang yang mau melaporkan hartanya yang sebelumnya tidak dilaporkan.

Untuk itu, dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang jelas jangan sampai muncul rasa kecemburuan antara pihak yang taat pajak dengan pihak yang menunggak pajak.

Penutup

Pajak memang selalu berkaitan erat dengan pembangunan. Tanpa pajak mustahil pembangunan akan terlaksana dengan baik. Jika pembangunan terhambat maka akan berdampak langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada titik inilah fungsi pajak sangat dibutuhkan sebagai penunjang perbaikan perekonomian negara khususnya dalam penggunaan belanja negara.

Oleh karenanya kinerja pemerintah dalam upaya penyerapan pajak harus didukung dengan semangat partisipasi rakyat dalam

membayar pajak. Jangan sampai, kita mendesak pembangunan tetapi untuk membayar pajak saja kita sangat malas.

Selain itu kita juga perlu melakukan pengawasan yang ekstra ketat terkait penggunaan dana pajak yang digunakan pemerintah untuk pembangunan. Jangan sampai, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari penyerapan dana pajak tidak tetap sasaran. Atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan dan kemakmuran elit politik semata. Bukankah tujuan pembangunan itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat? (*)

Memperkuat Potensi Ekonomi Sampah³⁸

Sampah adalah bagian dari keseharian hidup kita yang tidak dapat dipisahkan. Setiap hari kita memproduksi sampah, tanpa pernah berpikir kemana sampah-sampah itu akan berakhir. Rasa ketidakpedulian itu cenderung membuat kita abai akan masalah ini. Sedangkan di satu sisi, kita bisa melihat banyak orang yang menopang -perekonomian di dalam -kehidupannya dari kegiatan atau pekerjaan mengelola sampah.

Mereka bukan hanya petugas-petugas kebersihan yang disiapkan dan digaji oleh dinas kebersihan perbulannya untuk berkerja mengangkut sampah. Tetapi selain orang-orang -yang bekerja pada dinas kebersihan -tersebut, kita juga bisa melihat bagaimana pemulung, tukang botot dan beberapa ibu rumah tangga yang asik mengumpulkan botol-botol air mineral untuk dijual sebagai penambah penghasilan harian.

³⁸ Pertamakali diterbitkan di Harian Waspada **Selasa, 5 April 2016**

Hasil Studi

Beberapa waktu lalu saya melakukan studi (baca: penelitian) tentang upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah anorganik. Studi ini saya lakukan diujung Kota Medan, tepatnya di Sicanang Belawan. Di tempat saya melakukan studi ini, kita bisa lihat bagaimana ibu rumah tangga yang sebagian juga berprofesi sebagai buruh cuci dan nelayan kecil telah menjadikan sampah sebagai sumber dan potensi ekonomi keluarga. Ini adalah sebuah fakta yang menarik, tentang bagaimana usaha perbaikan lingkungan yang berjalan seiring dengan usaha perbaikan dan peningkatan pendapatan harian keluarga miskin di pinggiran Kota Medan.

Sekarang bagi sebagian dari masyarakat di Sincang tersebut, aktivitas pergi ke laut tidak hanya dilakukan untuk mencari ikan saja, tetapi juga mencari sampah sisa buangan warga kota yang membuang sampah ke sungai. Hasilnya, selain dapat membersihkan laut dari tumpukan sampah, kegiatan yang mereka lakukan ini juga berhasil menjadi tambahan ekonomi keluarga. Bahkan hasil “tangkapan sampah” jauh lebih besar dari hasil tanggapan ikan yang mereka lakukan.

Apa yang terjadi pada masyarakat Sicanang Belawan, bukanlah suatu yang datang tiba-tiba. Tetapi membutuhkan satu proses yang panjang dan melibatkan begitu banyak ator dari berbagai lapisan masyarakat. Berdirinya Bank Sampah dipemukiman warga memberikan dampak yang positif. Perilaku warga yang membuang sampah ke laut secara perlahan sudah mulai berkurang. Kini sampah tidak lagi dianggap warga sebagai barang yang tidak berguna. Tetapi sampah telah menjadi satu barang yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi berbasis bank sampah ini dinilai berhasil mengurangi perilaku membuang sampah di sembarang tempat. Sebab, perubahan dari sampah menjadi uang sangat memotivasi warga untuk ikut berpartisipasi.

Budaya Pragmatisme

Budaya hitung-hitungan –atau dalam istilah lain bisa disebut sebagai bentuk budaya *pragmatisme* –yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita, membuat program bank sampah dapat dengan mudah diterima dan diikuti oleh warga. Tidak salah jika sekarang

kita bisa temui program-program yang dijalankan oleh pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki manfaat ekonomi secara langsung di masyarakat akan sulit untuk dijalankan. Meski memiliki nilai ekonomi, tetapi konsep bank sampah belum sepenuhnya dapat berjalan secara maksimal di wilayah perkotaan. Sebab, hasil tabungan sampah yang tidak terlalu besar –berkisar 5 sampai 15 ribu rupiah –membuat masyarakat perkotaan tidak tertarik untuk ikut aktif bergabung menjadi nasabah bank sampah. Nominal rupiah yang relatif kecil bagi masyarakat perkotaan itu yang membuat mereka tidak tertarik untuk bergabung.

Berbeda dengan masyarakat pinggiran kota, khususnya di daerah Sicanang Belawan yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan kecil, pembantu rumah tangga dan buruh pabrik, nominal rupiah yang relatif sedikit tersebut membuat mereka tetap tertarik untuk ikut serta menjadi nasabah bank sampah. Apalagi potensi sampah yang ada lokasi tempat tinggal mereka cukup besar untuk dijadikan tabungan.

Beberapa nasabah yang diwawancarai mengatakan keikutsertaan sebagai nasabah bank sampah dikarenakan hampir setiap hari mereka menemukan sampah dan menghasilkan

sampah. Setidaknya sampah yang mereka hasilkan adalah sampah berbasis rumah tangga. Selama ini, sampah-sampah yang ada di lingkungan mereka tidaklah terlalu mereka perhatikan. Namun kini, dikarenakan sampah sudah memiliki nilai ekonomi dan dapat ditabung di bank sampah maka sampah yang ada kini lebih mendapatkan perhatian dan tidak lagi diperlakukan sia-sia.

Peran Bank Sampah

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kehadiran bank sampah di lingkungan masyarakat Sicanang Belawan, setidaknya telah berhasil untuk merubah cara pandangan masyarakat terhadap sampah. Sampah yang selama ini dianggap kotor dan tidak memiliki nilai guna ternyata telah dipandang sebagai satu potensi ekonomi yang dapat mengcover kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Meski nominal rupiah yang ditabung tidak terlalu banyak jumlahnya, namun motif ekonomi memang menjadi faktor utama yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi nasabah bank sampah.

Bentuk partisipasi itu berhasil membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung

jawab terhadap lingkungan dan sampah-sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Baik sampah yang dihasilkan secara langsung atau sampah yang dihasilkan oleh orang lain dan berserakan disekitar lingkungan mereka. Dengan menabung sampah di bank sampah maka produksi sampah bisa dihentikan untuk tidak masuk ke TPA. Sehingga intensitas laju pertumbuhan sampah di TPA bisa direm sedini mungkin.

Tabungan-tabungan sampah yang distorkan selama ini dapat membantu masyarakat di saat terdesak dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sehingga dengan adanya model tabungan ini mereka sudah sedikit lebih aman (*sefty*) dalam kondisi keuangan. Meski terkadang tabungan yang meliki tidak cukup besar tetapi dapat untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Selain itu, bank sampah sendiri juga membuka kemungkinan untuk memberikan pinjaman uang semampunya kepada para nasabah. Pinjaman yang diberikan nantinya akan dicicil dengan menggunakan sampah.

Penutup

Pada hakikatnya, uang yang ada dikantong kita saat ini pada akhirnya selalu saja menghasilkan sampah dengan jalan membelanjakannya menjadi barang-barang keperluan kita sehari-hari. Sisa dari barang keperluan itulah yang kemudian menjadi sampah. Tetapi kita tidak pernah menyadari jika sisa dari barang yang tidak terpakai atau tidak berguna tersebut dapat menghasilkan uang bagi kita.

Tetapi ironisnya, hanya karena persoalan sampah -plastik atau anorganik -yang terbuang secara terus menerus di laut, kita terkena peraturan plastik berbayar. Padahal persoalan sampah dengan jenis anorganik seperti plastik tidaklah harus diatasi dengan cara membayar plastik yang ada. Sebab hasilnya tetap sama, kita akan terus memproduksi sampah plastik. Yang terpenting kini adalah bagaimana merubah paradigma masyarakat bahwa sampah adalah uang dan uang adalah sampah.

Pada tahapan inilah dibutuhkan peran serta pemerintah -baik pusat maupun daerah -dan perusahaan penghasil produk-produk berbahan dasar plastik agar dapat bekerjasama mengatasi persoalan sampah. Bukankan pada pasal 5 dan 6 UU No. 18 Thn 2008 -Tentang Pengelolaan

Sampah -telah dijelaskan tentang bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan? Dan bukankah perusahaan juga mempunyai dana CSR sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap keberlanjutan lingkungan? (*)

Bagian V

Korupsi & Pembangunan

Apabila Secara Kebetulan Kamu Menjadi Orang Yang Dekat Dengan Penguasa, Maka Berhati-Hatilah Kamu Seolah-olah Kamu Sedang Berdiri di Atas Pedang Yang Tajam Sekali.

-Imam Al Ghozali-

Postulat Korupsi³⁹

Korupsi seolah sudah menjadi satu ciri khas pada diri bangsa kita. Ia telah melekat sejak puluhan tahun silam. Bahkan mungkin sebelum negara ini terbentuk. Ini yang membuat korupsi sangat sulit untuk dihapuskan dari sistem sosial-politik dan ekonomi bangsa. Ia seolah sudah menjadi satu budaya baru yang tergenerasi terus menerus.

Laporan indeks korupsi internasional menjadi bukti untuk ini. Skor penilaian terhadap Indonesia tidak mengalami perubahan banyak. Pada tahun 2014, Indonesia berada di posisi 107 dengan skor 34 poin. Skor ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 32 point. Meski ada kenaikan dalam penilaian pemberantasan korupsi, namun bangsa kita masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti; Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura yang telah berhasil menurunkan angka korupsi warga negaranya.

Usaha demi usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga belum menghasilkan dampak yang maksimal. KPK sebagai institusi

³⁹ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

pemberantas korupsi malah kini dibabat habis dan dikerdilkan. Entah apa yang membuat usaha pemberantasan korupsi kian sulit dilakukan. Meski asumsi, postulat dan teori-teori terkait perilaku korupsi terus saja bermunculan. Agar tidak membingungkan, penting sebelumnya untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan postulat. Postulat di sini bisa diartikan sebagai sesuatu asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Atau secara dasar dapat diartikan sebagai pernyataan dasar yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.

Karena sifatnya sebagai pernyataan dasar yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian, maka postulat terkait dengan korupsi banyak bermunculan. Namun dari semua postulat yang ada, saya tertarik untuk membahas postulat yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo yang membagi korupsi menjadi dua jenis yakni korupsi konvensional dan korupsi nonkonvensional.

Korupsi konvensional adalah korupsi dalam arti hukum pidana yang memiliki unsur-unsur tertentu yakni menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan cara melawan hukum, dan merugikan keuangan

negara. Sedangkan korupsi nonkonvensional adalah semua sikap dan tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran-pelanggaran yang secara stipulatif tidak disebut korupsi oleh hukum.

Antara Konvensional dan Nonkonvensional

Di Indonesia modus korupsi konvensional masih sangat sering dijalankan. Sektor pengadaan barang atau jasa menjadi tempat yang sering dilakukannya praktik korupsi konvensional. ICW seperti yang diberitakan oleh CNN mengatakan tiga modus korupsi yang tertinggi selama 2014 antara lain adalah modus penggelapan (170 kasus), modus penyalahgunaan anggaran (107 kasus) dan modus laporan fiktif (76 kasus).

Sedangkan untuk sektor yang paling banyak dikorupsi adalah infrastruktur (225 kasus), keuangan daerah (134 kasus) dan sosial masyarakat (53 kasus). Ironisnya kasus-kasus ini banyak terjadi di daerah-daerah baik itu pada tingkatan provinsi, kabupaten atau kota. Jenis korupsi konvensional inilah yang selalu melibatkan banyak orang dan modelnya percis seperti fenomena gunung es, semakin didalami semakin banyak orang yang terlibat. Ironisnya, negara selalu saja menjadi institusi yang

dirugikan setiap kali tindakan ini dilakukan oleh para pejabat dan atau elit negara. Sepanjang tahun 2014 lalu tercatat kerugian negara akibat perilaku korupsi ini ditaksir mencapai Rp. 5,29 Triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Lantas apa yang sesungguhnya menjadi penyebab utama mengapa korupsi masih begitu mendarah daging dan seolah sudah menjadi satu budaya bagi bangsa ini? Pertanyaan inilah yang menjadi menarik untuk kita jawab, sebab jika ditelisik lebih mendalam budaya korupsi yang terwujud dalam jenis korupsi konvensional sangat dipengaruhi oleh jenis korupsi nonkonvensional.

Korupsi nonkonvensional yang dapat diartikan sebagai sebuah sikap dan tindakan atau perilaku sewenang-wenang yang sering kita lakukan namun secara stipulatif tidak disebut korupsi oleh hukum. Misalnya perilaku menyontek siswa, perilaku menerobos lampu merah, karyawan yang pulang lebih awal dengan gaji yang tidak dipotong dan lain sebagainya.

Padahal perilaku-perilaku seperti ini selalu menjadi perilaku yang mendorong setiap orang semakin mudah untuk melakukan tindakan

korupsi secara konvensional. Makanya kita dapat katakan bahwa tidak mungkin ada orang yang menyatakan dirinya tidak pernah melakukan tindakan korupsi. Namun sayang dalam benak kita, definisi korupsi itu memang cenderung mengarah kepada definisi korupsi secara konvensional.

Itu sebabnya perilaku korupsi hanya melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti para pejabat negara di level eksekutif, legislative dan yudikatif. Selain pejabat negara, perilaku korupsi juga sering melibatkan orang-orang yang mempunyai hubungan relasi dengan para pejabat negara tersebut seperti pengusaha, kontraktor dan atau keluarga pejabat itu sendiri.

Budaya Korupsi

Mental untuk melakukan tindakan korup itu sudah terbangun sejak zaman kolonialisme. Hal ini menjadi semakin kelam ketika budaya korupsi terus dipelihara pada masa orde baru. Itu sebabnya mengapa semakin giat korupsi diberantas semakin banyak juga orang yang akan melakukannya secara terang-terangan. Oleh karenanya bisa saja ketika pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan janganka seorang camat presiden pun mungkin akan terlibat dan menjadi tersangka.

Ungkapan di atas bukan tanpa alasan, sebab sistem yang ada saat ini merupakan sistem yang cenderung membuat banyak orang menjadi seorang koruptor. Lihatlah setiap kali pilkada, pilgub, pilleg dan pilpres dilaksanakan, berapa banyak calon-calon tersebut harus mengeluarkan uang untuk kampanye politiknya? Bahkan kebanyakan masa yang datang pada saat kampanye berlangsung bukanlah masa yang murni, melainkan sama bayaran. Sama halnya dengan masa yang datang ke TPS kebanyakan adalah mereka yang sudah mendapatkan serangan fajar. Tidak salah jika setiap kepala daerah tingkat II membutuhkan dana sekitar 5 sampai 7 miliar untuk memenangkan pilkada.

Penutup

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan oktober kemarin tentang indeks provinsi terkorup menempatkan Sumatera Utara pada peringkat satu sebagai provinsi yang terkorup. Ironisnya peringkat tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Ini harusnya menjadi sebuah berita buruk bagi kita masyarakat Sumatera Utara. Kini kita perlu melakukan intropeksi diri, apalagi di tengah kasus aliran dana bansos dan suap hakim semakin bergeliat dan melibatkan banyak orang.

Untuk itu pendidikan anti korupsi perlu dikedepankan. Tidak hanya pada lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau universitas namun juga pada lembaga informal seperti keluarga. Keluarga setidaknya harus mampu mendidik anak agar dapat disiplin dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya atau tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengganggu kepentingan banyak orang. Sebab bagaimanapun, baik sekolah ataupun keluarga adalah lembaga yang dapat mengerem laju pertumbuhan perilaku korupsi nonkonvensional yang menjadi pembentuk dasar berkembangnya perilaku korupsi konvensional. Bukankah perilaku buruk itu lahir dari satu kebiasaan yang tidak pernah mendapatkan sanksi tegas? (*)

Jebakan (Kekuasaan) Legislatif⁴⁰

Ditetapkannya lima anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dari Gubernur Sumatera Utara (non-aktif) Gatot Pujo Nongroho menjadi bukti kuat bahwa kekuasaan dan korupsi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan antara korupsi dan kekuasaan ini pernah diungkapkan oleh seorang guru besar sejarah dari Universitas Cambridge yang bernama Lord Acton.

Pada penjelasannya, Lord Acton mengungkapkan *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*. Jika diartikan; kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolute cenderung korup secara absolut. Hubungan inilah yang kini semakin terpampang jelas di depan muka kita dan naasnya hal ini justru terjadi di wilayah Sumatera Utara dan itu melibatkan sejumlah anggota DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.

⁴⁰ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

Begitupun, sejatinya kita harus bertanya, benarkah kasus ini hanya terjadi pada Sumut saja? Atau jangan-jangan kasus serupa –seperti gratifikasi dari eksekutif ke legislative –juga terjadi di daerah lain? Atau bahkan bisa saja juga terjadi pada tingkat pusat? Pertanyaan inilah yang penting untuk dijawab oleh KPK. Sebab jika kita percaya pada ungkapan Lord Acton tadi maka kita juga harus percaya bahwa hal serupa dipastikan juga terjadi di daerah lain dan pola korupsinya juga persis sama dengan melibatkan eksekutif dan legislative.

Jawaban dari KPK inilah yang penting kita peroleh. Jangan sampai ada perasaan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di daerah. Seolah-olah Sumut kini sudah menjadi “sarang” koruptor. Apalagi pada indeks provinsi terkorup –dalam laporan ICW oktober 2015 lalu –menempatkan Sumut pada peringkat satu sebagai provinsi yang terkorup. Parahnya posisi ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010.

Mengapa Harus Sumut?

Sumut bukanlah provinsi dengan jumlah APBD yang besar. Pada tahun 2013 APBD Sumut hanya 8,8 triliun dengan defisit 3,8 milyar, sedangkan pada R-APBD 2014 mengalami

penurunan menjadi 8,4 triliun dan pada tahun 2015 APBD Sumut menjadi 8,6 triliun dengan rincian belanja daerah 8,679 triliun dan pendapatan daerah 8,674 triliun atau defisit sekitar 5 milyar rupiah.

Coba bandingkan dengan DKI Jakarta yang pada tahun 2014 saja APBD-nya mencapai 72 triliun dan Jatim pada tahun yang sama mencapai 16,88 triliun serta Jabar dengan jumlah APBD 21,672 triliun. Angka APBD dari tiga provinsi ini sangat besar jika dibandingkan dengan Sumut. Tentunya, jika kita memakai logika korupsi maka semakin besar jumlah APBD di satu daerah maka semakin besar pula jumlah dana yang dapat di korupsi.

Ingat berdasarkan laporan ICW pada indeks provinsi terkorup –oktober lalu –Jawa Barat dan Jawa Timur adalah provinsi yang masuk lima besar dalam daftar provinsi terkorup. Di mana Sumut berada diposisi satu dengan jumlah 24 kasus, NTT diposisi dua dengan 24 kasus dan diikuti dengan Jabar (19 kasus), Jateng (19 kasus) serta Jatim (19 kasus). Anehnya jumlah kasus antara Sumut, Jabar, Jateng dan Jatim tidaklah terlalu besar hanya selisih lima kasus, lantas mengapa hanya Sumut yang kini menjadi sorotan? Apalagi dengan NTT yang mempunyai jumlah kasus yang sama.

Belum lagi jika kita membandingkan dengan kasus korupsi bus trans jakarta yang merugikan keuangan negara hampir setengah triliun rupiah yang konon katanya melibatkan -mantan - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dan beberapa rekanat lainnya. Jika kita mau kritis, satu kasus korupsi di DKI Jakarta sudah merugikan keuangan negara sebesar setengah triliun rupiah, angka ini tentunya tidak sebanding dengan angka dugaan kasus gratifikasi di Sumut yang melibatkan Gatot dan anggota DPRD Sumut lainnya. Lagi-lagi kita harus bertanya, mengapa hanya Sumut yang menjadi pusat perhatian pemberantasan korupsi KPK. Apakah benar, perilaku pejabat politik di Sumut sudah separah itu? atau jangan-jangan ada indikasi dan kepentingan politik yang bermain di sini? Ah,

Kekuasaan Legislatif

Ada satu point penting yang bisa disimpulkan, bahwa model gratifikasi yang terjadi antara Gatot dan lima anggota DPRD Sumut priode 2009-2014 adalah salah satu hal yang sudah lumrah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ini merupakan sebuah fenomena gunung es korupsi di daerah dan dari kasus ini harusnya KPK dapat belajar untuk membuat satu bentuk konstruksi korupsi di daerah yang sebenarnya

sudah sangat lumrah dilakukan. Tidak hanya di level daerah tetapi bisa juga terjadi di level pusat.

Persoalan itu menyangkut kekuasaan yang begitu dominan, sehingga terkadang cenderung dan bahkan sering untuk disalah gunakan. Besarnya kekuasaan legislative itu bisa dilihat dari fungsi yang dijalankan oleh orang-orang yang berada di legislative. Mulai dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Ketiga fungsi inilah yang sering digunakan oleh legislative, tidak hanya untuk mengontrol eksekutif (pemerintah) tetapi terkadang juga untuk menakut-nakuti pemerintah dengan cara menggunakan hak interplasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat. Ironisnya ketiga fungsi ini selalu dijadikan bahan untuk melakukan *bargaining position* (posisi tawar) kepada pihak eksekutif agar kehendak (*will*) dari legislative bisa terpenuhi.

Di sisi lain, eksekutif yang tidak mempunyai kemampuan mengelola pemerintah secara baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) tentu akan merasa takut dengan ancaman hak interplasi. Parahnya, pihak eksekutif malah lebih memilih untuk melakukan gratifikasi

(suap) kepada anggota-anggota legislative agar dapat memuluskan kepentingan eksekutif dalam mengelola roda pemerintahan.

Pada poin inilah kita akan melihat bagaimana relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislative yang saling bekerjasama untuk saling menarik keuntungan, tidak untuk rakyat tetapi untuk kepentingan kelompok dan diri mereka sendiri. Realitas inilah yang terpampang dijelas di Sumut dengan melakukan persetujuan terhadap LPJ Pemrov (2012, 2014) dan R-APBD (2013) serta persetujuan terkait APBD Sumut (2014, 2015) dan paling terayur adalah gagalnya tiga hak interpalasi pada tahun 2015.

Relasi Kekuasaan

Sesungguhnya menurut Michel Foucault; kekuasaan tidak bermakna "*kepemilikan*" atau keadaan di mana seseorang memiliki sumber kekuasaan. Kekuasaan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain, di situ kekuasaan sedang bekerja.

Rakyat dalam konteks relasi politik sebenarnya memiliki kekuasaan yang besar. Ia mempunyai hak untuk menentukan siapa yang boleh menjadi wakilnya dipemerintahan dengan cara memilih melalui pemilihan umum. Hanya saja, dalam kondisi kekinian rasa kepercayaan rakyat terhadap orang-orang yang duduk di lingkaran eksekutif dan legislative memang sudah hilang sejak lama. Kekuasaan rakyat hanya terjadi pada saat pemilihan umum berlangsung –baik dalam bentuk pilleg, pilpres atau pilkada –sisanya kepentingan rakyat sering terabaikan.

APBN dan APBD yang seharusnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat malah hanya menjadi ladang korupsi bagi kelompok eksekutif dan legislative. Hal ini yang kemudian membuat rakyat menjadi berpikiran *pragmatis* dengan model NPWP (*Nomor Piro, Wani Piro*). Bentuk pragmatis rakyat ini yang kemudian dimanfaatkan oleh legislative dan eksekutif untuk memperkuat kekuasaan mereka menjadi begitu *absolut*. Keabsolutan kekuasaan mereka inilah yang menurut Lord Acton membuat korupsi mereka menjadi begitu absolut.

Pada titik inilah kita sebagai rakyat harusnya bisa belajar untuk dapat memilih wakil-wakil rayat (DPRD-DPR RI) dan juga pejabat eksekutif (gubernur, bupati dan walikota) yang

benar-benar bekerja untuk rakyat. Apa yang terjadi pada -kasus korupsi dan gartifikasi -di Sumut hari ini juga bagian dari kesalahan kita yang membiarkan Sumut dikuasai oleh orang-orang yang tidak layak. Persoalan yang harusnya membuat kita bertanya dalam hati; bukankah orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka hari ini adalah orang-orang yang pernah saya dan anda pilih pada pilkada/pilleg sebelumnya? (*)

Pilkada; Antara Keuntungan Kelompok dan Mental Pejabat⁴¹

Sebentar lagi, Kota Medan dan beberapa kabupaten-kota lainya di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak. Perhelatan pesta demokrasi ini akan menarik perhatian bagi banyak kelompok. Sebab hadirnya pilkada membawa keuntungan yang cukup menjanjikan bagi mereka yang terlibat secara tidak langsung dengan event ini. Seperti sebuah musim panen, semua mencari dan mendapatkan keuntungannya masing-masing.

Kelompok pertama yang tentunya mendapatkan keuntungan yang menjanjikan dari hadirnya pilkada adalah kelompok elit partai politik. kelompok ini kelompok yang paling berbahagian, sebab setiap calon kepala daerah yang ingin maju melalui jalur kepartaian pasti akan mencari mereka. Melakukan lobi dan

⁴¹ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

kemudian “menentukan mahar” yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan restu partai. Ini sudah menjadi satu rasia umum yang tidak bisa dipungkiri, meski ada partai yang coba menolak itu dengan menyatakan haram terhadap uang mahar dalam pilkada.

Selain elit partai, kelompok kedua yang memperoleh keuntungan adalah kelompok akademisi dan praktisi. Khususnya mereka yang berada pada bidang sosial dan politik. Kemampuan dan pemahaman mereka dalam bidang sosial dan politik membuat mereka dipercaya dan diangkat untuk menjadi konsultan pemenangan politik calon. Survei-survei pilkada adalah satu bukti proyek-proyek yang dilaksanakan di tahapan awal. Popularitas dan elektabilitas harus dipetakan dengan maksimal agar mempermudah langkah kerja tim sukses berikutnya.

Kelompok berikutnya adalah ormas, lsm dan lembaga-lembaga *civil society* lainnya. Jumlah masa adalah kunci dari kelompok ini. Semakin banyak masa kelompoknya semakin besar posisi tawar mereka untuk didatangi oleh setiap calon kepala daerah. Harapannya sederhana, anggota atau masa yang aktif terdaftar di kelompok ini diharapkan dapat memberikan suaranya secara *singnifikan* kepada setiap calon. Selain itu, tokoh-

tokoh yang ada pada ormas, lsm dan lembaga-lembaga *civil society* ini juga diharapkan mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mendukung dan memilih satu pasangan calon kepala daerah.

Kelompok terakhir adalah media masa. Biasanya media masa menjadi patron terdepan untuk meningkatkan popularitas calon kepada daerah. Karena sifatnya yang memberikan informasi dan dekat dengan masyarakat, maka media menjadi begitu penting. Tidak salah jika iklan dan berita calon-calon kepala daerah selalu saja menghiasi lembaran-lembaran halaman media masa pada saat musim pilkada berlangsung. Pihak *incumbent* selalu menggunakan jasa media lebih awal untuk dapat meningkatkan citra positif dari kinerja politiknya. Biasanya yang selalu diberitakan adalah keberhasilan program kerja atau kunjungan-kunjungan kerja ke rakyat.

Selain empat kelompok di atas, tentunya masih terdapat beberapa kelompok kecil lainnya yang juga mendapat keuntungan dari datangnya musim pilkada. Keuntungan memang menjadi hukum alam bagi setiap pelaku yang terlibat dalam satu musim tersebut. Terlebih musim pilkada memang tidak bisa dielakkan kehadirannya setiap lima tahun sekali.

Harapan Besar

Di satu sisi, rakyat selalu saja memiliki harapan besar atas hadirnya pilkada. Harapan itu biasanya adalah munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang lebih peduli terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini seperti jauh panggang dari api. Pilkada sangat jarang dan sulit sekali melahirkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam membangun kesejahteraan masyarakat daerah.

Kota Medan yang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pilkada juga mempunyai pekerjaan rumah yang besar untuk mencari kepemimpinan yang memiliki kompetensi dalam mengatasi persoalan masyarakat hari ini. Ketimpangan ekonomi di kota ini semakin terasa. Keterasingan warga lokal yang terus terpinggirkan oleh pembangunan apartement, plaza dan mall yang semakin menjadi-jadi harus segera diselesaikan secepatnya.

Persoalan tata ruang adalah persoalan utama di luar konteks ekonomi seperti ketersediaan lapangan pekerjaan. Visi dan misi calon walikota harusnya tidak lagi bersumber dari persoalan reme-temeh seperti pembuatan KTP dan KK gratis, atau berobat dan bersekolah

gratis. Sebab persoalan remeh-temeh itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk menyediakannya.

Namun terkadang visi dan misi itu hanya menjadi pepesan kosong belaka. Usai pilkada, mereka yang terpilih untuk memimpin di satu wilayah kabupaten/kota pasti lupa dengan apa yang telah dijanjikan selama masa kampanye. Rakyat kembali menjadi kambing congek, tidak berdaya dan tetap saja dilupa di tengah hiruk pikuk pembangunan.

Mental Pejabat Indonesia

Old habit die hard –kebiasaan lama yang sulit dihilangkan –begitu ungkap pepatah Inggris yang masih menerpa kehidupan bangsa kita hari ini. Kita belum berubah menjadi lebih baik sejak tahun 1977 bahkan dapat bisa dikatakan menjadi lebih buruk. Ciri-ciri negative yang digambarkan oleh Mochtar Lubis tiga puluh tiga tahun silam dalam bukunya yang berjudul; “Manusia Indonesia” itu masih saja dapat dengan mudah kita temui pada setiap diri anak bangsa. Terkhusus bagi para pejabat negara.

Pada bukunya itu, Mochtar menggambarkan ada enam ciri manusia Indonesia yaitu; hipokrit atau munafik, segan dan enggan bertanggung jawab, bersikap feodal, percaya takhayul,

artistik dan lemah wataknya. Di antara enam ciri tersebut hanya ciri artistik yang merupakan ciri positif sedangkan sisanya adalah ciri negative.

Ciri yang digambarkan oleh Mochtar sampai saat ini masih dengan mudah kita liat, pada diri para pejabat kita di tengah pagelaran pilkada. Keenam ciri itu akan muncul secara alamiah, tanpa direkayasa. Sikap munafik atau hipokrit misalnya bisa kita temui setelah pilkada usia, kepala daerah terpilih selalu saja bersikap hipokrit, lupa atas janji-janji kampanye yang harus direalisasikan. Sikap hipokrit ini digunakan untuk mengelabui masyarakat agar dapat memilih dirinya, meski setelah terpilih dirinya sudah tidak peduli lagi.

Ciri yang kedua adalah enggan bertanggung jawab. Sikap ini sering muncul pada saat kepala daerah enggan bertanggung jawab atas satu persoalan. Biasanya mereka lebih memilih untuk menyalahkan bawahannya seperti kepala dinas dan hal ini sangat lumrah kita temui diberbagai pemberitaan di media masa. Ciri ketiga adalah sikap feodalisme yaitu sebuah sikap yang enggan mendapatkan kritik. Hampir semua kepada daerah yang telah terpilih enggan untuk mendapatkan kertikan.

Percaya tahyul menjadi satu rahasia umum bahwa hampir setiap kepala daerah yang ingin maju pasti telah memiliki dukun tersendiri untuk bisa mengatasi persoalan mistis dari pihak lawan yang membencinya. Ciri berikutnya adalah ciri artistik yang dianggap menjadi ciri positif oleh Mochtar. Nah, ciri ini ini bisa dilihat hampir di setiap event kampanye yang selalu saya melibatkan keybot dan live music, ini adalah ciri artistik dari manusia Indonesia.

Ciri terakhir adalah memiliki watak yang lemah. Watak yang lemah ini selalu menjadi penghalang bagi tata kelola pemerintahan. Kepala bidang dan kepala dinas selalu saja bekerja atas dasar ABS (Asal Bapak Senang). Sikap dan perilaku ini muncul dikarenakan ketakutan mereka terhadap pimpinan. Ancaman yang paling membahayakan adalah pemindahan posisi dan atau mutasi.

Anda mungkin saja boleh marah dengan tulisan ini karena ciri yang diuraikan Mochtar Lubis tersebut masih saja dengan mudah kita temui. Bahkan pada diri kita sendiri. Jadi jangan heran jika pembangunan hari ini masih saja tetap berjalan di tempat dan tidak menguntungkan rakyat. Sebab orientasi dari penyelenggaraan pilkada bukanlah untuk mencari pemimpin yang

bertanggung jawab dan amanah. Tetapi lebih kepada usaha mencari keuntungan dengan cara menimpu rakyat. (*)

Sepak (Mafia) Bola⁴²

Kabut hitam masih saja menyelimuti PSSI, setelah dualisme kompetisi dan konflik internal pada priode (Djohar Arifin) sebelumnya, kini PSSI mengalami persoalan baru yang lebih pelik yakni pembekuan oleh Kemenpora melalui Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015. Menurut beberapa pemberitaan media olahraga, keluarnya SK No. 01307 Tahun 2015 ini dilatar belakangi oleh acuhnya PSSI terhadap tiga surat peringatan Kemenpora yang dikeluarkan sebelumnya. Salah satu isi surat tersebut adalah memerintahkan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk memenuhi permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

BOPI meminta kepada Arema dan Persebaya untuk tidak mengikuti Liga Indonesia QNB (nama baru menggantikan Liga Indonesia ISL) dengan alasan kedua tim ini masih memiliki masalah internal yakni pada aspek legalitas. Kedua klub tersebut memiliki kepemilikan ganda (ada PT Arema Cronus Indonesia dan PT Arema Indonesia. Persebaya pun ada PT Mitra

⁴² Diterbitkan Pertamakali di Harian Medan Bisnis,

06 Juni 2015

Muda Inti Berlian dan PT Pengelola Persebaya) yang keduanya sah. Atas dasar ini kedua tim dinyatakan tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh BOPI. Namun entah apa yang membuat kedua klub tersebut melawan peringatan BOPI. Keduanya masih saja mengikuti QNB meski tidak mendapatkan izin keramaian dari pihak ke polisian setempat ketika pertandingan perdana QNB dilakukan.

Perlawanan Persebaya dan Arema terhadap BOPI ternyata menyeret Kemenpora -yang merupakan induk dari BOPI -untuk turun tangan. Ironisnya, Kemenpora malah memberi sanksi dengan membekukan PSSI atas dasar Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2017 Pasal 122 ayat 2 huruf g, yaitu ditariknya pengakuan kegiatan induk cabang olahraga yang dalam hal ini adalah PSSI. Keputusan menjadi pro-kontra dikalangan pengamat dan pengiat sepak bola. Bagi yang *pro* kebijakan ini menyatakan; keputusan yang diambil oleh Mempora merupakan langkah yang baik untuk memperbaiki PSSI agar lebih transparan dan akuntabel dalam kepengurusannya. Selain itu, diharapkan juga akan terbentuknya sistem kompetisi sepak bola yang berkualitas dan jauh dari mafia.

Namun bagi pihak yang kontra, menilai tindakan yang diambil Menpora akan berdampak negative bagi perkembangan sepak bola. Khususnya akan datangnya sanksi dari FIFA dan bertampak pada masa depan sepak bola Indonesia. Belum lagi kebijakan ini akan memakan banyak korban dari element sepak bola -mulai dari pemain, pengurus klub, wasit, perangkat pertandingan -yang jika dihitunghitung berjumlah lebih dari 2.000an orang.

Kemana ribuan orang yang terkena dampak ini akan mencari nafkah? Jika-pun kompetisi bisa berlanjut dibawah naungan Kemenpora, apakah akan ada sponsor yang tertarik untuk mendanai klub? Terlebih kompetisi yang nantinya akan dijalankan oleh Mempora ini tidak diakui sama sekali oleh FIFA. Kini, Sanksi dari FIFA telah turun. PSSI sudah dinyatakan keluar dari keanggotaan FIFA dan tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional sampai campur tangan pemerintah -melalui Mempora -telah benar-benar bersih.

Calciopoli

Musim 2006 menjadi musim suram bagi sepak bola Italia. Surat kabar di Italia memasang berita *headline* terkait kasus calciopoli yang terjadi pada musim 2004-05. Kasus ini menyeret

beberapa klub besar di Seri A Italia seperti Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio dan Regina. Skandal ini pertama kali terungkap dari penyelidikan jaksa pada sebuah agensi sepak bola terkenal di Italia, GEA World. Transkrip hasil percakapan telepon yang berhasil direkam mengungkap bahwa selama musim 2004-05, direktur umum Juventus, Luciano Moggi dan Antonio Giraudo melakukan percakapan dengan beberapa pejabat dari sepak bola Italia untuk mempengaruhi penunjukan wasit.

Dampaknya, Federasi sepak bola Italia (FIGS) mengeluarkan sanksi bagi setiap tim dan individu yang terlibat di dalamnya. Sanksi tersebut tidak tanggung-tanggung. Juventus misalnya harus rela turun ke Seri B dan gelar Juara Seri A pada musim 2005 dan 2006 dicabut. Sedangkan individu seperti Luciano Moggi mendapatkan sanksi seumur hidup tidak diperbolehkan aktif terlibat dalam sepak bola Italia di level manapun. Selain itu Antonio Giraudo: mendapat sanksi denda €20,000, tidak aktif selama lima tahun dari sepak bola Italia, dan dipenjara tiga tahun, plus disanksi seumur hidup dari keanggotaan FIGC di level apapun.

Dari kasus *calsiopoli* ini kita bisa melihat bagaimana pemerintahan Italia sama sekali

tidak mencampuri persoalan sepak bolanya. Meski kasus ini menjadi kasus yang memalukan dalam sejarah pesepak bolaan Italia. Pemerintah Italia memberikan ruang kepada penegak hukum dan federasi sepak bola Italia (FIGC) untuk mengatasi sendiri persoalan mafia yang ada di kompetisi sepak bola mereka. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah – melalui Memporu – tidak memberikan ruang yang sama kepada PSSI untuk mengatasi persoalan mereka secara mandiri? Atau setidaknya mengapa pemerintah tidak membentuk tim investigasi secara tersendiri untuk mengusut kasus mafia di tubuh PSSI?

Dua pertanyaan ini penting untuk dijawab, sebab wacana yang beredar sekarang adalah; keberadaan mafia sepak bola membuat PSSI tidak memiliki prestasi sama sekali. Kita mungkin sepakat tentang PSSI yang tidak pernah menghasilkan prestasi pada semua level internasional. Bahkan jika merujuk pada perjalanan PSSI, untuk level Piala AFC saja, PSSI tidak pernah meraih piala sama sekali. Namun, pertanyaan selanjutnya muncul, benarkah mafia sepak bola yang mempengaruhi tingkat prestasi PSSI? Jika benar, lantas siapa mafia sepak bolanya? Bisakah kita menunjuk orangnya secara langsung? Kejelasan terkatik siapa yang

menjadi mafia sepak bola haruslah dengan tegas dibuka oleh Menpora. Setidaknya dengan mengetahui siapa mafia sebenarnya, akan lebih mudah untuk mengatasi persoalan yang ada tanpa harus membekukan PSSI secara institusi. Melakukan *blacklist* terhadap mereka yang terbukti menjadi mafia adalah pilihan terbaik.

Penutup

Kasus mafia dalam kompetisi sepak bola sebenarnya tidak hanya dialami oleh Indonesia semata. Kejadian ini juga dialami oleh banyak negara dengan kompetisi sepak bola yang lebih maju dan modern seperti di Liga Italia dan Liga Inggris. Motifnya utamanya sama, pengaturan skor hasil pertandingan dengan melibatkan seluruh element di dalamnya, mulai dari pemain, pelatih, wasit dan perangkat pertandingan.

Ironisnya, mafia-mafia sepak bola ini sendiri berhasil masuk ke dalam federasi sepak bola sekaligus FIFA. Namun kasus-kasus seperti ini tidak dibiarkan lama. Individu-individu yang terbukti menjadi mafia langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak penegak hukum. Kini kita berharap, langkah yang sama bisa kita lakukan di sini, di Indonesia. Jangan hanya

sekedar tuding-menuding. Tapi harus dibuktikan, siapa mafia yang disebut-sebut itu? Sehingga mafia yang ada di dalam tubuh PSSI bisa di sepak dan disingkirkan. Dan sepak bola di Indonesia dapat berjalan normal kembali. (*)

KPK harus jadi

“Ikan di Laut”⁴³

Integritas, mungkin itu yang selama ini dicari banyak orang dalam memilih seorang pemimpin. Jujur, setia dan dapat dipercaya merupakan bagian penting dari pada integritas itu sendiri. Sikap integritas itu secara tidak langsung nantinya akan melahirkan manusia yang kredibel. Namun yang jadi persoalan sekarang masihkah ada orang seperti itu yang hidup di zaman ini? jika ada maukah ia untuk terjebak dalam kehidupan yang jauh dari pada kredibilitas itu sendiri ?

Perkataan ketua DPR RI, Marzuki Ali bukan suatu isapan jempol semata, kenyataan sekarang memang begitu, sangat sulit mencari orang-orang yang memiliki kredibilitas di tengah kehidupan yang penuh dengan muatan kepentingan pribadi dan kelompok tetapi apakah KPK harus dibubarkan jika tidak ada seorang calon yang memiliki kredibilitas ?

⁴³ Diterbitkan Pertamakali di Opini Harian Waspada,

04 Desember 2011

Dari awal kemunculannya KPK memang mengandung banyak kontropersi, KPK muncul karena sudah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga hukum lainnya untuk menangani kasus korupsi di negeri ini. lebih parahnya lagi KPK dimunculkan hanya untuk memenuhi syarat di mata dunia bahwa Indonesia benar-benar serius dalam menangani kasus korupsi sehingga para investor akan merasa aman dalam menginvestasikan uangnya di negeri ini.

Vis to vis antara lembaga hukum di negeri ini makin terasa ketika masalah “cicak vs buaya” muncul. Dari sana tampak begitu buruknya penegakan hukum di negeri ini. masih ada kesan tebang pilih, siapa yang kuat dia akan bertahan dan di sini kekuatan hukum harus tunduk kepada kekuatan politik, sehingga dalam perjalanan penegakan hukum tidak pernah tercapai.

Ketika KPK menjadi lembaga “*superbody*” dan mengancam eksistensi lembaga yang lain serta sampai mengancam kepada tatanan kepresidenan, KPK kemudian dihajar dengan melakukan tuduhan kriminal terhadap tiga pimpinan KPK masa itu; Antasari, Bibit dan Chandra. Dari sana kemudian diadakan pemilihan ketua KPK yang baru untuk priode

satu tahun. Dari seleksi yang panjang sampai ke tatanan DPR munculah Busroh Muckodas sebagai pemenang aklamasi yang dipilih oleh DPR.

Bentuk pemilihan seperti itu sampai sekarang terus dipakai yang endingnya selalu saja jatuh ke tangan DPR. Ketika ini terjadi bukan tidak mungkin adanya lobi politik dan deal politik yang dilakukan oleh para calon untuk mendapatkan posisi sebagai ketua terpilih. Jika ini terjadi maka proses tawar menawar pun kemudian terjadi. Adanya janji tersembunyi (kolusi) yang harus dilakukan sehingga tidak salah dalam pelaksanaan tugas akhirnya KPK terkesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apabila konteks pemilihannya masih dilakukan seperti ini sampai kapanpun KPK tidak akan bisa dipercaya.

Budaya Korup Bangsa Kita

Mentalitas bangsa kita masih mentalitas korup, perilaku korupsi terasa mendarah daging. Bohong jika ada orangnya menyatakan dirinya tidak pernah melakukan tindakan korup. Mengambil yang bukan haknya, memakai dan mengurangi yang bukan haknya juga merupakan perilaku korup. Namun biasanya

sifat korup itu sangat erat dan mudah terlihat jika dilakukan oleh para abdi Negara. Karena apa? karena yang mereka kerjakan berhubungan sangat dekat dengan hajat hidup orang banyak sebagai sebuah pengejawantahan perilaku Negara.

Mentalitas korup itu sudah ada sejak zaman V.O.C dari sana kemudian korupsi menjadi suatu budaya yang susah untuk dibuang. Tiga puluh dua tahun zaman orde baru menambah catatan kelam akan korupsi. Inilah bagian dari kenyataan bahwa semakin giat korupsi diberantas semakin banyak orang yang akan melakukannya secara terang-terangan dan terbuka. Oleh karenanya bisa saja ketika pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan jangankan seorang camat presidenpun mungkin akan terlibat dan menjadi tersangka.

Sistem yang ada sekarang ini juga merupakan sistem yang korup karena mengharuskan seorang untuk menjadi koruptor. Kenapa? coba perhatikan dari iklim demokrasi pada saat Pilkada, Pilgub, Pilleg dan Pilpres mengharuskan seorang calon mengeluarkan banyak biaya untuk sebuah kampanye politiknya. Masa yang datang bukan masa yang murni, tetapi masa banyaran, yang diharapkan untuk

mendengar orasi dan janji politik sang calon, yang tidak tau kapan akan bisa terwujud.

Bagi masyarakat gagasan sudah tidak berarti yang mereka tau berapa mereka dibayar untuk menghadiri acara itu, dapat bingkisan apa dan di fasilitasi apa, semuanya serba materil. Tidak mungkin seorang calon dapat membiayai itu sendiri, yang pasti akan butuh donatur, dalam hal ini stekholder, pengusaha dll. Karena Rata-rata kepala daerah tingkat II untuk memenangkan pilkada harus memiliki dana segar sekitar 5 s/d 7 M.

Tentu anggaran yang sudah dikeluarkan selama kampanye politik harus dikembalikan. Bagi mereka yang menjadi pendukung dana terbesar maka akan diberi imbalan proyek-proyek pembangunan yang besar. Bagi mereka yang berjasa akan diberikan jabatan strategis dan kenaikan pangkat. Mungkin bagi mereka hal tersebut adalah bagian dari pada politik etis, tetapi apa yang dihasilkan bukan suatu yang etis.

Untuk pengembalian dana pribadi misalnya, tidak salah jika melalui jalur penerimaan CPNS atau proses kenaikan jabatan bagi para PNS. Untuk mereka yang menginginkan hal tersebut harus dengan cara membayar uang suap, berapa

angka rata-ratanya untuk itu? “ bisa saja mencapai ratusan juta rupiah atau lebih mungkin” itu sudah menjadi rahasian umum bagi bangsa ini. jangan malu lagi untuk mengakui. Akhirnya si PNS pun juga berperilaku korup, jika tidak dapat korupsi uang maka akan korupsi waktu, yang penting dana awal bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan bapak pertiwi sebagai bentuk terimakasih.

Bukan hanya dikalangan PNS, hampir di semua instansi dan juga sisi kehidupan lain berlaku hal yang sama. Hal ini kemudian menjadikan korupsi sebagai permasalahan yang tidak pernah selesai. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra dionary crime*), perbuatan yang korup menimbulkan efek yang luar biasa, mulai dari pembodohan, kesengsaraan, penderitaan bagi rakyat miskin karena tertutupnya hak-hak untuk mendapatkan akses hidup layak, sehingga korupsi menimbulkan *multiplier effect* dalam katagori negatif.

Ini kemudian menjadi masalah sosial di republik ini, kerena terjadi di dalam antar hubungan di antara warga masyarakat dan dapat mempengaruhi proses relasi sosial, Bukan hanya sampai di situ karena kemudian hal ini berkembang menjadi isu sosial yang dapat

menghambat pencapaian tujuan penting dalam masyarakat. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatasi masalah ini harus bisa belajar dari ikan di laut.

Belajar dari ikan di laut

Ikan di laut merupakan salah satu binatang yang luar biasa, karena dapat membentengi dirinya dari pengaruh lingkungan sekitar tempat ia hidup. Coba perhatikan, air di laut itu rasanya asin karena kadar garam di laut cukup tinggi, tetapi apa yang terjadi dengan ikan? Ia hidup di dalam air yang asin bahkan ia makan dan minum juga dari air yang sama namun ikan tidak pernah asin daging dan kulitnya. Ia bersih dan terjaga dari lingkungan yang asin itu. Sampai kapanpun ia tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut.

Pimpinan KPK kelak juga harus bisa seperti itu, tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang sudah korup ini. sehingga pemberantasan korupsi di negeri ini dapat berlangsung dengan asas kebenaran dan keadilan. Bukan atas asas kepentingan pribadi dan golongan politik yang mendukungnya dan akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK akan kembali meningkat.

Kredibel atau dengan kata lain dapat dipercaya muncul karena adanya Sikap jujur. Jujur itu bukan berarti tidak pernah berbohong tetapi lebih dari itu. Jujur adalah sikap yang ketika situasi kondisi dan keadaan membuatnya pantas untuk berbohong, menipu, serta memanipulasi tetapi ia tidak melakukannya. Sikap seperti inilah yang harus terus dipertahankan karena walaupun ia memiliki kekuasaan untuk itu tetapi ia tidak pernah memanfaatkannya.

Penutup

Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan memiliki nilai - nilai luhur yang agung, tetapi hal itu tidak pernah tampak, karena kesadaran belum juga timbul untuk menghujudkan kepentingan bersama akan semangat ke bangsaan untuk menciptakan “manusia yang adil dan beradab.” Prilaku memanipulasi soal saat ujian nasional adalah suatu transfer sikap yang sangat buruk dalam pembangunan sumber daya manusia. Semua berkerja sama untuk melakukan manipulasi itu. Akhirnya generasi yang muncu adalah generasi dengan hasil manipulasi.

Demokrasi mengajarkan kepada pemilihan suara terbanyak untuk menjadi seorang

pemenang. Jika kebanyakan rakyat di negara ini adalah seorang yang korup, maka tidak salah kemudian pemimpin yang mereka pilih untuk memimpin mereka adalah pemimpin yang korup hal ini dikarenakan satunya visi dan pandangan akan korupsi yang begitu nikmat untuk dilestarikan. Sehingga bagi rakyat yang kebanyakan itu harus memilih pemimpin yang dapat melindungi perilaku korup agar tidak dibumihanguskan.

*Dus, akhirnya bagi sedikit rakyat yang lain, yang tidak terlibat jauh tentang ini mulai kesal, apatis dan memilih untuk bersikap masa bodoh sambil memikirkan kehidupan pribadi kedepan sambil berdoa; *robbana atina fitdun ya hasanah wa fil akhiroti hasana wa kina azabannar*. Inilah gambaran tentang kenyataan kita sekarang. (*)*

Mencari Kejujuran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menyambut hari anti korupsi se-dunia pada 9 desember 2012 lalu, mengeluarkan tema kampanye anti korupsi yang bertuliskan “berani jujur, hebat !” tema ini, sampai sekarang masih terpampang di atas banner yang berukuran lebih kurang 20x30 meter dan menutupi satu sisi dari gedung KPK yang berada di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan.

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, seperti dilansir beberapa situs berita online, pemilihan teman tersebut diusung karena tiga hal. *Pertama*, jujur adalah langkah awal dalam memberantas korupsi. *Kedua* jujur adalah nilai yang paling fundamental (dasar). *Ketiga*, jujur saat ini langka, sehingga harus menjadi bagian dari aktivitas sikap dan perilaku kita sehari-hari.

Ketiga alasan di atas meisyaratkan bahwa kita telah lama kehilangan sikap jujur, baik kepada diri kita sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Perhatikanlah dalam keseharian, sudah jarang kita bisa jumpai orang yang mau jujur dan berani jujur. Suami sering berbohong pada istri perihal urusan kantor, sumber penghasilan,

istri juga begitu, sering berbohong kepada suami dalam hal belanja rumah tangga. Anak sering berbohong kepada orang tuanya tentang aktifitasnya di sekolah dan diluar sekolah bersama teman, pedagang yang sering membohongi konsumennya agar barang dagangannya laku, politisi sering memberikan janji palsu agar dapat dipilih, dan lain sebagainya.

Kebiasaan ini seakan sudah menjadi satu kebudayaan baru dalam kehidupan masyarakat kita, tiada hari tanpa berbohong. Padahal dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW berkata; *tinggalkanlah apa yang engkau ragukan dan lakukan apa yang tidak meragukanmu, sesungguhnya kejujuran itu melahirkan ketenangan dan kebohongan itu melahirkan kebimbangan.* Hadist ini mengingatkan kita tentang bagaimana kondisi psikologis seorang pembohong yang tidak akan pernah tenang jiwanya, karena ia selalu diikuti oleh rasa takut akan terbongkarnya kebohongan yang pernah ia lakukan.

Kisah Tentang Kejujuran

Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan di zaman *Tabiin* bernama Yunus bin Ubaid,

menyuruh saudaranya menjaga kedainya kerana ia akan keluar untuk solat. Ketika itu, datanglah seorang *badwi* yang hendak membeli perhiasan di kedai Yunus. Maka terjadilah jual beli di antara badwi itu dan penjaga kedai yang diamankan tadi oleh Yunus.

Satu barang perhiasan permata yang hendak dibeli harganya empat ratus dirham. Saudara kepada Yunus menunjukkan suatu barang yang sebetulnya harga dua ratus dirham. Barang tersebut dibeli oleh badwi tadi tanpa diminta mengurangkan harganya tadi. Di tengah jalan, *badwi* tersebut terserempak dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid lalu bertanya kepada si badwi yang membawa barang perhiasan yang dibeli dari kedainya tadi, kareana Yunus mengenali barang tersebut. Yunus bertanya kepada badwi itu, "Berapakah harga barang ini kamu beli?" Badwi itu menjawab, "Empat ratus dirham."

Tetapi harga sebenarnya cuma dua ratus dirham saja, tutur Yunus. Dan ia menawarkan kepada si *badwi* untuk kembali ke tokonya supaya dapat mengembalikan sisa uang yang selebihnya kepada si *badwi*.

"Biarlah, ia tidak perlu. Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang

empat ratus dirham itu, sebab di kampungku harga barang ini paling murah lima ratus dirham." Ucap *badwi* yang dengan ikhlas menerima barang tersebut.

Tetapi saudagar Yunus itu tidak mahu melepaskan *badwi* itu pergi. Ia terus mendesak agar *badwi* tersebut balik ke tokonya. Dan akhirnya *badwi* tersebut menerima permohonan Yunus dan dikembalikanlah sisa uang si *badwi* tersebut.

Setelah *badwi* itu pergi, berkatalah Yunus kepada saudaranya, "Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan dua kali ganda?" ucap Yunus dengan nada marah.

"Tetapi dia sendiri yang mahu membelinya dengan harga empat ratus dirham." Saudaranya cuba mempertahankan bahwa dia dipihak yang benar. Yunus berkata lagi, "Ya, tetapi di atas belakang kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri."

Sikap dari pribadi Yunus di atas mungkin dapat dijadikan tauladan yang baik pada keseharian kita, bagaimana seorang saudagar yang berlaku jujur kepada konsumennya, walaupun pada

posisi tersebut si konsumen tidaklah merasa dirugikan.

Dalam satu diskusi, seorang teman pernah bertutur indah kepada saya; “pada hakekatnya, orang jujur itu bukanlah orang yang tidak pernah berbohong, tetapi orang yang jujur itu adalah orang yang ketika situasi atau kondisi mendukungnya dirinya untuk berbohong (seperti kisah di atas) tetapi ia tidak melakukannya.

Pada kondisi inilah kita memerlukan orang-orang yang mempunyai sikap seperti Yunus. Sikap jujur yang sejujur-jujurnya, dan adil seadil-adilnya. Jika sikap seperti itu dapat kita bentuk dalam keharian maka, tidak ada lagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, tidak ada lagi pedagang yang mencari keuntungan yang berlipat ganda dan tidak ada lagi penegak hukum yang bertidak semaunya.

Nabi Muhammad SWA bersabda; *“wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke sorga, begitu pula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan termaktub di sisi Allah atas kejujurannya. Sebaliknya, janganlah berdusta, sebab dusta akan mengarah pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka,*

seseorang yang senantiasa berdusta, dan memperhatikan kedustaannya, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Bukhari-Muslim dari Ibnu Mas’ud)

Jujur merupakan suatu sikap yang diwajibkan bagi kita, Nabi Muhammad SAW sebelum datangnya Islam, beliau sudah masyhur sebagai orang yang jujur. Orang-orang kafir Makkah mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW, sekalipun mereka tidak beriman. Bahkan, mereka memberi gelar al-Amin (orang yang tepercaya) kepada Nabi Muhammad SWA. Olehkarenanya, kejujuran itu adalah kewajiban dan keharusan. Namun, di negara yang kerisis dengan kejujuran, menemukan orang yang berani jujur itu adalah suatu kehebatan. Jadi, Sudahkah kita jujur hari ini? (*)

Awas (Desentralisasi)

*Rent Seeking*⁴⁴

Tahun lalu, dalam laporan Bank Dunia dikatakan tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin tinggi dalam 15 tahun terakhir. Laju pertumbuhan ketimpangan tersebut bahkan dapat dikatakan paling cepat di antara negara-negara di kawasan Asia Timur. Tercatat, ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan pesat pada periode 2002-2013. Bahkan pada tahun 2013 kemarin Indeks Gini mencapai 0,41 dan kini –pada tahun ini – naik dua point menjadi 0,43. Artinya, angka ketimpangan di Indonesia masuk dalam kategori tinggi.

Meski angka ketimpangan masuk dalam kategori tinggi, namun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil bahkan masuk dalam kategori positif yakni tumbuh pada kisaran empat sampai lima persen setiap tahun. Artinya ada korelasi yang cukup kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan

⁴⁴ Diterbitkan Pertamakali di Harian Mimbar Umum

peningkatan ketimpangan. Ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1998 dan tahun 2007, angka ketimpangan mengalami penurunan. Sedangkan pada saat kondisi ekonomi kembali meningkat, ketimpangan juga semakin tinggi.

Hal ini terjadi karena kelompok *the have* (orang kaya) lebih siap menghadapi krisis dan pada saat terjadi *booming* (peningkatan) ekonomi kembali, mereka juga lebih siap untuk melipatgandakan kekayaan dan pendapatannya. Sedangkan bagi kelompok *the have not* (tidak mempunya/miskin) turun-naiknya kondisi ekonomi tidak terlalu berpengaruh dengan kehidupan mereka. Hanya saja, keterbatasan finansial (baca: uang dan aset), membuat penurunan pendapatan sedikit saja akan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Di sinilah ketimpangan itu terjadi. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, kelompok *the have* akan melipatgandakan asetnya, sedangkan kelompok *the have not* kondisinya tetap sama; bekerja setiap hari dengan gaji bulanan yang pas-pasan.

Bentuk Ketimpangan

Jika kita membaca data-data atau melakukan "*blusukan*" secara langsung ke tengah kehidupan masyarakat, kita akan menemukan banyak bentuk ketimpangan yang nyata. Ketimpangan antara pulau jawa dan luar pulau jawa adalah satu fenomena yang sangat umum yang bisa kita perhatikan. Lebih spesifik lagi, di kota ini, Medan, kita akan sangat gampang melihat bentuk ketimpangan yang rill.

Silahkan anda pergi ke pemukiman-pemukiman penduduk yang ada di perkotaan. Anda akan melihat bagaimana kondisi masyarakat miskin kota yang hidup dibalik kemewahan -wajah perkotaan -seperti apartement, plaza dan hotel-hotel lainnya. Bantaran Sungai Deli dan Sungai Babura adalah contoh yang *representative* untuk ini. Ada pemukiman kumuh yang tersembunyi di balik mewahnya bangunan apartement, perumahan, hotel dan gendung-gedung lainnya.

Dengan gambaran ini, terlihat jelas bahwa ketimpangan tidak hanya tentang pendapatan dan penghasilan yang tidak merata atau timpang. Tetapi ada bentuk variabel lain yang juga bisa dipakai untuk mengukur ketimpangan di tengah masyarakat yaitu Gini wealth dan Gini tanah (kepemilikan tanah). Kedua indeks

gini ini jarang digunakan untuk mengukur ketimpangan di tengah masyarakat, jika-pun digunakan tetapi hasilnya tidak dipublikasi secara terbuka atau jarang mendapatkan perhatian khusus oleh media.

Padahal kepemilikan tanah di negara agraris seperti Indonesia sangatlah penting sebab hampir setengah dari penduduk Indonesia - atau sekitar 39 persen - bekerja pada sektor pertanian. Ketimpangan yang dihasilkan atas kepemilikan tanah tentu akan berdampak secara langsung terhadap petani. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus pertanian yang dilakukan BPS pada 2013 lalu yaitu terjadi penurunan jumlah rumah tangga pertanian dari 31,17 juta pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta (atau 11% dari penduduk Indonesia) pada tahun 2013. Ironisnya, pada periode tahun yang sama (2003-2013) terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Di mana pada tahun 2003 ada 4.011 perusahaan dan pada tahun 2013 naik menjadi 5.486 perusahaan.

Fakta lain yang bisa dilihat dari Sensus Pertanian BPS adalah semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah. Dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta (61,5%) di antaranya tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut buruh tani

di tanah-tanah petani lain, maupun menjadi buruh di perusahaan-perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar.

Hal ini yang kemudian menjadikan lokasi bermukimnya petani selalu menjadi kantong-kantong kemiskinan. Bagi mereka –kaum tani– yang tidak sanggup lagi mengelola lahan pertaniannya dengan berbagai alasan, lebih memilih untuk menjual lahan pertaniannya kepada pengembangan. Penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun inilah yang menjadi bukti abainya pemerintah dalam menyikapi persoalan petani dan tanah selama ini. Efeknya tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan sangat rendah dan tidak stabil. Hal ini yang kemudian mempengaruhi tingkat perkembangan kualitas SDM di pedesaan dan itu membuat ketimpangan antara desa dan kota menjadi sangat nyata.

Dilema Perkotaan

Tentunya, bentuk ketimpangan atas kepemilikan tanah tidak hanya terjadi di desa seperti yang tergambar di atas. Ketimpangan kepemilikan tanah juga terjadi di perkotaan. Penguasaan tanah atau monopoli tanah oleh beberapa kelompok orang dengan perusahaan

besar-besarnya tentu berpengaruh terhadap kondisi perkotaan. Di beberapa kota besar di Indonesia, hampir semua tanah dan bangunannya dikuasai oleh kelompok dan orang-orang tertentu.

Apa yang dikatakan Prof. Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu bahwa; 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 74 persen tanah di Indonesia dengan bentuk *konglomerasi, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH* dan lain sebagainya, adalah bukti kuat bahwa proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok konglomerat. Kondisi inilah yang membuat ketimpangan di Indonesia menjadi begitu nyata. kelompok-kelompok konglomerat tersebut semakin menguatkan cengkramannya ke daerah-daerah atau kota-kota di Indonesia.

Mereka (baca: konglomerat) masuk ke daerah-daerah melalui jalur desentralisasi. Mereka ikut terlibat secara langsung dalam proses Pilkada atau Pilgub dengan membiayai kampanye calon kepada daerah yang dianggap memiliki peluang yang besar untuk menang. Dampaknya politik balas budi pada tingkatan lokal berlangsung secara mulus. Semua regulasi dan kepentingan pengusaha untuk itu pasti akan diakomodir oleh kepada daerah meski pada akhirnya merugikan kepentingan publik.

Penutup

Aktifitas hubungan antara pihak konglomerat dan birokrasi –baik pada level pusat dan daerah –dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bisnis inilah yang kemudian disebut sebagai *rent seeking*. Pada dasarnya aktifitas *rent seeking* ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan peluang untuk menjadi penerima *rente* yang diberikan oleh birokrasi dengan cara menyerahkan sumberdaya atau menawarkan proteksi terhadap aktifitas konglomerat di tingkat daerah.

Maka tidak salah jika kemudian kita sangat mudah menemukan bangunan-bangunan seperti mall, rumah sakit, hotel dan apartement serta proverti lainnya yang berdiri tidak memiliki amdal dan tidak sesuai dengan peruntukan lahan serta tata ruang. Nah kini, apakah kita akan tetap terjebak pada kelompok-kelompok *rent seeking* yang telah terdesentralisasi ke daerah-daerah ini?

Politik Transaksional di Desa⁴⁵

Sejak dulu desa telah menjadi satu representative negara dalam skala lokal. Perkembangan dari masa ke masa terus saja mengalami perubahan, khususnya dalam tatanan politik pembangunan. Desa selalu saja dijadikan satu komoditas politik yang penting bagi setiap pemerintahan yang berkuasa. Pada masa kolonialisme, desa mulai menjadi wilayah teritorial dan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Belanda yang ditandai dengan berbagai aturan dan undang-undang yang disusun untuk kepentingan pemerintahan kolonial.

Salah satu aturan yang diterapkan pemerintah kolonial adalah memasukkan beberapa syarat untuk dapat menjadi kepala desa seperti tingkat pendidikan, usia, kesehatan fisik dan mental, etika, ketaatan beragama dan norma susila lainnya. Sejak masa ini, desa telah berada di bawah cengkraman politik kekuasaan kolonialisme. Kepala desa diberikan peranan

⁴⁵ Pertamakali Diterbitkan di Harian Waspada **Jum'at, 29 April 2016**

ganda, satu sisi bertindak mewakili kepentingan rakyat, di sisi lain harus mewakili kepentingan pimpinan -atau pemerintah -yang banyak ditunggangi agenda kepentingan politik pribadi.

Ironisnya, pasca kemerdekaan perilaku intervensi pemerintah pusat terhadap desa semakin meningkat, baik pada sama orde lama maupun orde baru. Pemerintahan desa ditata sedemikian rupa, khususnya pasca tragedi G30S-PKI 1965, atas perintah pusat banyak desa yang mulai mengontrol warganya dengan mendisiplinkan mantan aktivis PKI dan memberikan surat jalan bagi warga desa yang ingin keluar atau berpergian ke kota. Kondisi ini terus terjadi pada tahun 70an dan 80an.

Pada tahun 1970an, pemerintah pusat mulai memperkuat komunitas-komunitas desa yang mereka bentuk. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat pemerintah baik pada tingkat kabupaten/kota dan desa yang sibuk melakukan penyuluhan ke warga-warga dusun tentang pendidikan, kesehatan, keterampilan, perternakan dan perikanan serta sosialisasi tentang aktifitas perlombaan desa. Namun menjelang akhir tahun 1970an pemerintah mulai melakukan pendisiplinan terhadap warga dengan memberikan pemahaman semangat

pembangunan orde baru dengan “kedok” penguatan basis suara golkar.

Sedangkan pada tahun 1980an pemerintah orde baru semakin menguatkan akar birokrasinya melalui pemerintahan desa. Struktur organisasi pemerintahan desa menjadi sentralistik di tangan Kades dengan mengembangkan organisasi-organisasi yang mendukung beroprasinya kinerja pemerintahan dan pembangunan di desa seperti; LKMD, PKK, Dasa Wisma, Hansip, Karang Taruna dan RT/RW. Perombakan struktur organisasi desa ini kemudian membawa efek dengan tertariknya masyarakat kelas menengah -di pedesaan -untuk mengisi posisi-posisi jabatan di organisasi-organisasi ini. Kelompok kelas menengah ini kemudian mendapatkan simbol baru sebagai elit desa. Corak atau simbol tersebut bisa kita lihat dari penyebutan nama seseorang dengan melekatkan jabatan dan pangkat di depannya seperti; Pak RT, Pak RW dan Ibu Penggerak PKK, Ketua LKMD dan lain sebagainya.

Kompetisi untuk menempati posisi sebagai elit desa terus berlanjut hingga kini dan bahkan membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha tingkat desa untuk ikut berkompetisi. Pergulatan kompetisi antar elit desa semakin

menarik dengan dibukanya ruang baru Badan Perwakilan Desa (BPD) pada era otonomi daerah tahun 2000an. Dengan gambaran perkembangan politik desa dari masa ke masa ini kita kemudian pantas untuk bertanya, siapa yang sesungguhnya diuntungkan atas berkembangnya organisasi pemerintahan desa? Apakah hanya pemerintaah dan elit politik desa? Atau keseluruhan warga desa? Pertanyaan inilah yang penting untuk dijawab, apalagi setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dianggap hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

UU Desa

Ada pertanyaan besar yang sebenarnya harus kita jawab bersama yaitu; apakah berlakunya UU No. 6 Thn 2014 tentang Desa dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa? Pertanyaan ini penting untuk dijawab bersama sebab pada undang-undang ini desa diberikan kewenangan dalam pembangunan dengan mendorong pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, transparan serta bertanggung jawab.

Upaya tersebut diwujudkan dalam hal pemberian pelayan prima kepada masyarakat yang akhirnya berpengaruh kepada

peningkatan kesejahteraan bersama dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Posisi ini yang membuat desa harus diberdayakan dengan sumber pembiayaan yang memadai. Pada pasal 71 sampai dengan 75 UU No. 6 Thn 2014 dikatakan sumber-sumber pembiayaan di desa meliputi; pedapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten, hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan lainnya yang sah.

Nah sumber dana yang begitu banyak tersebut membuat desa semakin terlihat seksi dan menggiurkan bagi kelompok kepentingan atau kelompok elit yang ada di desa. Itu sebabnya mengapa pemilihan Kades saat ini begitu meriah dengan berbagai atribut kampanye dan diikuti secara antusias oleh kelompok elit lokal. Mereka seolah-olah hadir atas dasar keterpanggilan jiwa untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, padahal bisa saja kehadiran mereka di latar belakang oleh potensi sumber keuangan desa yang begitu besar.

Anda bayangkan saja, bantuan pemerintah kepada desa melalui APBN tahun 2016 mencapai angka Rp 46,9 triliun dan setiap desa

diperkirakan menerima sekitar Rp 800 juta. Dana tersebut masih berasal dari APBN saja, belum lagi dari bantuan keuangan provisi dan kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten dan pendapatan desa serta bantuan dari pihak ketiga. Jika ditotal, tidak menutup kemungkinan setiap desa mendapatkan dana sebesar satu hingga dua milyar rupiah setiap tahunnya. Besar bukan?

Politik Transaksi

Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman yang sedang konsen melakukan penelitian tentang politik masyarakat desa pasca berlakunya UU No. 6 Thn 2014. Pada pertemuan sederhana itu ia mengatakan bahwa seorang calon kepala desa terkadang harus mendapatkan dukungan politik dari anggota legislative –baik tingkat lokal maupun nasional –atau elit eksekutif lokal agar dapat menang menjadi kepala desa. Namun dukungan tersebut nantinya dibalas dengan menjadikan desa tersebut sebagai basis suara anggota legislative atau eksekutif tersebut.

Selain itu, pola transaksional kedua yang ia temukan dalam pentas pilkades adalah munculnya politik uang di tengah masyarakat. Masyarakat desa dimobilisasi dan diarahkan

untuk ikut serta dalam pemilihan dengan pendekatan uang. Meski tidak secara menyeluruh masyarakat terpengaruh tetapi dalam beberapa kasus terdapat masyarakat yang mau menerima dan mengharapkan politik uang.

Temuan ini tentunya membuat kita kaget, desa yang selama ini dinilai harmonis dan memiliki modal sosial yang kuat dengan ikatan-ikatan kebatinan, norma dan nilai-nilai sosial, sekarang harus terperangkap dalam berbagai bentuk polarisasi politik. Masyarakat desa terskat dalam berbagai kepentingan. Dari dulu hingga kini desa masih saja menjadi ladang pertarungan kepentingan bagi banyak elit. Dana desa yang diharapkan dapat untuk memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya teruji, sebab muncul kekuatiran akan dinikmati oleh mereka yang menang dalam pentas pilkades dan dijadikan “ladang proyek lokal” yang akan digarap oleh tim sukses.

Penutup

Logika politik transaksional secara sadar atau tidak sadar telah ikut mempengaruhi alur politik di Indonesia. Para politikus sudah berpikiran praktis dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kini alur

politik transaksional telah masuk dan mencengkram kehidupan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat pedesaan yang dominan berprofesi sebagai petani terus saja terabaikan. Itu sebabnya kemiskinan di pedesaan semakin meluas, kaum tani yang dominan hidup di pedesaan tidak menikmati hasil pembangunan yang bersifat *industrial-kapitalistik*.

Padahal pada waktu itu –sekitar tahun 1970an – kontribusi pertanian terhadap pembentukan pendapatan nasional (*produk domestik bruto*) mencapai 44,8% atau hampir separuh dari pendapatan nasional. Sumbangan tersebut lebih banyak dari pada industri manufaktur yang menyumbang cuma sebesar 8,4% terhadap penciptaan pendapatan nasional. Namun kini kondisinya berubah, desa menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan realitas kaum tani yang hidup serba sulit dan harus menjual tanahnya untuk dapat terus bertahan hidup. Akhirnya kita patut bertanya; bukankah usaha peningkatan kesejahteraan petani jauh lebih penting daripada pentas pilkades atau alokasi dana desa? (*)

Profil Penulis



Mujahiddin, S.Sos, MSP

Medan, 28 - 08 - 1989

S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial
FISIP UMSU (2007-2011)

S2 Studi Pembangunan FISIP
USU (2012-2014)

Pekerjaan:

- Dosen Tetap Yayasan Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (2014 -).
- Kepala Lab Sosial Politik Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (2015 - 2017)

Penelitian

- Pengembangan Model Mata Kuliah Praktikum I Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat (2014 - 2015 : Anggota)
- Model Strategi Focused Coping Orang Tua Dalam Menghadapi Anak Autis. (Studi Kasus Pada Orang Tua Anak Autisme Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Medan). (2015-2016 : Ketua)
- Implementasi Pengembangan Model Mata Kuliah Praktikum I Dan Ii Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten Di

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (2015-2016 : Anggota)
- Analisis Manfaat Tabungan Sampah Bagi Keluarga Miskin Di Kelurahan Sicanang Belawan Kota Medan (2016-2017: Ketua)
 - Strategi Perempuan Miskin Yang Menjadi Kepala Keluarga Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Keluarga (2016-2017 : Anggota)
 - Analisis Potensi Konflik Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) (2017 : Ketua)

Publikasi Buku

- Memahami Dan Mendidik Anak Autis Melalui Perspektif Dan Prinsip-Prinsip Metode Pekerjaan Sosial (2012 dan 2014)
- Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah (2016)

MALPRAKTIK PEMBANGUNAN

Sebuah Catatan


UMSU PRESS

